

KEBIJAKAN PUBLIK

(Teori, Proses, dan Penerapannya)

EDITOR: Agus Hendrayady

PENULIS:

Baharuddin, Aprih Santoso, Muliani,
Ade Putra Ode Amane, Aries Samudra,
Firdaus, Lamidi, Ani Heryani, Ade Iskandar,
Ari Ramdani, Fitri Kurnianingsih

KEBIJAKAN PUBLIK

(TEORI, PROSES, DAN PENERAPANNYA)

Baharuddin
Aprih Santoso
Muliani
Ade Putra Ode Amane
Aries Samudra
Firdaus
Lamidi
Ani Heryani
Ade Iskandar
Ari Ramdani
Fitri Kurnianingsih



KEBIJAKAN PUBLIK

(TEORI, PROSES, DAN PENERAPANNYA)

Baharuddin, Aprih Santoso, Muliani, Ade Putra Ode Amane,
Aries Samudra, Firdaus, Lamidi, Ani Heryani, Ade Iskandar,
Ari Ramdani, Fitri Kurnianingsih

ISBN: 978-623-09-5646-1

Tebal: iii + 232 hlm., 21 x 15 cm

Tahun Terbit: Oktober 2023

Editor: **Agus Hendrayady**

Penata Letak: **Lala Anita Ningrum**

Penata Sampul: **Anggrainy Fatmawulan**

Penerbit:

PT. ADIKARYA PRATAMA GLOBALINDO

Dusun Tegalsari RT 001/RW 004, Desa Jumoyo, Kec. Salam
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah

HP/WA: 08989999951, Email: apgpers@gmail.com

Website: www.adpraglobalindo.my.id

ANGGOTA IKAPI

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

*Dilarang memperbanyak isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara
apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga buku kolaborasi dalam bentuk program penulisan buku bersama dapat dipublikasikan dan dapat sampai di hadapan pembaca. Program penulisan buku kolaborasi ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Kebijakan Publik.

Sistematika buku “Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Penerapannya)” ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 11 Bab, diantaranya:

- Bab 1. Konsep dan Ruang Lingkup Kebijakan Publik.
- Bab 2. Ciri-Ciri dan Tujuan Kebijakan Publik.
- Bab 3. Pentingnya Studi Kebijakan Publik.
- Bab 4. Pendekatan Kebijakan Publik.
- Bab 5. Model-Model Kebijakan Publik.
- Bab 6. Proses atau Tahapan Kebijakan Publik
- Bab 7. Identifikasi dan Penyusunan Masalah Kebijakan Publik.
- Bab 8. Formulasi Kebijakan Publik.
- Bab 9. Implementasi Kebijakan Publik.
- Bab 10. Evaluasi Kebijakan Publik.
- Bab 11. Pendekatan dalam Analisis Kebijakan Publik.

Kami menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan, sejatinya kesempurnaan itu hanya milik Yang Kuasa. Oleh sebab itu, kami tentu menerima masukan dan saran dari pembaca demi penyempurnaan lebih lanjut.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung dalam proses penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Agustus 2023

Editor

Agus Hendrayady, S.Sos., M.Si.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
BAB 1 KONSEP DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PUBLIK	1
A. Konsep Kebijakan Publik	1
B. Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan dan Dimensi Kebijakan Publik	12
C. Perumusan Kebijakan Publik dan Ruang Lingkup Kebijakan Publik	16
DAFTAR PUSTAKA	20
BIODATA PENULIS	21
BAB 2 CIRI-CIRI DAN TUJUAN KEBIJAKAN PUBLIK	23
A. Pendahuluan	23
B. Ciri-Ciri Kebijakan Publik	41
C. Tujuan kebijakan Publik	50
D. Kesimpulan	58
DAFTAR PUSTAKA	60
BIODATA PENULIS	61
BAB 3 PENTINGNYA KEBIJAKAN PUBLIK	62
A. Pendahuluan	62
B. Pentingnya Kebijakan Publik	64

C. Penutup	70
DAFTAR PUSTAKA	72
BIODATA PENULIS	74
BAB 4 PENDEKATAN KEBIJAKAN PUBLIK	75
A. Pendekatan Rasional	75
B. Pendekatan Incremental	77
C. Pendekatan Advocacy	79
D. Pendekatan Partisipatif	80
E. Pendekatan Eksperimental	82
F. Pendekatan Kompleksitas.....	84
DAFTAR PUSTAKA	87
BIODATA PENULIS	92
BAB 5 MODEL-MODEL KEBIJAKAN PUBLIK.....	93
A. Model Inkrementalisme	93
B. Model Pengambilan Keputusan Rasional.....	94
C. Model Pilihan Publik.....	95
D. Model Proses	95
E. Model Kelembagaan (Dye, 2013)	96
F. Model Rasional (Dye, 2013)	97
G. Model Deskriptif dan Normatif (Dunn, 2018)	98
H. Model Sistem.....	99
I. Model Strategis (Bryson, 1988)	100
DAFTAR PUSTAKA	104

BIODATA PENULIS	106
-----------------------	-----

BAB 6 PROSES ATAU TAHAPAN KEBIJAKAN PUBLIK..107

A. Kebijakan Publik Sebagai Proses	108
B. Perumusan Kebijakan	110
C. Implementasi Kebijakan.....	115
D. Evaluasi Kebijakan Publik	118
E. Revisi Kebijakan	123
DAFTAR PUSTAKA	124
BIODATA PENULIS	126

BAB 7 IDENTIFIKASI DAN PENYUSUNAN MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK..... 127

A. Pengertian Identifikasi	127
B. Pengertian Penyusunan Masalah.....	129
C. Hubungan Identifikasi Penyusunan Masalah dengan Kebijakan Publik.....	132
D. Fenomena dalam Penyusunan Masalah	134
E. Identifikasi dan Penyusunan Masalah	137
F. Dinamika Penyusunan Masalah oleh Pemangku Kepentingan.....	144
G. Kesimpulan	146
DAFTAR PUSTAKA	147

BAB 8 FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK..... 149

A. Kebijakan Publik.....	149
B. Formulasi Dalam Tahapan Kebijakan Publik.....	154

C. Model-model Formulasi Kebijakan	155
DAFTAR PUSTAKA	166
BIODATA PENULIS	167
BAB 9 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK	169
A. Implementasi Sebagai Tahapan Kebijakan Publik.....	169
B. Pendekatan Implementasi Kebijakan.....	174
C. Model-Model Implementasi Kebijakan.....	178
DAFTAR PUSTAKA	188
BIODATA PENULIS	190
BAB 10 EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK.....	191
A. Konsep Evaluasi Kebijakan	191
B. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan Publik	194
C. Tujuan & Fungsi Kebijakan Publik	195
D. Evaluator Kebijakan Publik	195
E. Pendekatan-Pendekatan Dalam Evaluasi Kebijakan Publik ..	197
F. Kriteria Evaluasi Kebijakan	198
DAFTAR PUSTAKA	202
BIODATA PENULIS	204
BAB 11 PENDEKATAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK..	205
A. Pengertian Pendekatan.....	205
B. Pentingnya Pendekatan Analisis Kebijakan Publik.....	212
C. Pendekatan Ilmiah Analisis Kebijakan Publik.....	217
D. Tantangan Pendekatan Analisis Kebijakan di Masa Depan ..	227

DAFTAR PUSTAKA.....	229
BIODATA PENULIS	231

BAB 1

KONSEP DAN RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PUBLIK

Baharuddin, S. Sos., S. Pd. I., M. Si

Universitas Muhammadiyah Sinjai
baharuddin110985@gmail.com

A. Konsep Kebijakan Publik

Pembangunan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik pada aspek materiil maupun spiritual. Pembangunan perlu dikendalikan melalui suatu kebijakan yang memuat pedoman pelaksanaan tindakan dan bahkan memuat larangan-larangan tertentu untuk menjamin proses pembangunan dapat terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Terbitnya kebijakan publik dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak

(*stakeholders*), terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan secara sederhana adalah pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau mekanisme yang dibingkai pada suatu sistem tertentu. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. (Ibnu Afandi & Warijo, 2015)

Kebijakan publik di Indonesia adalah serangkaian keputusan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan publik. Konsep kebijakan publik di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip dasar negara, termasuk Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945

sebagai konstitusi negara, dan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Beberapa konsep penting dalam kebijakan publik di Indonesia antara lain:

1. **Demokrasi:** Indonesia adalah negara demokrasi yang mengutamakan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Pemilihan umum dilakukan secara berkala untuk memilih wakil rakyat dan kepala pemerintahan yang akan mengambil keputusan-keputusan penting bagi kepentingan publik.
2. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Kebijakan publik di Indonesia diharapkan harus transparan dan akuntabel agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan program harus dapat diakses oleh publik untuk menghindari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
3. **Partisipasi Masyarakat:** Partisipasi masyarakat sangat dihargai dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah berusaha untuk melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan publik.
4. **Pembangunan Berkelanjutan:** Kebijakan publik di Indonesia harus mencerminkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan

lingkungan. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

5. Pemerataan dan Keadilan Sosial: Kebijakan publik di Indonesia harus mendorong pemerataan dan keadilan sosial, sehingga semua warga negara dapat merasakan manfaat dari pembangunan dan kemajuan negara.
6. Otonomi Daerah: Indonesia menerapkan sistem otonomi daerah, di mana daerah-daerah memiliki kewenangan dalam mengatur urusan pemerintahan setempat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.
7. Pengutamaan Pelayanan Publik: Kebijakan publik harus mengutamakan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan berbagai sektor publik lainnya.

Kebijakan publik di Indonesia sering kali dihasilkan melalui proses pengambilan keputusan yang kompleks melibatkan berbagai pihak dan pemangku kepentingan. Selain itu, konsep-konsep tersebut di atas selalu dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk

bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek (Thoha, 2012), yakni:

1. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan *event* yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.
2. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan

umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (*stakeholders*) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu (Haerul et al., 2016). Proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai suatu sistem, yang meliputi: input, proses, dan output. Input kebijakan merupakan isu kebijakan atau agenda pemerintah, sedangkan proses kebijakan berwujud perumusan formulasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Isu dan formulasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses politik yang dilakukan elit politik dan/ atau kelompok-kelompok penekan. Output dari proses kebijakan adalah kinerja kebijakan.

Pengertian kebijakan publik oleh para pakar didefinisikan secara beragam, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang melandasi perumusannya. Thoha (2012) memberikan penafisiran tentang kebijakan publik sebagai hasil rumusan dari suatu pemerintahan. Dalam pandangan ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan daripada proses hasil yang dibuat.

Mengenai kebijakan publik, lebih lanjut Wahab (2010)

menyatakan bahwa:

1. kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/ tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan;
2. kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri;
3. kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas/ tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu;
4. kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang

mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan. Perlu ditekankan bahwa sifat kebijakan publik perlu dituangkan pada peraturan-peraturan perundangan yang bersifat memaksa. Dalam pandangan ini, dapat diasumsikan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, yang dapat diwujudkan berupa peraturan-peraturan, undang-undang dan sebagainya. Kebijakan publik mempunyai sifat mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat tanpa terkecuali. Sebelum kebijakan publik tersebut diterbitkan dan dilaksanakan, kebijakan tersebut harus ditetapkan dan disahkan oleh badan/ lembaga yang berwenang. Peraturan undang-undang sebagai produk dari kebijakan publik merupakan komoditas politik yang menyangkut kepentingan publik. Namun demikian, berbagai dinamika yang terjadi dapat membawa konsekuensi bahwa kebijakan publik pun dapat mengalami perbaikan. Oleh karenanya, kebijakan publik pada satu pandangan tertentu, dipersyaratkan bersifat fleksibel, harus bisa diperbaiki, dan disesuaikan dengan perkembangan dinamika pembangunan. Kesesuaian suatu kebijakan publik sangat tergantung kepada penilaian masyarakat. Pembahasan kebijakan publik tidak bisa lepas dari

usaha untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut. Pelaksanaan kebijakan publik merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan dan ditetapkan.

Pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan lanjutan dari proses perumusan dan penetapan kebijakan. Sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dimaknai sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan, baik oleh individu maupun kelompok pemerintah, yang diorientasikan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implikasi dari pelaksanaan kebijakan merupakan konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari dilaksanakannya kebijakan-kebijakan tersebut. Hasil evaluasi pada pelaksanaan kebijakan dapat menghasilkan dampak yang diharapkan (*intended*) atau dampak yang tidak diharapkan (*spillover negative effect*).

Secara luas, pelaksanaan kebijakan digambarkan sebagai apa yang ditetapkan secara jelas oleh pembuat kebijakan (pemerintah) yang akan memiliki dampak tertentu. Jann & Wegrich (2007) menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan akan mencakup unsur inti sebagai berikut:

1. Spesifikasi rinian program, yakni bagaimana dan di mana lembaga atau organisasi harus menjalankan program, dan bagaimana hukum atau program

- ditafsirkan;
2. Alokasi sumberdaya, yakni bagaimana anggaran didistribusikan, personil yang akan melaksanakan program dan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program.
 3. Keputusan, yakni bagaimana keputusan akan dilakukan.

Proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif/ pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan pada kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari para pihak yang terlibat (*stakeholders*). Kesalahan atau ketidaksempurnaan suatu kebijakan biasanya akan dapat dievaluasi setelah kebijakan itu dilaksanakan, begitu juga keberhasilan pelaksanaan kebijakan dapat dianalisa pada akibat yang ditimbulkan sebagai hasil pelaksanaan kebijakan. Penilaian atas kebijakan dapat mencakup isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan dampak kebijakan. Merujuk pada pernyataan-pernyataan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan tahapan aktivitas/ kegiatan/ program dalam melaksanakan

keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu/ pejabat, kelompok pemerintah, masyarakat, dan/ atau swasta dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan yang akan mempengaruhi hasil akhir suatu kebijakan (Ramdhani & Ramdhani, 2017).

Batasan kebijakan publik yang dikenal luas, yakni dikemukakan Thomas R. Dye (1981), adalah apapun yang menjadi pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan (*whatever governments choose to do or not to do*). Hal ini bermakna apapun tindakan pemerintah baik secara implisit maupun eksplisit merupakan kebijakan, interpretasi tersebut bermakna bahwa kebijakan dilaksanakan badan/ instansi pemerintah, dan kebijakan mengandung alternatif pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan. Peters, B. Guy, (2015) mengemukakan batasan makna kebijakan publik merupakan *the sum of government activities, wheter acting directly or through agents, as it has an influence on the lives of citizens*. Peterson, Steven A. (2003) mendefinisikan kebijakan publik adalah government action to address some problem. Selanjutnya Lasswell (1951) mengemukakan ruang lingkup kebijakan publik meliputi: metode penelitian proses kebijakan; hasil dari studi kebijakan; serta temuan dari hasil penelitian yang berkontribusi penting guna memenuhi kebutuhan intelegensi saat ini. Karena itulah, menurut Lasswell bahwa ilmu kebijakan harus kontekstual, multimetode,

serta problem oriented. Sebagaimana dikemukakan Michael E. Porter (1998) bahwa keunggulan kompetitif dari suatu Negara ditentukan oleh kemampuan negara tersebut dalam mewujudkan lingkungan yang mampu menumbuhkan daya saing terhadap apara aktor di dalamnya, utamanya aktor ekonomi. Di era persaingan global diperlukan lingkungan yang memungkinkan setiap aktor untuk mampu mengembangkan diri, dan lingkungan tersebut hanya dapat diciptakan oleh kebijakan publik (Subianto, 2020).

B. Aspek-Aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan dan Dimensi Kebijakan Publik

Pelaksanaan kebijakan merupakan sebuah proses yang bertahap yang dilakukan seteah kebijakan dilahirkan dan sebelum diketahui dampak yang dihasilkan. Pelakasanaan kebijakan publik dipengaruhi oleh beberapa aspek yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Aspek tersebut adalah :

1. Struktur Birokrasi/ kewenangan

Kewenanangan diartikan sebagai otoritas maupun legitimasi bagi pihak yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Kewenangan ini berhubungan dengan posisi individu maupun lembaga dalam proses pelaksanaan kebijakan (Suryono, 2014). Kewenangan ini dituangkan dalam fragmentasi organisasi maupu prosedur kerja seperti SOP.

2. Komunikasi

Komunikasi merupakan bentuk kegiatan yang dapat membuat individu untuk menginterpretasikan gagasan dan ide melalui sebuah sistem yang dapat berupa signal, simbol, lisan maupun perilaku. Komunikasi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan publik (Ruhimat, 2010; Subekti et al, 2017; Syani et al, 2018). Komunikasi dapat memberikan dampak yang baik dan buruk terhadap pelaksanaan kebijakan. Apabila sebuah informasi disampaikan secara jelas kepada masyarakat maka akan mengurangi resiko resistensi didalam masyarakat dan justru sebaliknya apabila informasi yang disampaikan tidak jelas maka memungkinkan terjadinya gejala dalam kelompok masyarakat tersebut.

3. Sumber daya

Sumber daya sangat diperlukan dalam menunjang pelaksanaan kebijakan seperti manusia, materi dan metode pelaksanaan (Kartini, 2017; Fahri, 2017). Proses pelaksanaan kebijakan harus dilakukan dengan cermat dan terarah, apabila dalam pelaksanaan kebijakan kekurangan sumber daya maka kegiatan tersebut tidak akan terlaksana secara maksimal.

4. Disposisi atau sikap dari pelaksana

Disposisi merupakan watak atau tabiat dari pelaksana kebijakan. Watak tersebut dapat berupa kejujuran, disiplin,

kecerdasan dan komitmen. Apabila pelaksanaa kebijakan memiliki disposisi yang baik maka proses pelaksanaan kebijakan akan cenderung optimal dan apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang tidak baik maka pelaksanaa kebijakan tidak akan berjalan secara optimal.

Dari penjabaran tersebut dapat diartikan bahwa terdapat 4 aspek yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan yaitu kewenangan, komunikasi, sumber daya dan disposisi yang antar komponen saling berkaitan dan mempengaruhi. Selanjutnya dalam proses pelaksanaan kebijakan terdapat dimensi kebijakan publik yang harus diketahui(Desrinelti et al., 2021).

Konsep pelaksanaan kebijakan di Indonesia berlandaskan good governance. Untuk mencapai good governance tersebut perlu diketahui dimensi pencapaian yaitu :

1. Konsistensi. Sebuah kebijakan akan terlaksana dengan baik apabila pelaksanaanya dilakukan secara konsisten yang sesuai dengan norma dan prosedur yang berlaku;
2. Transparansi. Transparansi ada jika terdapat kebebasan akses yang dapat dilakukan oleh publik atau kelompok yang memiliki kepentingan . Transparansi informasi harus bersifat terbuka, mudah diakses, mudah dimengerti, dan tersedia secara memadai;

3. Akuntabilitas. Pelaksanaan sebuah kebijakan harus dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Keadilan. Keadilan dalam pelaksanaan kebijakan publik dapat berupa tidak membedakan pelayanan terhadap golongan tertentu (tidak besikap deskriminatif);
5. Partisipatif. Partisipatif artinya bawah masyarakat berperan dalam keterlibatannya pada pelaksanaan kebijakan. Selain sebagai penopang pelaksanaan kebijakan, masyarakat juga berperan sebagai sarana untuk evaluasi dan pengontrolan terhadap wawenang pelaksana kebijakan;
6. Efektivitas. Efektivitas berhubungan dengan ketercapaian hasil kebijakan berdasarkan tindakan dan aspek rasionalitas tindakan yang berhubungan dengan layanan atau produk. Sebuah pelaksana kebijakan dikatakan efektif apabila tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
7. Efisiensi. Efisiensi berhubungan dengan kuantitas pemaksimalan sumber daya seperti pencapaian tujuan, penggunaan manusia, biaya, waktu dan peralatan lainnya. Efisiensi akan berdampak kepada efektivitas pelaksanaan kebijakan(Hardiyansyah, 2018).

Dimensi-dimensi inilah yang harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan kebijakan agar kebijakan yang ditetapkan dapat mencapai tujuan.

C. Perumusan Kebijakan Publik dan Ruang Lingkup Kebijakan Publik

Perumusan kebijakan adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu pada masa yang akan datang. Perlu diingat pula bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah perumusan yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi, sebab sering kali para pengambil kebijakan beranggapan bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah sebuah konseptual yang sarat dengan pesan-pesan ideal dan normatif, namun tidak membumi (Putra, 2001).

Dalam tataran konseptual perumusan kebijakan tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pemimpin yang mewakili anggota, tetapi juga berisi opini publik (publik opinion) dan suara publik (publik voice), seperti dijelaskan oleh Parson (1997). Hal ini disebabkan oleh proses pembuatan kebijakan pada esensinya tidak pernah bebas nilai (*value free*) sehingga berbagai kepentingan akan selalu mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Mengikuti pendapat Anderson, Bintoro Tjokroamidjojo (1976), Bapak Administrasi Pembangunan Indonesia, mengemukakan

bahwa “*Policy Fomulation* sama dengan *Policy Making*, dan ini berbeda dengan *decision making* (pengambilan keputusan)”. *Policy making* memiliki konteks pengertian yang lebih luas dari *decision making*. Sedangkan William R. Dhall (1972) mendefinisikan *decision making* sebagai pemilihan atas pelbagai macam alternatif. Sementara Nigro dan Nigro (1980) mengemukakan bahwa tidak ada perbedaan mutlak yang dapat dibuat antara pengambilan keputusan *decision making* dengan pembuatan kebijakan (*policy making*), karena itu, setiap pembuatan kebijakan adalah suatu pembuatan keputusan. Akan tetapi, pengambilan kebijakan membentuk rangkaian-rangkaian tindakan yang mengarah ke banyak macam keputusan yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah dipilih. Selanjutnya, Tjokroamidjojo (1976) menegaskan bahwa “apabila pemilihan alternatif itu sekali dilakukan dan selesai, maka kegiatan tersebut disebut pengambilan keputusan; sebaliknya bila pemilihan alternatif itu terus-menerus dilakukan dan tidak pernah selesai, maka kegiatan tersebut dinamakan perumusan kebijakan.

Dengan demikian, pengertian perumusan kebijakan menyangkut suatu proses yang terdiri dari sejumlah

langkah- langkah. Ripley (1985) menjelaskan beberapa langkah dalam kebijakan publik, yaitu:

1. *Agenda setting*
2. *Formulation dan legitimization*
3. *Program Implementations*
4. *Evaluation of implementation, performance, and impacts*
5. *Decisions about the future of the policy and program*

Dengan demikian, berdasarkan pendapat Ripley tersebut, ruang-lingkup Formulasi Kebijakan Publik lebih menekankan pada tahapan: Agenda Setting, Agenda Pemerintah, Formulasi dan legitimasi, serta pengambilan dan pengumuman kebijakan untuk mencapai sasaran seperti apa yang telah dijelaskan di atas. Beberapa pakar menjelaskan bahwa proses perumusan kebijakan publik selalu dan harus memperhatikan beberapa karakteristik penting agar dapat mencapai sasaran kebijakan yang dituangkan dalam tahapan implementasi kebijakan. Misalnya, dijelaskan oleh O"Jones (1996) bahwa ada empat varian kelompok kepentingan bila dilihat atas *interest* dan akses serta kebutuhan masyarakat pada perumusan kebijakan publik, yaitu (a) kelompok kepentingan yang terorganisasi dengan baik dengan akses yang mapan, (b) kelompok kepentingan yang terorganisasi dengan baik tanpa

akses yang mapan, (c) kelompok kepentingan yang tidak terorganisasi dengan baik tetapi memiliki akses yang mapan, dan (d) kelompok kepentingan yang tidak terorganisasi sekaligus juga tidak memiliki akses yang mapan (Muadi, 2016)

DAFTAR PUSTAKA

- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21–34.
- Hardiyansyah, H. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. [http://eprints.binadarma.ac.id/3820/%0Ahttp://eprints.binadarma.ac.id/3820/1/Kualitas Pelayanan Publik.pdf](http://eprints.binadarma.ac.id/3820/%0Ahttp://eprints.binadarma.ac.id/3820/1/Kualitas%20Pelayanan%20Publik.pdf)
- Ibnu Afandi, M., & Warijo. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif Di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat). *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 92–113.
- Jann, W., & Wegrich, K. (2007). Theories of the Policy Cycle. In F. Fischer, G. J. Miller, & M.S. Sidney, *Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods* (pp. 43- 62). New York: CRC Press Taylor & Francis Group.
- Muadi, S. S. A. M. I. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Review Politik*, 06, 195–224.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan< Implementasi dan Evaluasi. In *Brilliant an imprint of MIC Publishing* COPYRIGHT.
- Thoha, M. (2012). *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahab, S. A. (2010). *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.

BIODATA PENULIS

**Baharuddin, S. Sos., S. Pd. I., M. Si.,
CMGRCP**



Lahir di Singkawang Provinsi Kalimantan Barat pada Tanggal 11 September 1986. Ketertarikan penulis terhadap ilmu administrasi publik dan Pemerintahan dimulai pada tahun 2007 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Muhamamdiyah Sinjai program studi Ilmu Administrasi Negara dan berhasil lulus pada tahun 2011.

Pada Tahun 2014 Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Magister Administrasi Publik di Universitas Bosowa Makasar dan menyelesaikan studi S2 pada tahun 2016. Pada Tahun 2021 penulis melanjutkan studi S3 di prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Hasanuddin.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Jaringan Kebijakan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi, Riset Muhammadiyah dan juga Kemenristek DIKTI yang sekarang menjadi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Selain sebagai peneliti, penulis juga menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi diri pribadi, persyarikatan Muhammadiyah serta Bangsa dan Negara ini.

Penulis juga telah melakukan beberapa pengabdian di masyarakat sebagai kewajiban dosen diantaranya sebagai TIM Kajian Naskah Akademik, Pengurus Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi

Kepemudaan, maupun sebagai narasumber di berbagai macam kegiatan.

Selain menjadi Dosen Tetap pada Universitas Muhammadiyah Sinjai juga Pernah Memulai pekerjaan profesional sebagai seorang Nelayan di KAPAL HILDA INDAH dan HAERUL PUTRA pada Tahun 2000 s.d 2004, setelah itu Menjadi Karyawan di PT. PHINISI Com di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2004 s.d 2006, Kemudian Menjadi Staf dan Guru Honorer di MTs dan SMK Muhammadiyah Balangnipa pada tahun 2007 s.d 2011. Selanjutnya Menjabat Sebagai Sub. Bagian Keuangan, Kepala Tata Usaha, Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik sejak Tahun 2011 s.d 2020 dan Sekarang Sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Mulai Tahun 2020 s.d 2024 di Universitas Muhammadiyah Sinjai. Selain mengabdikan di Universitas Muhammadiyah Sinjai penulis juga mengabdikan diri di MTs Muhammadiyah Balangnipa dan SMK Negeri 4 Pulau sembilan sebagai Komite Madrasah dan Sekolah.

Email Penulis: baharuddin110985@gmail.com

BAB 2

CIRI-CIRI DAN TUJUAN KEBIJAKAN PUBLIK

Aprih Santoso

aprihsantoso@usm.ac.id

A. Pendahuluan

Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau aturan yang dibuat dan dijalankan oleh suatu entitas, seperti pemerintah, organisasi, perusahaan, atau lembaga, untuk mencapai tujuan tertentu atau mengatasi masalah tertentu. Menurut Anderson (2003) sebagaimana dikutip Islamy (2003) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Adapun Friedrich (1969) dalam Agustino (2006), kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-

kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud..

Kebijakan biasanya ditetapkan berdasarkan pertimbangan dan analisis mendalam terhadap situasi atau isu yang dihadapi. Kebijakan dapat mencakup berbagai bidang, seperti kebijakan pemerintah mengenai ekonomi, pendidikan, lingkungan, kesehatan, keamanan, dan banyak lagi. Di dalam organisasi atau perusahaan, kebijakan dapat berkaitan dengan tata tertib, etika, keamanan kerja, pengelolaan sumber daya manusia, dan prosedur operasional.

Kebijakan bertujuan untuk memberikan panduan dan batasan bagi tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan yang baik biasanya berdasarkan informasi yang akurat, pertimbangan rasional, dan dapat diukur dalam pencapaian hasil yang diinginkan. Penerapan kebijakan juga melibatkan proses komunikasi yang efektif kepada semua pihak terkait agar mereka memahami dan melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan perannya masing-masing. Selain itu, kebijakan juga bisa mengalami revisi atau perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan yang ada.

Publik adalah istilah yang mengacu pada masyarakat umum atau khalayak ramai. Ini mencakup semua orang yang tidak terbatas

pada kelompok atau individu tertentu, melainkan mencakup seluruh warga negara atau orang-orang yang terlibat dalam suatu wilayah atau lingkungan tertentu. Dalam konteks demokrasi, "opini publik" mengacu pada pandangan dan pendapat yang dipegang oleh mayoritas masyarakat atau kelompok tertentu. Opini publik sering menjadi penting dalam proses pengambilan keputusan politik karena pengaruhnya terhadap pemilihan umum, kebijakan pemerintah, dan berbagai isu masyarakat. Selain itu, "sumber publik" merujuk pada informasi, bahan, atau data yang tersedia untuk umum. Ini bisa termasuk bahan-bahan yang dipublikasikan oleh pemerintah, lembaga non-pemerintah, atau organisasi lainnya yang dapat diakses dan digunakan oleh siapa saja tanpa batasan tertentu. Secara umum, publik adalah istilah luas yang mencakup seluruh masyarakat atau khalayak umum dan berhubungan erat dengan keterbukaan, partisipasi, dan dialog antara individu dan kelompok dalam masyarakat.

Kebijakan publik adalah keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Menurut Bridgman dan Davis, 2005 dalam Edi Suharto (2007) menerangkan kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai 'whatever government choose to do or not to do'. Artinya, kebijakan publik adalah 'apa saja yang dipilih oleh pemerintah

untuk dilakukan atau tidak dilakukan'. Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn, 1990 Edi Suharto (2007) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna 'kebijakan' hanyalah milik atau dominan pemerintah saja. Organisasi-organisasi non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (Misalnya Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga/PKK) dan lembaga-lembaga sukarela lainnya memiliki kebijakan-kebijakan pula

Kebijakan publik berfungsi sebagai panduan atau instruksi untuk mengatur perilaku dan aktivitas warga negara, sekaligus mencerminkan prioritas dan nilai-nilai pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Kebijakan publik dapat mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, keamanan, dan lain-lain. Proses pembuatan kebijakan publik biasanya melibatkan analisis masalah, identifikasi tujuan, penentuan strategi dan opsi kebijakan, konsultasi dengan para pemangku kepentingan, pembahasan, dan akhirnya implementasi dan evaluasi keberhasilan kebijakan tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa kebijakan publik tidak selalu berhasil atau dapat memuaskan semua pihak, karena seringkali melibatkan banyak perspektif dan kepentingan yang beragam. Pengambilan keputusan dalam kebijakan publik harus

mempertimbangkan efek samping, dampak jangka panjang, dan mencoba mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan yang ada di masyarakat. Kebijakan publik mengacu pada tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, atau politik yang dihadapi oleh masyarakat. Konsep kebijakan publik melibatkan identifikasi isu-isu yang memerlukan perhatian, pengembangan solusi untuk masalah tersebut, serta implementasi dan evaluasi keberhasilan tindakan tersebut.

Ruang lingkup kebijakan publik sangat luas dan dapat mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, transportasi, keamanan, dan lain sebagainya. Contoh kebijakan publik yang umum meliputi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan pendidikan, kebijakan kesehatan, kebijakan lingkungan, kebijakan transportasi, dan kebijakan keamanan.

Kebijakan publik biasanya melibatkan berbagai tahap dalam proses kebijakan, termasuk:

1. Identifikasi masalah

Identifikasi adalah proses mengenali atau menetapkan identitas seseorang, sesuatu, atau suatu entitas dengan cara

memahami, memeriksa, atau mencocokkan ciri-ciri yang khas atau karakteristik yang dimiliki oleh entitas tersebut. Tujuan utama dari identifikasi adalah untuk membedakan dan memastikan bahwa sesuatu memiliki identitas yang unik atau karakteristik yang membedakannya dari yang lain. Identifikasi merupakan langkah awal yang penting dalam banyak aspek kehidupan, terutama dalam konteks keamanan, keuangan, forensik, dan analisis data. Selain itu, teknologi juga telah membantu meningkatkan kemampuan identifikasi dengan penggunaan berbagai metode dan teknik otomatis, seperti pengenalan wajah, sidik jari, atau pola unik lainnya dalam dunia digital. Tahap ini melibatkan pengidentifikasian masalah atau isu yang memerlukan perhatian dari pemerintah atau lembaga publik. Masalah ini bisa timbul dari berbagai sumber, seperti kebutuhan masyarakat, perubahan sosial, tekanan politik, atau perubahan ekonomi.

2. Analisis kebijakan

Analisis adalah proses pemecahan suatu masalah atau situasi kompleks menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan dapat dipahami dengan lebih baik. Dalam berbagai konteks, analisis sering digunakan untuk menganalisis data, informasi, atau situasi tertentu untuk memahami pola,

hubungan, dan tren yang mungkin tidak terlihat secara langsung.

Dalam ilmu pengetahuan dan penelitian, analisis mencakup proses mengumpulkan data, mengidentifikasi masalah atau pertanyaan penelitian, menganalisis data menggunakan metode dan alat analisis yang sesuai, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan tersebut. Analisis berperan penting dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang, termasuk bisnis, ilmu pengetahuan, pemerintahan, kesehatan, teknologi, dan lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan wawasan, memahami konteks, dan membantu orang membuat keputusan yang lebih informasi dan terinformasi.

Setelah masalah diidentifikasi, analisis kebijakan dilakukan untuk memahami penyebab masalah, dampaknya, serta solusi yang mungkin untuk mengatasi masalah tersebut. Analisis ini melibatkan pengumpulan data, penelitian, konsultasi dengan para ahli, dan pemodelan kebijakan.

3. Pengembangan kebijakan

Pengembangan adalah proses atau kegiatan untuk membuat perubahan positif, peningkatan, atau pertumbuhan dalam suatu bidang, sistem, atau proses tertentu. Istilah "pengembangan" sering digunakan dalam berbagai konteks, termasuk: Pengembangan

Sumber Daya Manusia (SDM), Pengembangan Produk, Pengembangan Perangkat Lunak, Pengembangan Infrastruktur, Pengembangan Bisnis. Pengembangan Pribadi. Tujuan pengembangan beragam tergantung pada konteksnya. Pengembangan sering kali bertujuan untuk mencapai kemajuan, inovasi, efisiensi, kualitas, atau pemecahan masalah guna mencapai hasil yang lebih baik atau lebih baik dari sebelumnya.

Tahap ini melibatkan perumusan kebijakan yang spesifik dan rinci untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi. Kebijakan ini harus mempertimbangkan tujuan yang diinginkan, efektivitas, efisiensi, serta implikasi politik, sosial, dan ekonomi.

4. Implementasi kebijakan

Implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan suatu rencana, ide, konsep, atau proyek ke dalam tindakan nyata. Dalam konteks yang lebih luas, implementasi dapat merujuk pada proses menerjemahkan ide atau strategi menjadi tindakan konkret yang dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Proses implementasi umumnya melibatkan langkah-langkah berikut:

a. Perencanaan

Tahap perencanaan adalah langkah awal dimana rencana atau konsep dipersiapkan dengan matang. Hal ini melibatkan penentuan tujuan, identifikasi sumber daya yang diperlukan, menentukan jadwal, dan menetapkan tugas dan tanggung jawab bagi para pelaksana. Perencanaan adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan tujuan, merumuskan strategi, dan menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks yang lebih luas, perencanaan merupakan sebuah proses intelektual dan sistematis untuk mengatur sumber daya, waktu, dan tenaga agar dapat mencapai hasil yang diharapkan.

Tujuan perencanaan adalah untuk menghindari keputusan yang impulsif atau berdasarkan tebakan semata. Dengan adanya perencanaan, suatu organisasi atau individu dapat mengurangi ketidakefisienan, meminimalkan risiko, dan meningkatkan kesempatan mencapai sasaran dengan lebih baik. Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bisnis, pendidikan, proyek konstruksi, keuangan, kesehatan, dan lain sebagainya. Hal ini melibatkan identifikasi masalah, pengumpulan informasi,

analisis data, pengambilan keputusan, serta implementasi dan evaluasi hasil dari rencana yang telah dibuat. Penting untuk dicatat bahwa perencanaan harus bersifat fleksibel, karena lingkungan dan situasi dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, proses perencanaan seringkali melibatkan revisi dan penyesuaian berkelanjutan guna mengatasi perubahan dan tantangan yang muncul.

b. Persiapan

Persiapan adalah langkah-langkah atau tindakan yang diambil seseorang atau kelompok untuk mempersiapkan diri menghadapi suatu situasi atau peristiwa tertentu. Persiapan dilakukan untuk meningkatkan kesempatan berhasil dalam mencapai tujuan, mengatasi tantangan, atau menghadapi situasi yang mungkin kompleks atau sulit. Dalam banyak situasi, persiapan adalah kunci kesuksesan dan membantu mengurangi stres atau kebingungan yang mungkin timbul akibat ketidaksiapan.

Persiapan mencakup pengorganisasian dan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana tersebut. Ini bisa berupa peralatan, teknologi, personel, atau fasilitas yang diperlukan.

a. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah proses mengelompokkan dan mengatur berbagai elemen, sumber daya, dan kegiatan dalam suatu sistem tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengorganisasian berperan penting dalam menciptakan kerangka kerja yang efisien dan efektif dalam mencapai sasaran organisasi. Dengan membangun struktur organisasi yang jelas dan membagi tugas secara tepat, pengorganisasian membantu meminimalkan tumpang tindih atau kebingungan antara anggota tim dan memfasilitasi kerjasama yang lebih baik.

Langkah-langkah utama dalam pengorganisasian mencakup:

1. Penentuan tujuan

Menetapkan tujuan dan visi organisasi sebagai acuan untuk seluruh proses pengorganisasian.

2. Pembagian tugas

Membagi tugas dan tanggung jawab kepada anggota tim atau unit kerja berdasarkan keahlian dan kecakapan masing-masing.

3. Penentuan struktur organisasi

Membangun struktur organisasi yang mencerminkan hierarki, hubungan, dan saluran

komunikasi antara berbagai bagian atau divisi dalam organisasi.

4. Pengalokasian sumber daya

Menyediakan sumber daya manusia, finansial, dan materiil yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan mencapai tujuan organisasi.

5. Delegasi wewenang

Memberikan kekuasaan dan tanggung jawab kepada anggota tim atau manajer tertentu agar dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan bidang tanggung jawab mereka.

6. Koordinasi

Memastikan keselarasan antara berbagai bagian organisasi untuk mencapai sinergi dan efisiensi.

Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen utama, bersama dengan perencanaan, pengarahan, dan pengendalian. Keberhasilan pengorganisasian akan berdampak pada kinerja dan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

b. Pengadaan sumber daya

Pengadaan sumber daya adalah proses mendapatkan dan mengalokasikan berbagai jenis sumber daya, seperti tenaga

kerja, peralatan, bahan baku, dan modal finansial, yang dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan bisnisnya. Proses pengadaan sumber daya melibatkan identifikasi kebutuhan, pencarian dan seleksi sumber daya yang tepat, serta pengaturan dan pengelolaan sumber daya tersebut agar dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif.

Pengadaan sumber daya yang baik dan efisien sangat penting bagi kesuksesan suatu organisasi, karena dapat mempengaruhi kinerja operasional dan keberlanjutan bisnis. Proses pengadaan yang efektif dapat membantu organisasi mendapatkan sumber daya yang tepat waktu, berkualitas, dan dengan harga yang kompetitif.

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu proses atau tindakan untuk menjalankan atau melaksanakan suatu rencana, keputusan, program, atau kegiatan tertentu. Dalam konteks yang lebih umum, pelaksanaan merujuk pada tahap di mana ide, rencana, atau konsep yang telah disusun akan dijalankan dan diwujudkan menjadi tindakan nyata. Dalam banyak konteks, pelaksanaan seringkali mencakup serangkaian langkah atau tahapan yang harus diikuti untuk mencapai

tujuan yang ditetapkan. Proses ini melibatkan pengorganisasian sumber daya, pemilihan metode atau strategi yang tepat, serta pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa tujuan yang diinginkan tercapai. Sementara dalam konteks kebijakan publik, pelaksanaan adalah langkah-langkah untuk menjalankan kebijakan atau program pemerintah.

Penting untuk mencatat bahwa pelaksanaan yang efektif memerlukan perencanaan yang matang, koordinasi yang baik, dan pemantauan yang cermat guna memastikan bahwa tujuan yang diinginkan tercapai dan sumber daya digunakan dengan efisien. Tahap Ini adalah tahap dimana rencana atau strategi dijalankan secara nyata. Para pelaksana akan bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

d. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan adalah proses atau kegiatan untuk mengawasi, memantau, atau mengontrol suatu aktivitas, proses, atau situasi guna memastikan bahwa hal tersebut berjalan sesuai dengan standar, peraturan, atau tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dapat dilakukan dalam

berbagai konteks, seperti: 1. Pengawasan dalam lingkup pemerintahan. 2. Pengawasan dalam lingkup bisnis. 3. Pengawasan dalam lingkup keamanan. 4. Pengawasan dalam lingkup pendidikan. 5. Pengawasan dalam lingkup lingkungan.

Tujuan dari pengawasan adalah untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku serta meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam pelaksanaan suatu aktivitas. Pengawasan juga merupakan alat penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, kecurangan, dan masalah lainnya yang dapat merugikan masyarakat atau organisasi terkait. Selama pelaksanaan, pengawasan terus menerus dilakukan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana dan untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul. Evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja dan hasil dari implementasi.

Evaluasi adalah proses penilaian dan pengevaluasian suatu hal atau kegiatan untuk menilai kualitas, efektivitas, atau hasil dari sesuatu. Dalam konteks yang lebih luas, evaluasi merupakan aktivitas sistematis yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana suatu tujuan telah tercapai

dan sejauh mana suatu program, proyek, produk, atau kegiatan telah berhasil mencapai hasil yang diinginkan. Evaluasi dapat dilakukan pada berbagai bidang, seperti pendidikan, bisnis, layanan publik, kesehatan, dan sebagainya. Tujuan dari evaluasi biasanya adalah untuk memahami apa yang telah berhasil dicapai dan apa yang mungkin perlu diperbaiki atau ditingkatkan di masa depan. Proses evaluasi melibatkan pengumpulan data, analisis informasi, dan pemberian umpan balik (feedback) terhadap hasil evaluasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan perbaikan berkelanjutan.

Penting untuk mencatat bahwa evaluasi harus dilakukan secara obyektif dan tidak memihak, sehingga hasilnya dapat diandalkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan yang berdampak positif.

e. Koreksi dan Perbaikan

Koreksi dan perbaikan adalah dua hal yang berbeda. Koreksi (*Correction*): adalah tindakan memperbaiki atau mengoreksi kesalahan dalam teks atau pernyataan. Ini biasanya dilakukan ketika ada kesalahan tata bahasa, ejaan, atau fakta yang salah dalam teks. Koreksi bertujuan untuk

memperbaiki kesalahan dan membuat teks menjadi lebih tepat dan akurat.

Perbaikan (*Improvement*). Perbaikan berarti meningkatkan atau membuat sesuatu menjadi lebih baik tanpa mengacu pada kesalahan yang jelas. Ini bisa mencakup memperkaya kalimat dengan sinonim yang lebih kaya, menyederhanakan konstruksi kalimat agar lebih mudah dipahami, atau menambahkan detail untuk memberikan lebih banyak informasi. Perbaikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas teks dan memastikan pesan disampaikan dengan lebih baik.

Jadi, koreksi adalah tindakan memperbaiki kesalahan yang sudah ada dalam teks, sementara perbaikan adalah tindakan membuat teks menjadi lebih baik atau lebih kuat tanpa mengacu pada kesalahan yang jelas. Jika terjadi ketidaksesuaian antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya, langkah-langkah korektif dan perbaikan akan diambil untuk memastikan bahwa tujuan akhir tercapai.

Implementasi dapat berlaku untuk berbagai konteks, seperti implementasi kebijakan pemerintah, proyek teknologi,

implementasi strategi bisnis, dan banyak lagi. Penting untuk memperhatikan setiap langkah dan melibatkan semua pihak yang terlibat secara efektif untuk mencapai kesuksesan dalam implementasi. Setelah kebijakan dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikannya. Hal ini melibatkan alokasi sumber daya, perencanaan operasional, dan koordinasi antara berbagai lembaga atau departemen terkait.

5. Evaluasi kebijakan

Evaluasi adalah proses atau kegiatan untuk menilai atau mengevaluasi sesuatu dengan tujuan mengukur kinerja, efektivitas, atau keberhasilan suatu aktivitas, program, produk, atau sistem. Evaluasi umumnya dilakukan untuk mengidentifikasi kelebihan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang terkait dengan hal yang dievaluasi. Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan obyektif agar dapat membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan kualitas, dan mencapai hasil yang diinginkan. Evaluasi dapat dilakukan dalam berbagai konteks, seperti di bidang pendidikan, bisnis, pemerintahan, riset, dan bidang lainnya. Metode evaluasi bervariasi tergantung pada tujuan dan sifat hal yang dievaluasi, dan bisa mencakup pengumpulan data,

analisis, survei, wawancara, observasi, atau berbagai teknik lainnya.

Dalam proses evaluasi, penting untuk memiliki kriteria yang jelas dan relevan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan, sehingga hasilnya dapat diandalkan dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan atau perbaikan lebih lanjut. Tahap ini melibatkan penilaian terhadap efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan. Evaluasi dapat dilakukan melalui pemantauan, pengumpulan data, analisis dampak kebijakan, dan umpan balik dari masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya. Evaluasi ini bertujuan untuk menentukan apakah kebijakan tersebut mencapai tujuan yang diharapkan dan apakah ada perbaikan atau penyesuaian yang perlu dilakukan.

Perlu diperhatikan bahwa proses kebijakan publik dapat bervariasi di setiap negara atau lembaga, dan berbagai faktor seperti politik, budaya, dan sistem pemerintahan juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan.

B. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri adalah sebuah frasa dalam bahasa Indonesia yang berarti "characteristics" atau "features" dalam bahasa Inggris. Frasa

ini sering digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat atau atribut khas dari sesuatu, seperti suatu objek, orang, atau konsep. Jadi, "ciri-ciri" adalah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan atribut atau sifat-sifat khas dari suatu hal.

Ciri-ciri kebijakan publik, adalah:

1. Obyektif

Objektif artinya adalah bersifat netral, tidak memihak, tidak terpengaruh oleh perasaan, preferensi, atau pendapat pribadi. Suatu pandangan atau pendekatan dikatakan objektif jika didasarkan pada fakta, data, dan bukti yang ada, tanpa campur tangan dari pandangan subjektif atau emosional. Dalam konteks berbagai disiplin ilmu, seperti jurnalisme, penelitian ilmiah, atau analisis, objektivitas penting untuk memastikan hasil yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Kebijakan publik harus didasarkan pada data dan analisis objektif. Keputusan yang diambil harus mengikuti prinsip-prinsip yang adil, transparan, dan tidak memihak.

2. Berorientasi pada Masalah

Berorientasi pada masalah adalah suatu pendekatan atau sikap mental di mana seseorang atau sebuah organisasi fokus untuk mengidentifikasi, memahami, dan mencari solusi

terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Pendekatan ini umumnya digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam bidang bisnis, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, dan sebagainya.

Berorientasi pada masalah melibatkan beberapa langkah penting, antara lain:

1. Pengidentifikasian masalah: Langkah pertama adalah mengenali dan mengidentifikasi masalah yang ada. Ini bisa melibatkan pengamatan, analisis data, atau mendengarkan umpan balik dari pihak yang terlibat.
2. Pemahaman akar masalah: Setelah masalah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah memahami akar penyebabnya. Ini memerlukan analisis mendalam untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan masalah muncul.
3. Pengembangan solusi: Setelah memahami masalah dengan baik, langkah selanjutnya adalah mengembangkan berbagai solusi yang mungkin untuk mengatasi masalah tersebut. Proses ini melibatkan kreativitas dan pemikiran out-of-the-box.

4. Evaluasi solusi: Solusi-solusi yang diusulkan dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu untuk memahami keefektifan, efisiensi, dan dampaknya terhadap masalah yang dihadapi.
5. Implementasi solusi: Setelah memilih solusi yang paling cocok, langkah berikutnya adalah menerapkannya dalam tindakan nyata. Ini melibatkan perencanaan dan pelaksanaan langkah-langkah yang diperlukan.
6. Evaluasi hasil: Setelah solusi diimplementasikan, penting untuk mengevaluasi hasilnya. Jika solusi tidak berhasil sepenuhnya, perlu dilakukan penyesuaian atau mencari solusi alternatif.

Berorientasi pada masalah adalah kualitas penting bagi individu atau organisasi yang ingin efektif dalam menangani tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dengan cepat, menganalisis situasi dengan baik, dan mengembangkan solusi yang tepat adalah keterampilan yang berharga untuk mencapai kesuksesan dan efisiensi dalam berbagai bidang kehidupan.

Kebijakan publik harus dirancang untuk menangani masalah yang ada dalam masyarakat. Tujuan utamanya adalah

untuk memecahkan atau mengurangi dampak negatif dari masalah tersebut.

3. Memiliki Landasan Hukum

Landasan Hukum adalah dasar atau fondasi hukum yang menjadi pijakan bagi suatu peraturan, kebijakan, tindakan, atau proses hukum lainnya. Landasan Hukum mencakup segala peraturan hukum, konstitusi, perundang-undangan, keputusan pengadilan, kebiasaan hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Dalam konteks hukum di Indonesia, landasan hukum utama adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Indonesia yang menjadi dasar tertinggi dari sistem hukum di Indonesia. 2. Peraturan Perundang-Undangan: Meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. 3. Putusan Pengadilan: Keputusan-keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), menjadi landasan hukum bagi kasus-kasus serupa di masa mendatang. 4. Kebiasaan Hukum (*Customary Law*): Adat istiadat dan kebiasaan yang diakui dan dihormati dalam masyarakat tertentu juga dapat menjadi landasan hukum di wilayah-wilayah tertentu. 5. Prinsip-prinsip Umum Hukum (*General Principles of Law*):

Prinsip-prinsip hukum yang telah diakui secara luas di dunia internasional maupun di tingkat nasional juga menjadi landasan hukum.

Landasan hukum ini berperan penting dalam menentukan keabsahan dan kekuatan hukum dari peraturan, kebijakan, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga-lembaga hukum di Indonesia.

Kebijakan publik harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Hal ini berarti kebijakan harus sesuai dengan konstitusi, peraturan, dan undang-undang yang berlaku di negara tersebut.

4. Melibatkan Partisipasi Publik

Partisipasi publik merujuk pada keterlibatan dan kontribusi warga masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kebijakan publik, program pemerintah, atau masalah-masalah sosial yang relevan. Partisipasi publik adalah elemen penting dalam sistem demokrasi dan mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses politik dan pembuatan keputusan.

Bentuk partisipasi publik dapat beragam, termasuk: 1. Pemilihan Umum: Partisipasi publik yang paling fundamental adalah melalui hak untuk memilih pemimpin dalam pemilihan umum. Dengan memberikan suara, warga negara memiliki kesempatan untuk mempengaruhi pemerintahan dan kebijakan negara. 2. Diskusi Publik: Diskusi-diskusi terbuka dan forum-forum masyarakat dapat menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan ide, pandangan, dan masukan terkait isu-isu penting. 3. Konsultasi Publik: Pemerintah dan lembaga publik dapat mengadakan konsultasi publik untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat terkait kebijakan atau program yang direncanakan. 4. Kelompok Advokasi: Masyarakat dapat membentuk kelompok advokasi atau organisasi masyarakat sipil untuk memperjuangkan isu-isu tertentu atau mencari solusi atas masalah-masalah yang dianggap penting. 5. Petisi: Melalui petisi, individu atau kelompok dapat mengumpulkan tanda tangan dan menyuarakan dukungan mereka atas suatu isu atau tuntutan tertentu. 6. Partisipasi dalam Proses Pengambilan Keputusan: Melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui forum musyawarah, kelompok kerja, atau badan penasihat. 7. Pendidikan Politik: Meningkatkan pemahaman masyarakat

tentang isu-isu politik dan proses kebijakan dapat membantu meningkatkan partisipasi publik.

Partisipasi publik membawa berbagai manfaat, termasuk mendorong akuntabilitas pemerintah, memastikan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memperkuat legitimasi keputusan publik, dan memperkuat ikatan sosial antara warga masyarakat. Dengan aktif berpartisipasi, warga negara dapat merasa memiliki tanggung jawab dan andil dalam pembentukan masa depan masyarakat mereka.

Kebijakan publik seharusnya melibatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Pendapat dan aspirasi masyarakat harus didengarkan dan dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan.

5. Konsistensi dan Kontinuitas

Dalam konteks yang berbeda, "konsistensi" dan "kontinuitas" memiliki makna yang berbeda, terutama dalam bidang yang berbeda seperti ilmu pengetahuan, matematika, bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Berikut adalah penjelasan untuk setiap istilah:

1. Konsistensi:

Konsistensi merujuk pada keadaan atau sifat tetap yang tidak berubah dari suatu hal atau sistem dalam periode waktu tertentu. Ini mencerminkan tingkat keseragaman, kestabilan, atau ketepatan dalam perilaku atau hasil yang sama dari waktu ke waktu. Dalam konteks tertentu, konsistensi dapat menjadi kualitas yang diinginkan karena menunjukkan ketepatan dan dapat diandalkan.

2. Kontinuitas:

Kontinuitas merujuk pada keadaan kesinambungan atau kelanjutan dari suatu hal tanpa gangguan atau jeda yang signifikan. Ini menunjukkan adanya kelanjutan, baik dalam rentang waktu atau dalam ruang. Dalam banyak situasi, kontinuitas sangat penting untuk menjaga aliran proses atau konsistensi yang dibutuhkan.

Jadi, dalam ringkasan, "konsistensi" mengacu pada keseragaman dan kestabilan dari waktu ke waktu, sementara "kontinuitas" merujuk pada kelanjutan dan kesinambungan tanpa gangguan. Keduanya adalah konsep yang penting dalam berbagai bidang kehidupan dan ilmu pengetahuan.

Kebijakan publik harus konsisten dan memiliki kontinuitas dalam jangka waktu tertentu. Hal ini penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dan mencapai hasil yang berkelanjutan.

C. Tujuan kebijakan Publik

Tujuan adalah suatu sasaran atau niat yang ingin dicapai atau dilakukan oleh seseorang atau kelompok dalam rangka mencapai hasil atau hasil akhir tertentu. Tujuan bisa berupa hal-hal yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu. Dalam berbagai konteks, seperti dalam kehidupan pribadi, organisasi, pendidikan, dan bisnis, penetapan tujuan penting untuk memberikan arah, motivasi, dan fokus dalam usaha mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan juga dapat menjadi acuan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan dalam mencapai apa yang telah ditentukan.

Tujuan kebijakan publik dapat bervariasi tergantung pada konteks dan masalah yang ingin diselesaikan.

Beberapa tujuan umum kebijakan publik antara lain:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah keadaan di mana anggota masyarakat secara umum merasa bahagia, aman, dan

puas dengan kehidupan mereka. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan yang mempengaruhi kualitas hidup individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Beberapa elemen penting yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat meliputi: 1. Kesehatan: Masyarakat yang sejahtera harus memiliki akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, pendidikan tentang gaya hidup sehat, dan keadaan lingkungan yang bersih dan aman. 2. Ekonomi: Kesejahteraan masyarakat juga berkaitan erat dengan stabilitas ekonomi dan kesempatan kerja yang baik bagi anggota masyarakat. Adanya lapangan kerja yang layak dan pendapatan yang cukup mempengaruhi kemampuan individu untuk mencukupi kebutuhan dasar dan meningkatkan taraf hidup mereka. 3. Pendidikan: Pendidikan yang berkualitas memberikan landasan yang kuat bagi kemajuan sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Ketersediaan akses pendidikan yang merata dan berkualitas akan membantu meningkatkan potensi manusia dan memajukan masyarakat. 4. Keamanan: Keamanan fisik dan sosial adalah hal penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang bebas dari kekerasan, konflik, dan ancaman akan lebih mampu berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. 5. Lingkungan: Kesejahteraan masyarakat juga terkait erat dengan keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan.

Memastikan lingkungan yang bersih, lestari, dan berkelanjutan adalah hal penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. 6. Keadilan sosial: Pemerataan akses dan kesempatan bagi seluruh anggota masyarakat sangat penting. Memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan akan membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat bukan hanya tentang kesuksesan individu tetapi juga tentang menciptakan lingkungan sosial yang mendukung dan inklusif, yang memungkinkan semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan dan menikmati manfaatnya. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus menjadi perhatian utama pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan seluruh anggota masyarakat itu sendiri. Salah satu tujuan utama kebijakan publik adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat dicapai melalui program-program pemerintah yang menyediakan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, dan layanan dasar lainnya.

2. Menyelesaikan Masalah Sosial

Masalah sosial adalah permasalahan atau isu-isu yang terkait dengan interaksi dan hubungan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Masalah sosial melibatkan berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan. Beberapa contoh masalah sosial yang umum dijumpai di berbagai masyarakat termasuk kemiskinan, pengangguran, ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, kejahatan, narkoba, krisis perumahan, perubahan iklim, dan diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau orientasi seksual.

Masalah sosial ini dapat memiliki dampak negatif yang luas pada masyarakat, mempengaruhi kesejahteraan dan kualitas hidup banyak orang. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang masalah sosial dan upaya untuk menemukan solusi yang efektif merupakan hal penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan. Solusi untuk masalah sosial ini dapat melibatkan perubahan kebijakan, pendidikan, kesadaran, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mencapai perubahan positif.

Kebijakan publik juga bertujuan untuk menangani masalah sosial yang ada dalam masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, diskriminasi, kejahatan, atau isu lingkungan. Kebijakan ini dapat melibatkan regulasi, program pemberdayaan, penegakan hukum, atau program rehabilitasi.

3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan secara kuantitatif dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Ini biasanya diukur sebagai persentase dari produk domestik bruto (PDB) atau total nilai pasar semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan bagaimana suatu negara atau wilayah berkembang dari waktu ke waktu. Ketika pertumbuhan ekonomi positif, ini menunjukkan bahwa output ekonomi meningkat dan negara tersebut mencapai peningkatan kemakmuran. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan dianggap sebagai tanda positif bagi suatu perekonomian, karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita, dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Namun, penting untuk diingat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu mencerminkan kualitas hidup atau distribusi kekayaan yang merata di antara masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi yang bijaksana juga harus memperhatikan distribusi pendapatan, kesenjangan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan faktor-faktor lain yang berdampak pada kesejahteraan seluruh masyarakat.

Kebijakan publik dapat dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di suatu wilayah. Ini dapat mencakup insentif bagi sektor swasta, investasi dalam infrastruktur, atau kebijakan perdagangan yang menguntungkan.

4. Meningkatkan Keamanan dan Stabilitas

Keamanan dan Stabilitas adalah dua aspek yang sangat penting dalam berbagai konteks, termasuk dalam kehidupan sehari-hari, bisnis, masyarakat, dan geopolitik. Berikut adalah penjelasan singkat tentang kedua konsep tersebut:

1. Keamanan:

Keamanan merujuk pada keadaan bebas dari risiko, bahaya, atau ancaman yang dapat mengakibatkan kerugian, cedera, atau kerusakan pada individu, kelompok, organisasi, atau negara.

Keamanan dapat mencakup berbagai bidang seperti keamanan pribadi, keamanan siber, keamanan fisik, keamanan nasional, dan sebagainya. Pentingnya keamanan adalah untuk melindungi nilai-nilai, hak asasi manusia, harta benda, infrastruktur, dan ketertiban umum dari berbagai potensi ancaman.

2. Stabilitas:

Stabilitas merujuk pada keadaan ketertiban, keseimbangan, dan konsistensi yang berkelanjutan dalam sebuah sistem atau lingkungan tertentu. Stabilitas mencakup keberlanjutan dan kohesivitas untuk mencegah atau mengatasi potensi gangguan atau perubahan yang merusak.

Baik keamanan maupun stabilitas menjadi aspek penting dalam pembangunan dan kelangsungan hidup suatu entitas, apakah itu individu, kelompok, organisasi, atau negara. Upaya untuk memastikan keamanan dan stabilitas seringkali melibatkan kerjasama dan upaya bersama dari berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta.

Kebijakan publik juga bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas dalam masyarakat. Hal ini dapat melibatkan kebijakan keamanan nasional, penegakan hukum, atau kebijakan mitigasi risiko.

5. Mewujudkan Keadilan Sosial

Keadilan sosial adalah konsep yang mengacu pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menuntut pemerataan hak, peluang, dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat. Tujuannya adalah menciptakan kesetaraan sosial di mana semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi penuh mereka dan mengalami kehidupan yang layak. Keadilan sosial melibatkan distribusi sumber daya, kesempatan, dan manfaat secara adil sehingga tidak ada kelompok yang dikesampingkan atau didiskriminasi. Prinsip keadilan sosial seringkali mencakup isu-isu seperti hak asasi manusia, hak atas pekerjaan dan gaji yang adil, akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, perumahan yang layak, perlindungan sosial, dan upaya untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial. Konsep keadilan sosial telah menjadi bagian integral dari banyak sistem politik dan ideologi sosial, seperti dalam pemikiran liberalisme sosial, sosialisme, dan beberapa aliran pemikiran lainnya. Namun, cara mencapai keadilan sosial bisa bervariasi antara negara dan masyarakat tertentu, tergantung pada nilai-nilai budaya, sistem politik, dan kebijakan yang dianut.

Kebijakan publik dapat ditujukan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Tujuan ini meliputi penghapusan kesenjangan sosial dan ekonomi, perlindungan hak asasi manusia, pemberdayaan kelompok marginal, atau mengurangi ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya.

Perlu diingat bahwa tujuan kebijakan publik dapat saling terkait dan dapat berubah seiring perubahan kebutuhan dan prioritas masyarakat.

D. Kesimpulan

Kebijakan publik adalah rencana tindakan atau langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau institusi publik untuk mencapai tujuan tertentu yang dianggap baik untuk masyarakat atau negara. Kebijakan publik dirancang untuk mengatasi masalah atau tantangan tertentu yang dihadapi oleh masyarakat atau mencapai aspirasi dan kepentingan umum.

Ciri-ciri kebijakan publik: 1. Tujuan umum. 2. Obyektif dan rasional. 3. Terbuka dan transparan. 4. Legalitas. 5. Kontinuitas. Adapun, Tujuan kebijakan publik: 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Mengatasi masalah sosial dan ekonomi. 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. 4. Mendorong pertumbuhan ekonomi. 5. Meningkatkan keamanan

dan keadilan. 6. Meningkatkan kualitas lingkungan. 7. Meningkatkan partisipasi publik. 8. Mencapai tujuan jangka panjang.

Ciri-ciri dan tujuan kebijakan publik dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi, sistem pemerintahan, dan prioritas masyarakat di berbagai negara atau wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.

Anderson, J. E, (2003). *Public Policy Making: An Introduction*. Fifth Edition, Boston: Houghton Mifflin Company

Friedrich, Carl J. (1963). *Man and His Government*. Newyork:McGraw-Hill.

Islamy, M.I. (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

BIODATA PENULIS



Aprih Santoso., Lahir di Semarang, menghabiskan masa studi SD, SMP dan SMEA di Semarang, mulai tahun 1970 s/d 1983. Melanjutkan Pendidikan di Fakultas Ekonomi (S1) dan Magister Manajemen UNSOED Purwokerto (S2). Saat ini aktif sebagai dosen Fakultas Ekonomi Universitas Semarang (USM).

Selain itu, juga aktif menulis artikel di jurnal nasional dan internasional, serta aktif sebagai reviewer jurnal bersinta maupun jurnal belum bersinta baik di jurnal Penelitian maupun di jurnal Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).

Email: aprihsantoso@usm.ac.id

Hp. 08132577397

BAB 3

PENTINGNYA KEBIJAKAN PUBLIK

Muliani S

mulisamiri77@gmail.com

A. Pendahuluan

Kebijakan publik selalu menjadi menarik untuk selalu di perbincangkan. Kebijakan publik merupakan langkah atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik. Oleh karena itu, kebijakan publik ini selalu menjadi isu utama dan melibatkan berbagai macam kalangan masyarakat.

Istilah kebijakan publik merujuk pada rangkaian instrumen implementasi yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, melibatkan juga aspek keuangan dan struktur pelaksanaan. Siklus kebijakan publik itu sendiri dapat dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Bagaimana partisipasi publik dalam setiap tahap kebijakan dapat menjadi indikator tingkat kepatuhan negara terhadap kehendak rakyat yang berdaulat atasnya (Taufiqurakhman, 2014).

Masyarakat senantiasa aktif membahas kebijakan, baik kebijakan ke dalam organisasi maupun kebijakan keluar organisasi, serta menyoroti secara berkelanjutan setiap masalah yang timbul untuk mendapatkan kebijakan yang baik dan benar (Meutia, 2017).

Dalam konteks kebijakan di dalam organisasi, seperti lembaga swasta ataupun lembaga pemerintah, warga kerap kali ikut serta dalam proses konsultasi publik, pertemuan, ataupun forum dialog buat membagikan masukan mereka terkait kebijakan yang lagi dibuat ataupun diganti. Tujuan dari keterlibatan warga masyarakat ini untuk mendapatkan aspirasi dari masyarakat dan juga membenarkan kalau kebijakan tersebut memperhitungkan kepentingan serta aspirasi bermacam pihak yang terkena dampaknya.

Di sisi lain, warga pula mengawasi kebijakan yang diambil oleh organisasi di luar lingkup mereka, seperti kebijakan pemerintah, undang-undang, ataupun keputusan lembaga publik. Mereka menganalisis, membagikan asumsi serta menyoroti tiap permasalahan yang mencuat akibat kebijakan tersebut. Dalam masa digital serta kemajuan teknologi sekarang ini, media sosial serta platform daring lainnya memainkan kedudukan yang berarti dalam membagikan informasi untuk warga buat menyuarakan pendapat mereka serta mengawasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Media sosial serta platform daring membolehkan data bisa disebarkan dengan cepat serta menjangkau khalayak yang sangat luas. Berita, data, serta opini bisa dengan gampang diakses oleh banyak orang di segala penjuru dunia cuma dengan satu kali klik. Media sosial juga membagikan kepada masyarakat akses yang lebih gampang buat berpartisipasi dalam dialog publik serta berkontribusi pada isu-isu yang berarti. Aktivisme sosial serta kampanye berbasis online jadi lebih gampang diorganisir serta menjangkau lebih banyak orang. Selain itu, Media sosial mendorong transparansi dari pemerintah dan institusi publik. Warga dapat

melacak informasi tentang kebijakan, pengeluaran publik, dan tindakan pemerintah lainnya dengan lebih mudah, sehingga meningkatkan akuntabilitas.

Kebijakan publik harus diakses dan dipahami dengan mudah oleh warga. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi tentang kebijakan yang diusulkan atau telah diberlakukan kepada masyarakat. Dengan adanya transparansi, warga dapat melacak kebijakan yang tengah berlangsung dan potensial dampaknya pada kehidupan mereka. Ketika warga memiliki akses dan pemahaman yang baik tentang kebijakan publik, mereka dapat berpartisipasi dalam konsultasi publik, pertemuan warga, atau menyampaikan tanggapan dan saran terhadap kebijakan yang diusulkan. Partisipasi ini memungkinkan pemerintah untuk mendengarkan pandangan beragam dan membuat kebijakan yang lebih representatif dan relevan.

B. Pentingnya Kebijakan Publik

Pembangunan adalah sebuah aktivitas yang dilakukan secara serempak, terus-menerus, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh berbagai entitas seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama baik dari segi fisik maupun non-fisik (Desrinelti et al., 2021).

Pembangunan tidak hanya terfokus pada aspek fisik, seperti pembangunan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek non-fisik, seperti pembangunan sosial, kesehatan, pendidikan, lingkungan, budaya, dan lain-lain. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi

semata, tetapi juga harus memperhatikan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengoordinasikan dan mendorong pembangunan nasional serta menetapkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pencapaian kesejahteraan bersama. Kebijakan-kebijakan publik ini adalah bagian dari administrasi publik yang di buat dalam rangka menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Kebijakan publik mencakup bermacam aspek kehidupan warga dalam kehidupan masyarakat misalnya tentang pendidikan, kesehatan, area transportasi, ekonomi, serta yang lainnya.

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dalam pemerintahan, baik bersifat formal maupun informal. Sementara Dye (1982) berpendapat bahwa *policy is whatever governments choose to do or not to do*. Artinya bahwa apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah adalah adalah kebijakan publik. Melakukan dengan membuat keputusan atau tidak melakukan dengan tidak membuat keputusan adalah menjadi kebijakan publik (Hayat, 2018).

Sesuai dengan tradisi ilmu politik, munculnya analisis kebijakan merupakan respon terhadap dua paradigma dominan, yaitu institusionalisme dan behaviorisme, yang konon berkontribusi pada pertumbuhan ilmu politik sebelum tahun 1970-an. Kedua pendekatan arus utama tersebut telah dikritik karena kegagalan mereka untuk mengatasi fenomena politik secara memadai dan ketidakmampuan mereka untuk memberikan kontribusi nyata dalam pembuatan kebijakan (Subianto, 2020).

Pelanggaran transparansi sektor publik secara konsisten menggagalkan perubahan sosial "kesejahteraan rakyat", mungkin perubahan sosial dengan sendirinya merupakan konstruksi. Selain memiliki efek campuran, perubahan sosial dalam proyek pembangunan tidak selalu positif. Oleh karena itu, merupakan fakta yang secara konsisten memunculkan pertimbangan dan diskusi tentang pentingnya opini publik dalam mengarahkan inisiatif terkait konstruksi.

Sebagai misal beberapa negara berkembang termasuk Indonesia, pengangguran, kemiskinan, kesenjangan sosial, kelangkaan pelayanan sosial merupakan masalah sosial utama sejak dulu sampai sekarang. Bahkan terjadi kecenderungan penurunan standar kehidupan karena berbagai perubahan sosial sejalan dengan proses transisi dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Sementara masalah-masalah sosial konvensional seperti kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan masih belum teratasi. Masalah-masalah sosial kontemporer, seperti perdagangan manusia, pengangguran, perilaku menyimpang, kenakalan remaja, dan eksploitasi terhadap anak kian muncul mewarnai fenomena kehidupan masyarakat modern. Oleh karena itu dalam konteks pembangunan nasional, kebijakan publik merupakan suatu perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat mengarahkan dan menerjemahkan tujuan-tujuan pembangunan (Suryono, 2018). Kebijakan publik membantu dalam perencanaan pembangunan nasional dengan menetapkan prioritas, sasaran, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dengan adanya kebijakan publik yang jelas, pemerintah dapat memberikan arah yang konsisten bagi pembangunan nasional. Selain itu, Kebijakan publik juga berfungsi sebagai alat untuk

mengatur dan mengendalikan berbagai aspek pembangunan, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Regulasi ini penting untuk menghindari ketimpangan, mencegah penyalahgunaan, dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan

Kebijakan publik adalah serangkaian langkah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan ini ditujukan untuk kepentingan umum dan bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Kebijakan publik dikatakan sangat penting sebab suatu kebijakan yang di atas kertas sudah terbuat lewat proses yang baik serta isinya pula bermutu tetapi tidak otomatis dapat dilaksanakan setelah itu menciptakan suatu kecocokan yang selaras dengan apa yang diinginkan oleh pembuatnya. Penting juga karena suatu kebijakan dapat - serta kerap kali terjalin - diperlakukan seakan lebih berarti ataupun sejajar dengan tujuan yang hendak dicapai. (Rusli, 2013). Kebijakan publik mempunyai kedudukan berarti dalam memastikan arah serta cara-cara menggapai tujuan publik. Dengan terdapatnya kebijakan publik yang efisien pemerintah serta lembaga publik bisa mengendalikan serta mengelola sumber energi dan pengaruhi sikap warga buat menggapai hasil yang di idamkan. Dengan kebijakan publik yang efektif serta upaya yang pas dalam mengelola serta mengatur sumber tenaga dan pengaruhi perilaku masyarakat pemerintah serta lembaga publik bisa menggapai hasil yang di idamkan dalam melindungi keberlanjutan area serta mempromosikan tenaga yang lebih bersih serta berkepanjangan.

Pentingnya kebijakan publik untuk menjaga kedaulatan negara upaya tidak diintervensi dan adanya konflik kepentingan oleh negara lain, itu salah satunya mengapa kebijakan publik ini diperlukan dan tugas pemerintah yang tidak pernah tergantikan. Melalui Anderson dan Dye (1987) bahwa adanya tiga (3) bagian klasifikasi yakni pertama alasan ilmiah (scientific reasons) bahwa kebijakan publik untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam mengenai hakikat silsilah, rangkaian, dan dampak untuk masyarakat (Raviansyah dkk, 2022).

Ada beberapa alasan mengapa kebijakan publik ini di perlukan dan merupakan tugas pemerintah yang tidak bisa di gantikan oleh siapapun diantaranya:

1. Kedaulatan serta Keamanan Negeri. Dengan kebijakan publiklah yang menetapkan langkah-langkah buat melindungi kedaulatan negeri dan merupakan esensial dalam melindungi integritas serta otonomi sesuatu negeri. Ini terkait dengan langkah-langkah buat melindungi daerah, sumber energi alam, serta hak-hak warganya dari ancaman internal serta eksternal.
2. Menghindari Intervensi Asing: Kebijakan publik yang berfokus pada kedaulatan negeri pula mencakup langkah-langkah buat menghindari campur tangan serta intervensi oleh negara-negara asing dalam urusan dalam negara. Intervensi semacam itu bisa mengganggu stabilitas politik, ekonomi, serta sosial sesuatu negeri.
3. Membangun Kemandirian Ekonomi: Kebijakan publik yang diperuntukan buat melindungi kedaulatan negara pula bisa mempromosikan kemandirian ekonomi. Ini termasuk

melindungi industri dalam negara dari persaingan yang tidak adil serta mendorong pembangunan ekonomi yang berkepanjangan.

4. Membangun Kesejahteraan Sosial: Kebijakan publik yang melindungi kedaulatan negeri serta menjauhi konflik kepentingan dari negeri lain pula bisa berakibat positif pada kesejahteraan sosial. Dengan melindungi stabilitas serta keamanan, pemerintah bisa fokus pada pembangunan sosial, pembelajaran, kesehatan, serta kesejahteraan warga.

Dalam konteks ini, pemerintah mempunyai kedudukan krusial dalam mengumpulkan, menganalisis, serta menguasai informasi yang relevan buat meningkatkan kebijakan yang efisien. Dengan uraian yang mendalam tentang permasalahan serta konsekuensi kebijakan, pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang pas buat mempromosikan kepentingan terbaik bagi negara serta warganya.

kebijakan publik yang berdasarkan pada alasan ilmiah tidak hanya berfokus pada aspek keamanan dan pertahanan, tetapi juga termasuk kebijakan di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan sosial. Semua aspek kebijakan ini harus saling terkait dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan negara dan masyarakatnya.

Analisis sebuah kebijakan itu sangat penting dan diperlukan dalam rangka merumuskan kebijakan yang mumpuni (Udik Budi Wibowo, 2013). Kebijakan yang baik harus didasarkan pada data, informasi, dan pemahaman yang mendalam tentang isu atau masalah yang ingin di atasi. Terbitnya kebijakan publik dilandasi kebutuhan buat penyelesaian permasalahan yang terjalin di masyarakat. Kebijakan publik diresmikan oleh para pihak

(stakeholders), paling utama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan serta kepentingan warga. Arti dari penerapan kebijakan publik ialah sesuatu ikatan yang membolehkan pencapaian tujuan-tujuan ataupun sasaran selaku hasil akhir dari aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah (Jumria Mansur, 2021). Hasil akhir dari kegiatan pelaksanaan kebijakan publik haruslah mencerminkan pencapaian tujuan ataupun sasaran yang di idamkan oleh pemerintah. Dengan kata lain, kebijakan publik yang baik hendak menggapai hasil yang positif ataupun menguntungkan untuk warga serta cocok dengan arah yang di idamkan oleh pemerintah. Pelaksanaan kebijakan publik tidak senantiasa berjalan dengan lancar serta dapat mengalami bermacam tantangan, tercantum perbandingan komentar konflik kepentingan, dan kendala-kendala instan yang lain. Oleh sebab itu, formulasi serta penerapan kebijakan publik haruslah didasarkan pada analisis yang teliti partisipasi warga dan penilaian serta pengawasan yang terus-menerus buat menggapai hasil yang diharapkan.

C. Penutup

kebijakan publik merupakan landasan untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, adil, dan berkelanjutan. Pentingnya kebijakan publik terletak pada peranannya dalam menyelesaikan masalah masyarakat, menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, mengatur perilaku, mencapai tujuan pembangunan, mewakili kepentingan publik, dan mengelola sumber daya secara bijaksana.

Kebijakan publik merupakan panduan atau instruksi yang diberikan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu seperti kemiskinan, ketidaksetaraan,

gangguan lingkungan, dan krisis kesehatan. Dengan merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat mencari solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Demikian halnya Dengan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan, pemerintah dapat memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih baik, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih relevan dan dapat mengatasi permasalahan yang sebenarnya dihadapi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Hayat. (2018). Manajemen Kebijakan Publik. *Intrans Publishing, September* 2018, 121. https://www.researchgate.net/publication/335788910_Buku_Kebijakan_Publik
- Jumria Mansur. (2021). IMPLEMENTASI KONSEP PELAKSANAAN KEBIJAKAN DALAM PUBLIK. *AT-TAWASSUTH:Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 324–334. <http://journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/2235>
- Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik. In *Analisis Kebijakan Publik* (Issue April).
- Raviansyah dkk. (2022). Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Rusli, B. (2013). Kebijakan Publik: Membangun Pelayanan Publik yang Responsif. In *Kebijakan Publik*.
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan< Implementasi dan Evaluasi. In *Brilliant an imprint of MIC Publishing COPYRIGHT*.
- Suryono, A. (2018). KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 98–102. <https://doi.org/10.31334/trans.v6i2.33>

Taufiqurakhman. (2014). Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik (Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan)*, 1993, 15.

Udik Budi Wibowo. (2013). INTENSITAS PERAN AKTOR KEBIJAKAN DAN KEKUATAN POLITIS DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN SERTIFIKASI PENDIDIK Udik. *Jurnal Penelitian Ilmiah Pendidikan*, 06(21), 11–20.

BIODATA PENULIS



Muliani S. Lahir di Bulukumba 01 Juni 1976 pengampuh matakuliah analisis kebijakan Publik dan implementasi kebijakan publik pada program Magister Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Yang bersangkutan menamatkan S-1 pada jurusan politik pemerintahan FISIPOL Universitas Hasanuddin pada tahun 1999, kemudian mendapatkan gelar Magister dibidang administrasi pembangunan di Universitas Hasanuddin pada tahun 2004. Gelar Doktor dalam bidang Administrasi Publik di raih pada tahun 2015 di Universitas Hasanuddin. Pada program S-1 ia mengampu mata kuliah pengantar Ilmu Pemerintahan, Pemerintahan Nasional dan teori Perbandingan Pemerintahan serta Ekologi Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Sejumlah penelitian yang pernah penulis publish ke jurnal nasional maupun internasional, antara lain: Role of supply chain in cocoa blue print model performance in national development program (Int. J Sup. Chain. Mgt Vol. 8, No. 6, December 2019), Millennial Generation And Digitization: Implementation Of Higher Education Functions (International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 9, Issue 04, April 2020), Implementation of health insurance policy for poor community services in enrekang regency, South Sulawesi, (jurnal international of advanced science tahun 2020), Digitalization Era: Website Based E-Government (Article in IOP Conference Series Earth and Environmental Science · March 2021). School Drug Education and Leadership Agility: Narcotics Crime Study in Children *Asian Journal of niversity Education (AJUE) Volume 17, Number 4, October 2021*

Email: mulisamiri77@gmail.com

BAB 4

PENDEKATAN KEBIJAKAN PUBLIK

Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si

putrohade@gmail.com

A. Pendekatan Rasional

Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa pengambilan keputusan dalam kebijakan publik harus didasarkan pada analisis rasional yang melibatkan identifikasi tujuan yang jelas, pemetaan alternatif kebijakan, evaluasi manfaat dan biaya, serta analisis risiko. Pendekatan ini menekankan pada efisiensi dan pemilihan kebijakan yang optimal berdasarkan pertimbangan rasional.

Pendekatan ini mengacu pada proses pengambilan keputusan yang terarah dan berdasarkan analisis obyektif. Beberapa elemen kunci dalam pendekatan rasional meliputi: (Afriansyah et al., 2022); (Umiyati et al., 2023); (Hendrayady et al., 2023); (Alaslan et al., 2023); (Guampe, Kundhani, et al., 2023); (Zahari et al., 2023); (Hasan et al., 2023); (Guampe, Rosidah, et al., 2023)

- 1) Identifikasi Tujuan yang Jelas: Pendekatan rasional menekankan pentingnya mengidentifikasi tujuan yang spesifik dan jelas dalam merancang kebijakan publik. Tujuan ini harus didefinisikan dengan baik agar dapat diukur dan dievaluasi.
- 2) Pemetaan Alternatif Kebijakan: Setelah tujuan diidentifikasi, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi dan memetakan alternatif kebijakan yang memungkinkan untuk mencapai

tujuan tersebut. Alternatif kebijakan ini harus dipertimbangkan secara komprehensif, dan berbagai opsi harus dieksplorasi.

- 3) Evaluasi Manfaat dan Biaya: Pendekatan rasional mendorong evaluasi manfaat dan biaya dari setiap alternatif kebijakan yang dipertimbangkan. Analisis manfaat dan biaya ini dapat melibatkan pengukuran langsung maupun penilaian kualitatif. Tujuannya adalah untuk memahami konsekuensi positif dan negatif dari masing-masing kebijakan yang dipertimbangkan.
- 4) Analisis Risiko: Pendekatan rasional juga memperhitungkan analisis risiko dalam pengambilan keputusan kebijakan. Analisis risiko mencakup identifikasi, penilaian, dan pengelolaan risiko yang terkait dengan implementasi kebijakan. Dengan mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi, pengambil keputusan dapat merencanakan strategi mitigasi dan pengendalian yang tepat.
- 5) Efisiensi dan Pemilihan Optimal: Pendekatan rasional menekankan pada pencapaian efisiensi dalam kebijakan publik. Dalam konteks ini, kebijakan yang dianggap optimal dipilih berdasarkan pertimbangan rasional, yaitu kebijakan yang memberikan manfaat maksimal dengan biaya yang dikeluarkan seefisien mungkin.

Pendekatan rasional berusaha untuk meminimalkan bias dan pengaruh emosional dalam pengambilan keputusan kebijakan. Namun, dalam praktiknya, pendekatan ini seringkali dihadapkan pada keterbatasan data, kompleksitas kebijakan, dan konteks politik yang kompleks. Oleh karena itu, kebijakan publik sering kali melibatkan pertimbangan lebih dari sekadar analisis rasional semata.

B. Pendekatan Incremental

Pendekatan ini melibatkan proses pengambilan keputusan yang berjalan secara bertahap dan inkremental, di mana kebijakan baru dibangun berdasarkan kebijakan yang sudah ada. Pendekatan ini mengakui keterbatasan informasi dan keterbatasan waktu dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan dievaluasi dan disesuaikan secara bertahap seiring waktu.

Penjelasan lebih rinci tentang pendekatan incremental, sebagai berikut: (Fajrillah et al., 2022); (Umiyati et al., 2023); (Hendrayady et al., 2023); (Alaslan et al., 2023); (Guampe, Kundhani, et al., 2023); (Mustanir, Salampessy, et al., 2023); (Amane, Bagenda, et al., 2023)

- 1) **Proses Bertahap:** Dalam pendekatan inkremental, kebijakan publik dikembangkan dan diimplementasikan dalam tahap-tahap atau langkah-langkah bertahap. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan yang terjadi seiring waktu. Setiap tahap atau langkah memperhitungkan hasil dan pelajaran dari langkah sebelumnya.
- 2) **Dasar pada Kebijakan yang Ada:** Pendekatan inkremental mengakui pentingnya membangun kebijakan baru berdasarkan kebijakan yang sudah ada. Kebijakan yang ada menjadi titik awal atau pijakan untuk pengembangan kebijakan baru. Pendekatan ini mempertimbangkan bahwa perubahan kebijakan secara drastis atau revolusioner mungkin kurang efektif atau sulit dilakukan.
- 3) **Evaluasi dan Penyesuaian:** Pendekatan ini menekankan pentingnya evaluasi kebijakan yang ada dan penyesuaian

berkelanjutan. Kebijakan yang ada dievaluasi secara teratur untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar untuk penyesuaian atau perubahan kebijakan yang diperlukan.

- 4) Keterbatasan Informasi dan Waktu: Pendekatan inkremental mengakui bahwa informasi yang tersedia mungkin terbatas dan tidak lengkap. Karena itu, pengambilan keputusan didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang tersedia pada saat itu. Keterbatasan waktu juga menjadi faktor penting, sehingga pengambilan keputusan terkadang dilakukan dalam situasi yang memerlukan tindakan cepat dan adaptasi.
- 5) Responsif terhadap Perubahan: Pendekatan inkremental memungkinkan respons yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Dengan penyesuaian yang berkelanjutan, kebijakan publik dapat lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan.

Pendekatan inkremental mengakui bahwa pengambilan keputusan kebijakan adalah proses yang kompleks, dengan banyak variabel yang saling terkait. Dalam beberapa kasus, pendekatan ini mungkin kurang efektif untuk mengatasi perubahan yang mendesak atau masalah yang membutuhkan solusi cepat. Oleh karena itu, kombinasi pendekatan lain seperti rasional, partisipatif, atau eksperimental juga dapat digunakan bersama-sama dengan pendekatan inkremental untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan publik yang lebih holistik.

C. Pendekatan Advocacy

Pendekatan ini menekankan peran kelompok advokasi atau kelompok kepentingan dalam proses kebijakan publik. Pendekatan ini berfokus pada upaya kelompok-kelompok ini untuk mempengaruhi agenda kebijakan, membentuk preferensi kebijakan, dan memobilisasi dukungan untuk kebijakan tertentu.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang pendekatan advokasi: (Ritonga et al., 2023); (Umiyati et al., 2023); (Hendrayady et al., 2023); (Alaslan et al., 2023); (Guampe, Kundhani, et al., 2023); (Amane, Hutajulu, et al., 2023); (Mustanir, Sutiyan, et al., 2023); (Mustanir, Yuyun Alfasiyus Tobondo, et al., 2023)

- 1) Peran Kelompok Advokasi: Pendekatan advokasi mengakui peran kelompok advokasi dalam mengadvokasi kepentingan dan pandangan mereka terkait dengan kebijakan publik. Kelompok advokasi dapat terdiri dari organisasi masyarakat sipil, kelompok kepentingan, kelompok penekan, atau LSM yang bertujuan untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan spesifik.
- 2) Mempengaruhi Agenda Kebijakan: Salah satu fokus utama pendekatan advokasi adalah mempengaruhi agenda kebijakan. Kelompok advokasi berusaha untuk mendapatkan perhatian dan penempatan isu yang ingin mereka prioritaskan dalam agenda kebijakan publik. Ini melibatkan upaya lobi, kampanye, atau penggunaan media untuk memperjuangkan kepentingan mereka dan menarik perhatian pembuat kebijakan.
- 3) Membentuk Preferensi Kebijakan: Pendekatan advokasi juga berupaya membentuk preferensi kebijakan yang mendukung

kepentingan kelompok advokasi tersebut. Ini melibatkan penyusunan argumen dan bukti yang mendukung kebijakan yang diinginkan, serta mengadvokasi kebijakan tersebut kepada pembuat kebijakan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

- 4) **Memobilisasi Dukungan:** Selain mempengaruhi agenda dan membentuk preferensi kebijakan, kelompok advokasi juga berupaya memobilisasi dukungan untuk kebijakan yang mereka perjuangkan. Ini dapat melibatkan kampanye sosial, pengorganisasian acara, pemberdayaan masyarakat, atau penggalangan dukungan melalui media sosial. Tujuannya adalah untuk menciptakan momentum dan meningkatkan dukungan publik untuk kebijakan yang mereka ajukan.

Pendekatan advokasi mencerminkan kepentingan pluralitas dalam masyarakat dan memperluas ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan kebijakan. Hal ini juga memungkinkan berbagai suara dan perspektif untuk diakomodasi dalam proses kebijakan publik. Penting untuk dicatat bahwa pendekatan advokasi juga harus mempertimbangkan keseimbangan kepentingan yang berbeda dan melibatkan dialog dan negosiasi antara kelompok advokasi, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai kebijakan yang seimbang dan berkelanjutan.

D. Pendekatan Partisipatif

Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Melalui pendekatan ini, masyarakat diundang untuk memberikan masukan, memberikan pemikiran, dan terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih responsif dan lebih berkualitas.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang pendekatan partisipatif: (Agus Hendrayady et al., 2022); (Umiyati et al., 2023); (Hendrayady et al., 2023); (Alaslan et al., 2023); (Guampe, Kundhani, et al., 2023); (Fardiansyah et al., 2023)

- 1) Keterlibatan Masyarakat: Pendekatan partisipatif melibatkan keterlibatan langsung dan aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik. Masyarakat diundang untuk memberikan masukan, memberikan pemikiran, dan berpartisipasi dalam dialog dan diskusi terkait kebijakan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kepentingan dan perspektif masyarakat diakomodasi dalam kebijakan yang dihasilkan.
- 2) Informasi dan Pendidikan: Pendekatan partisipatif juga melibatkan penyediaan informasi yang memadai kepada masyarakat mengenai kebijakan yang akan dibahas. Masyarakat perlu memahami isu-isu yang terkait, konsekuensi kebijakan yang mungkin terjadi, serta pilihan kebijakan yang ada. Pendidikan dan pemahaman yang baik membantu masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.
- 3) Pemikiran Bersama dan Konsensus: Dalam pendekatan partisipatif, upaya dilakukan untuk mencapai pemikiran bersama dan mencari konsensus antara masyarakat, pemangku kepentingan, dan pembuat kebijakan. Ini melibatkan proses dialog yang terbuka, transparansi, dan saling mendengarkan di antara semua pihak yang terlibat. Konsensus yang dicapai dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan mendapatkan dukungan yang lebih luas.

- 4) **Mekanisme Partisipatif:** Pendekatan partisipatif melibatkan penggunaan mekanisme partisipatif, seperti pertemuan publik, kelompok diskusi, forum konsultasi, atau pemilihan umum. Mekanisme ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Pemerintah dan lembaga terkait bertanggung jawab untuk memastikan aksesibilitas, representativitas, dan keadilan dalam mekanisme partisipatif ini.
- 5) **Responsif dan Berkualitas:** Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pendekatan partisipatif bertujuan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan kualitas kebijakan dengan memperkaya perspektif, pengalaman, dan pengetahuan yang berbeda yang ada dalam masyarakat.

Pendekatan partisipatif meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan kebijakan. Hal ini memperkuat legitimasi kebijakan dan membangun hubungan yang lebih kuat antara pemerintah dan masyarakat. Penting untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya formalitas, tetapi juga memperhatikan kebutuhan, representasi, dan keadilan dalam proses partisipatif.

E. Pendekatan Eksperimental

Pendekatan ini melibatkan penggunaan desain eksperimen dalam merancang dan menguji kebijakan publik. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi dampak kebijakan dengan mengadakan eksperimen terkontrol dan membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol. Pendekatan ini memungkinkan pembuat

kebijakan untuk menguji kebijakan secara lebih sistematis dan berdasarkan bukti empiris.

Pendekatan ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk mendapatkan bukti empiris tentang dampak kebijakan sebelum mengimplementasikannya secara luas. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang pendekatan eksperimental: (Amane, Febriana, et al., 2023); (Umiyati et al., 2023); (Hendrayady et al., 2023); (Alaslan et al., 2023); (Guampe, Kundhani, et al., 2023); (Afdhal et al., 2023)

- 1) **Desain Eksperimen:** Pendekatan eksperimental melibatkan merancang eksperimen terkontrol yang menguji efek kebijakan publik secara sistematis. Desain eksperimen mencakup pembentukan kelompok perlakuan (yang menerima kebijakan yang akan diuji) dan kelompok kontrol (yang tidak menerima kebijakan tersebut). Hal ini memungkinkan perbandingan langsung antara kelompok tersebut untuk mengevaluasi dampak kebijakan.
- 2) **Evaluasi Dampak Kebijakan:** Dalam pendekatan eksperimental, evaluasi dampak kebijakan dilakukan dengan membandingkan hasil antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Dengan memperhatikan perbedaan antara kedua kelompok tersebut, dapat dilihat apakah kebijakan publik memiliki efek yang diharapkan atau tidak. Evaluasi ini didasarkan pada pengumpulan dan analisis data empiris.
- 3) **Pengujian Hipotesis:** Pendekatan eksperimental memungkinkan pembuat kebijakan untuk menguji hipotesis mereka tentang dampak kebijakan secara lebih sistematis. Dengan menggunakan kelompok kontrol, pembuat kebijakan

dapat membandingkan hasil dari kelompok yang menerima kebijakan dengan kelompok yang tidak menerimanya. Hasil dari eksperimen tersebut dapat digunakan untuk memperkuat atau mengoreksi hipotesis kebijakan yang telah diajukan.

- 4) Berbasis Bukti: Pendekatan eksperimental dalam kebijakan publik menekankan pentingnya pengambilan keputusan berdasarkan bukti empiris yang diperoleh melalui desain eksperimen. Hal ini membantu memastikan bahwa kebijakan publik didasarkan pada informasi yang objektif dan dapat diandalkan, serta mengurangi keputusan yang berdasarkan pada prasangka atau asumsi tanpa dasar.
- 5) Pengembangan Kebijakan yang Lebih Efektif: Dengan menggunakan pendekatan eksperimental, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi kebijakan yang lebih efektif dan berdampak positif. Dengan melakukan eksperimen dan evaluasi dampak secara sistematis, kebijakan publik dapat diperbaiki dan disesuaikan berdasarkan bukti empiris yang diperoleh.

Pendekatan eksperimental meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan kebijakan. Dengan memanfaatkan metode ilmiah dan bukti empiris, pendekatan ini membantu memastikan bahwa kebijakan publik didasarkan pada evaluasi yang objektif dan berdasarkan data. Namun, penting untuk mempertimbangkan keterbatasan dan kompleksitas dalam merancang dan melaksanakan eksperimen kebijakan, serta memperhatikan etika dan implikasi sosial yang terkait.

F. Pendekatan Kompleksitas

Pendekatan ini mengakui bahwa kebijakan publik sering kali melibatkan sistem yang kompleks, dengan interaksi yang rumit

antara berbagai variabel dan pemangku kepentingan. Pendekatan ini menekankan pemahaman konteks sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks serta pengakuan terhadap ketidakpastian dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Penjelasan lebih lanjut tentang pendekatan kompleks, sebagai berikut: (Holle et al., 2023); (Umiyati et al., 2023); (Hendrayady et al., 2023); (Alaslan et al., 2023); (Guampe, Kundhani, et al., 2023); (Bormasa et al., 2023); (Amane, Haq, et al., 2023)

- 1) Sistem yang Kompleks: Pendekatan kompleks dalam kebijakan publik mengakui bahwa kebijakan publik beroperasi dalam sistem yang kompleks. Sistem ini terdiri dari interaksi yang rumit antara berbagai variabel, faktor, dan pemangku kepentingan yang saling terkait. Dalam pendekatan ini, kebijakan publik dilihat sebagai bagian dari sistem yang lebih besar dan dipahami dalam konteks hubungan dan dinamika antara elemen-elemen tersebut.
- 2) Pemahaman Konteks yang Kompleks: Pendekatan kompleks menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial, politik, dan ekonomi yang kompleks di mana kebijakan publik diterapkan. Pemahaman ini mencakup faktor-faktor seperti struktur sosial, budaya, nilai-nilai, kepentingan politik, dan dinamika ekonomi yang memengaruhi kebijakan. Konteks ini harus dipertimbangkan dalam merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi kebijakan publik.
- 3) Ketidakpastian dan Ketidakpastian: Pendekatan kompleks mengakui adanya ketidakpastian dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan kebijakan. Kebijakan publik

seringkali menghadapi kondisi di mana informasi lengkap tidak tersedia, hasil yang diharapkan tidak dapat diprediksi dengan pasti, dan hasil kebijakan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang sulit dikendalikan. Dalam pendekatan ini, pengambilan keputusan kebijakan harus dapat menangani ketidakpastian dan ketidakpastian ini dengan melakukan pemodelan, analisis sensitivitas, atau pengelolaan risiko yang tepat.

- 4) Pendekatan Adaptif: Dalam sistem yang kompleks dan penuh ketidakpastian, pendekatan kompleks menekankan pentingnya adaptasi dan pembelajaran berkelanjutan. Kebijakan publik harus mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi, mengatasi ketidakpastian, dan memperbaiki diri sendiri berdasarkan pembelajaran dari implementasi dan evaluasi kebijakan sebelumnya.
- 5) Kolaborasi dan Partisipasi: Pendekatan kompleks juga mendorong kolaborasi dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Dalam menghadapi kompleksitas dan ketidakpastian, melibatkan berbagai perspektif dan pengetahuan dapat membantu menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan relevan.

Pendekatan kompleks dalam kebijakan publik mengakui realitas kompleksitas dan ketidakpastian yang terlibat dalam proses kebijakan. Hal ini memerlukan pendekatan yang holistik, fleksibel, dan adaptif dalam merancang dan melaksanakan kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, Luturmas, Y., Toni, Mujib, F., Mustanir, A., & Amane, A. P. O. (2023). *Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Desa & Lembaga Kemasyarakatan Ddesa* (N. Sulung (ed.); Pertama). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Afriansyah, Elfis Mus Abdul, Lola Malihah, Rasid, A. U., Sholahuddin, M., Agustina, A., Karundeng, D. R., Amane, A. P. O., Suyanto, M. A., Siregar, N. A., Sakaria, Muksin, Samrotun, Y. C., Yakup, & Gulo, N. (2022). *DASAR-DASAR ILMU MANAJEMEN* (N. Qosim (ed.); Pertama). EUREKA MEDIA AKSARA.
- Agus Hendrayady, Arman, Satmoko, N. D., Afriansyah, Heriyanto, Sholeh, C., Kusrini, I. H., Tamrin, Mustanir, A., Ramdani, A., Amane, A. P. O., & Rahmat, M. R. (2022). *PENGANTAR ILMU ADMINISTRASI PUBLIK* (Agus Hendrayady (ed.); Pertama). EUREKA MEDIA AKSARA.
- Alaslan, R. T. F. A., Abdurrohm, A. M., Sunariyanto, Sagena, R. F. U., & Amane, A. P. O. (2023). *Manajemen Sektor Publik* (A. Yanto (ed.); Pertama). Global Eksekutif Teknologi.
- Amane, A. P. O., Bagenda, C., Koni, A., Fitriani, Kutoyo, M. S., Enala, S. H., Mana, F. A., Suandi, Putro, S. E., Utami, N. M. S., Luturmas, Y., & Matitaputty, M. I. (2023). *ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN* (N. Rismawati (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Amane, A. P. O., Febriana, R. W., Artiyasa, M., Cahyaningrum, A. O., Husain, Fachruzzaki, M. N. A., Asman, N. A., Ridwan, A., Suraji, A., Aritonang, L., & Srifitriani, A. (2023).

PEMANFAATAN DAN PENERAPAN INTERNET OF THINGS (IOT) DI BERBAGAI BIDANG (Studi Kasus & Implemtansi Pemanfaatan serta Penerapan IoT dalam berbagai Bidang) (Sepriano & A. Juansa (eds.); Pertama). Sonpedia Publishing Indonesia.

- Amane, A. P. O., Haq, A., Matorang, H. D., & Susanti. (2023). Peran Sekretaris Desa Dalam Pelayanan Administrasi Umum Di Desa Lumpoknyo. *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora*, 2(2), 133–142. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i2.652>
- Amane, A. P. O., Hutajulu, H., Rahmawati, A., Rusdiyana, E., Utama, J. Y., Sutrisno, E., Sekarsari, R. W., Andari, S., Afandi, A. H., Santosa, & Lailin, M. I. A. H. (2023). *Pembangunan Desa* (S. Fatimah (ed.); Pertama). Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Bormasa, M. F., Sakir, A. R., Mustanir, A., Yunus, N. R., Amane, A. P. O., Nengsih, N. S., Alaslan, A., & Sunariyanto. (2023). *Birokrasi Indonesia* (A. Yanto (ed.); Pertama). Global Eksekutif Teknologi.
- Fajrillah, Supriyati, Kraugusteeliana, Rizaldi, Vehtasvili, Amane, A. P. O., Yahya, Sianturi, N. M., Manafe, M. W. N., Herowandi, M., Baraja, A., Arnesia, P. D., Ismanidar, N., & Sjafrina, F. (2022). *E-GOVERNMENT* (D. Gustian (ed.); Pertama). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Fardiansyah, H., Amane, A. P. O., Sinaga, D. S., Lestyowati, J., Anggraini, R. I., Kutoyo, S., S., F. M. & A., Manggabarani, Utami, D. A., Ramadhani, I., Ahdiyat, M., Luturmas, Y., & Halik, P. (2023). *MANAJEMEN SUMBER DAYA*

APARATUR SIPIL NEGARA (Evi Damayanti (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.

Guampe, F. A., Kundhani, E. Y., Bagenda, C., Mustanir, A., Hamjen, H., Amane, A. P. O., Simandjorang, B. M. T. V., Canaldhy, R. S., Wiryanto, W., Heryani, A., Iskandar, A., Tauhid, Subiyakto, R., Afriyanni, Nirmala, I., & Fitrianto, M. R. (2023). *KEBIJAKAN PUBLIK (DARI SEJARAH, TEORI, PROSES, DAN PRAKTEKNYA)* (A. Hendrayady (ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.

Guampe, F. A., Rosidah, Razak, M. R. R., Mustanir, A., Sahi, N. A., Syahriar, I., Malik, Putri, D. P. H., Firdaus, Iskandar, A., Baharuddin, Wardhana, A., Heryani, A., Firman, Poti, J., Samin, R. Bin, Wiryanto, W., Amane, A. P. O., Pakpahan, R. R., ... Ekawati. (2023). *MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA (PENERAPAN DI ERA INOVASI DIGITALISASI)* (Agus Hendrayady (ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.

Hasan, M., Rosidah, Zahari, A. F. M., Mustanir, A., Hardianti, Jabbar, A., Amane, A. P. O., Iskandar, A., Simandjorang, B. M. T. V., Wiryanto, W., Kusnadi, I. H., Heryani, A., Waliah, S., Fitrianto, M. R., Firdaus, Muliani, Nopralia, S., Afriyanni, Yuliana, ... Barsei, A. N. (2023). *Administrasi Pembangunan (Teori dan Praktek)* (A. Hendrayady (ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.

Hendrayady, A., Sari, A. R., Mustanir, A., Amane, A. P. O., Isa, R., Agusman, Y., Saputra, R. W., Ashari, A., S, S., Rulandari, N., Prasetyo, A. H., & Arief, M. H. (2023). *Manajemen Pelayanan Publik* (D. P. Sari (ed.); Pertama). Global Eksekutif Teknologi.

- Holle, E. S., Amane, A. P. O., Malik, Mustanir, A., Heryani, M. R. F. A. I. A., Bagenda, A. S. W. C., & Bajuri, Y. H. S. D. (2023). *OTONOMI DAERAH* (A. Hendrayady (ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.
- Mustanir, A., Salampessy, M., Sukriyadi, Yudianto, I., Islami, A. Y., Zulfachry, Yuliantoro, H. R., Amane, A. P. O., Nugraha, E., & Fahmi, M. (2023). *Sistem Keuangan Pemerintah* (D. P. Sari (ed.); Pertama). Global Eksekutif Teknologi.
- Mustanir, A., Sutiyan, O. S. J., Amane, A. P. O., Mahrida, Kamil, I., Riyanda, R., Utama, A. S., Nababan, D., Hazmi, R. M., & Suhardin, Y. (2023). *Ilmu Politik* (A. Asari (ed.); Pertama). PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Mustanir, A., Yuyun Alfasiyus Tobondo, Pontoan, K. A., Bagenda, C., Ismail, N., Buyamin, Liza, A. W., Nofianti, L., Amane, A. P. O., Pramazuly, A. N., Wiryanto, W., Sahi, N. A., Lutfi, M., & Prastya, I. Y. (2023). *BIROKRASI INDONESIA* (Agus Hendrayady (ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.
- Ritonga, A. S. W. J. S., Ritongan, Z., Lewaherilla, N. C., Kusumawati, R. M., Sudirman, A., Hendrayady, A., Indiyah, K., Tamam, B., Amane, A. P. O., Dermawan, A. A., Patemah, Suharto, A., Hasir, & Akmarul, D. (2023). *Perilaku Organisasi: Meningkatkan Kemampuan Daya Saing Organisasi* (H. F. Ningrum (ed.); Pertama). Media Sains Indonesia.
- Umiyati, H., Anwar, K., Amane, A. P. O., Sipayung, B., Hutasoit, W. L., Rijal, K., Yunus, N. R., Wismayanti, K. W. D., Mahardhani, A. J., Bagenda, C., Setiyaningsih, Y., Purnamaningsih, P. E., & Sudarmanto, E. (2023). *Tata Kelola Sektor Publik* (A. Masruroh (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.

Vehtasvili, S. E., Acc, M., Amane, A. P. O., Sianturi, N. M., Manafe, M. W. N., Herowandi, M., ... & Sjafrina, F. (2022). E-government.

Zahari, A. F. M., Sagena, U., Mustanir, A., Amane, A. P. O., Hendrayady, A., Irawan, B., Tendi, Fkun, E., Sriharyati, S., Suhariyanto, D., Katili, A. Y., & Agusman, Y. (2023). *Reformasi Administrasi Publik* (A. Yanto (ed.); Pertama). Global Eksekutif Teknologi.

BIODATA PENULIS



Ade Putra Ode Amane, S.Sos., M.Si., Lahir di salati, 19 September 1985. Penulis merupakan anak ke-empat dari tujuh bersaudara dari pasangan bapak La Ode Amane La Ode Tode dan Ibu Hj. Sitti Rahma La Timbasa (wa unga). Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk dan melanjutkan S2 pada Program Studi Administrasi Negara Konsentrasi Administrasi Pemerintahan Daerah Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar. Penulis menekuni bidang ilmu Pemerintahan, Administrasi, Politik, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya.

Saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – 2025. Juga, Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Politik (PUSTAKA) Universitas Muhammadiyah Luwuk Periode 2021 – sekarang. Bersama kawan-kawan penulis menerbitkan buku antologi puisi “Air Mata Anonim, Realitas Dunia Birahi dan Merah Darahku, Putih Tulangku”. Selain itu, bersama istri tersayang (Sri Ayu Laali, S.Pd., M.Pd) menulis Buku "Metode Penelitian". Penulis juga berkesempatan melibatkan diri dalam berbagai penulisan Book Chapter. Juga terlibat dalam berbagai penelitian mitra dengan pihak Pemerintah dan Pihak swasta. Penulis dapat dihubungi melalui email: putrohade@gmail.com/adeputra@unismuhluwuk.ac.id atau dengan what app melalui 085395333301

BAB 5

MODEL-MODEL KEBIJAKAN PUBLIK

Aries Samudra Wicaksono

aries.samudra.w@gmail.com

A. Model Inkrementalisme

Dye, 2013; Jan-Erik Lane, 2000; Nugroho, 2003 mengatakan bahwa model inkrementalis merupakan kombinasi dari berbagai variabel eksternal dan internal. Model ini menyangkut proses kebijakan yang membahas hubungan antara lingkungan dan pengambilan keputusan dengan cara yang lebih kompleks (Jan-Erik Lane, 2000). Model ini dirasa lebih memuaskan dari sudut pandang teoritis dengan alasan memiliki nilai tinggi dalam kriteria seperti koherensi dan kesederhanaan. Menurut Jan-Erik Lane, 2000 model inkrementalisme mengklaim bahwa pengambilan keputusan—khususnya di sektor publik pada ditentukan oleh waktu dan keputusan yang dibuat sebelumnya, merupakan penentu penting dari kebijakan saat ini (Dye, 2013). Artinya keputusan-keputusan yang sudah ada menjadi dasar dari keputusan saat seperti program dan kebijakan—dengan peningkatan, pengurangan, atau modifikasi program-program yang ada saat ini (Dye, 2013). Model inkremental adalah model dengan proses pengambilan keputusan yang stabil dari waktu ke waktu, yang berarti bahwa masa depan adalah fungsi linier dari masa lalu (Jan-Erik Lane, 2000).

Kekuatan dari model inkremental akan sangat mengesankan jika model tersebut dapat menentukan seberapa besar perubahan program yang diperbolehkan untuk dilakukan jika ingin disebut sebagai 'kenaikan'. Demikian pula, teori ini akan memadai secara formal jika dapat menentukan signifikansi hubungan yang stabil antara kebijakan tahun ini dan kebijakan tahun lalu. Namun, secara teoritis tampaknya sangat sulit untuk menentukan seberapa besar penambahan positif atau negatif yang diperbolehkan (DEMPSTER & WILDAVSKY, 1979)

B. Model Pengambilan Keputusan Rasional

Kekuatan model keputusan rasional berasal dari sifat teoretisnya yang menarik. Rangkaian asumsi dicirikan oleh koherensi dan kesederhanaan: (1) fungsi nilai konsisten dan terintegrasi; (2) model ini mengasumsikan pengetahuan yang lengkap tentang alternatif dan lingkungan; (3) model ini menggunakan aturan-aturan keputusan yang sederhana seperti maksimisasi nilai yang diharapkan atau aturan mini-max atau mini-regret (Kalinowski & Simon, 1957).

Kelemahan dari model keputusan rasional berasal dari kurangnya realisme perilaku. Karena asumsinya jarang terpenuhi, model ini memiliki tingkat konfirmasi yang rendah. Hal ini tidak hanya berlaku untuk perilaku pilihan individu, namun juga berlaku untuk pilihan kolektif dalam lingkungan politik. Pemerintah, seperti halnya organisasi mana pun, bertindak di bawah asumsi rasionalitas (Thompson, 1967). Namun, pertanyaan empirisnya adalah seberapa dekat perilaku aktual dengan ekspektasi model keputusan rasional.

C. Model Pilihan Publik

Menurut Nugroho, 2003 model kebijakan ini melihat kebijakan sebagai sebuah proses formulasi keputusan kolektif dari individu-individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut. Akar kebijakan ini sendiri berakar dari teori ekonomi pilihan publik yang mengandaikan bahwa manusia adalah *homo economicus* yang memiliki kepentingan- kepentingan yang harus dipuaskan. Prinsipnya adalah *buyer meet seller; supply meet demand*.

D. Model Proses

Menurut Dye, 2013 Salah satu tujuan utama dari model ini adalah untuk menemukan pola aktivitas atau proses dari sebuah kebijakan. Model proses dapat membantu kita dalam memahami berbagai kegiatan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan (Dye, 2013). Para ilmuwan politik yang memiliki ketertarikan model ini telah mengelompokkan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kebijakan publik, yaitu:

Tahapan dalam Model Proses Kebijakan	
Identifikasi Masalah	Identifikasi masalah kebijakan melalui permintaan dari individu dan kelompok sebagai bahan tindakan pemerintah.
Penyusunan Agenda	Memfokuskan perhatian media massa dan pejabat publik kepada masalah-masalah publik yang spesifik yang kemudian memutuskan apa yang akan diputuskan.
Formulasi	Membuat dan mengembangkan isi proposal

Tahapan dalam Model Proses Kebijakan	
Kebijakan	kebijakan oleh kelompok-kelompok kepentingan, pemerintah, legislatif, dan lembaga pemikir (seperti perguruan tinggi).
Pengesahan Kebijakan	Pemilihan dan pemberlakuan kebijakan melalui tindakan oleh legislatif, presiden, dan pengadilan (yudikatif).
Implementasi Kebijakan	Implementasi kebijakan melalui birokrasi pemerintah, pengeluaran publik, peraturan, dan kegiatan lain dari lembaga eksekutif.
Evaluasi Kebijakan	Evaluasi kebijakan oleh lembaga-lembaga pemerintah sendiri, konsultan dari luar (misalnya dari perguruan tinggi), media masa, dan masyarakat umum.

E. Model Kelembagaan (Dye, 2013)

Sebuah kebijakan tidak akan menjadi kebijakan publik sebelum diadopsi, diimplementasikan, dan ditegakkan oleh suatu institusi pemerintah. Institusi pemerintah memberikan tiga ciri khas pada kebijakan publik. Pertama, pemerintah memberikan legitimasi terhadap kebijakan. Kebijakan pemerintah pada umumnya dianggap sebagai kewajiban hukum yang menuntut kesetiaan warga negara. Masyarakat mungkin menganggap kebijakan kelompok dan asosiasi lain dalam masyarakat-korporasi, gereja, organisasi profesi, asosiasi sipil, dan sebagainya-sebagai sesuatu yang penting dan bahkan

mengikat. Tetapi hanya kebijakan pemerintah yang melibatkan kewajiban hukum.

Kedua, kebijakan pemerintah melibatkan universalitas. Hanya kebijakan pemerintah yang menjangkau semua orang dalam suatu masyarakat; kebijakan kelompok atau organisasi lain hanya menjangkau sebagian masyarakat. Terakhir, pemerintah memonopoli pemaksaan dalam masyarakat-hanya pemerintah yang secara sah dapat memenjarakan pelanggar kebijakannya. Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh kelompok atau organisasi lain dalam masyarakat lebih terbatas. Kemampuan pemerintah untuk menuntut kesetiaan seluruh warganya, memberlakukan kebijakan yang mengatur seluruh masyarakat, dan memonopoli penggunaan kekerasan yang sah inilah yang mendorong individu dan kelompok untuk bekerja agar preferensi mereka dapat diimplementasikan ke dalam kebijakan.

F. Model Rasional (Dye, 2013)

Model rasional merupakan model kebijakan yang melibatkan perhitungan semua jenis nilai sosial, politik, dan ekonomi yang akan dicapai oleh kebijakan public. Sebagai seorang implementator, memilih kebijakan yang rasional harus berlandaskan pada: (1) mengetahui semua keutamaan nilai masyarakat dan bobotnya, (2) memahami semua jenis alternatif kebijakan yang tersedia, (3) memahami semua efek dari setiap alternatif kebijakan, (4) kemudian menghitung perbandingan antara manfaat yang ditimbulkan dan biaya dari setiap alternatif kebijakan, dan (5) terakhir, memilih alternatif kebijakan yang paling tepat dan efisien. Pembuatan kebijakan yang rasional juga membutuhkan informasi tentang kebijakan-kebijakan alternatif, kemampuan prediksi untuk

meramalkan secara akurat konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan-kebijakan alternatif, dan kemampuan untuk menghitung dengan tepat rasio biaya dan manfaat. Terakhir, pembuatan kebijakan yang rasional membutuhkan sistem pengambilan keputusan yang memfasilitasi rasionalitas dalam pembentukan kebijakan.

Namun, ada banyak hambatan dalam pengambilan keputusan yang rasional, begitu banyak, bahkan, sehingga hal ini jarang terjadi di pemerintahan. Hambatan penting dalam pembuatan kebijakan yang rasional:

1. Banyak manfaat dan biaya yang saling bertentangan tidak dapat dibandingkan atau ditimbang;
2. Para pembuat kebijakan mungkin tidak termotivasi untuk membuat keputusan atas dasar tujuan-tujuan sosial,
3. Hambatan dalam mengumpulkan semua informasi yang diperlukan untuk membuat semua alternatif kebijakan yang diperlukan;
4. Para *policy maker* tidak memiliki kapabilitas yang cukup dalam menghitung biaya dan manfaat kebijakan secara akurat;
5. Ketidakpastian mengenai akibat dari berbagai alternatif kebijakan, memaksa para *policy maker* untuk berpegang teguh pada kebijakan-kebijakan sebelumnya. Tujuannya untuk mengurangi efek kebijakan yang tidak diinginkan serta tidak terantisipasi.

G. Model Deskriptif dan Normatif (Dunn, 2018)

1. Model Deskriptif

Model deskriptif menjelaskan atau dapat juga memprediksi penyebab dan konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan. Model

deskriptif digunakan untuk memantau hasil tindakan kebijakan, misalnya seperti pendapatan, lapangan kerja, dan sebagainya yang termasuk dalam daftar indikator sosial dan ekonomi. Model deskriptif juga digunakan untuk meramalkan kinerja ekonomi, permintaan energi, pemanasan global, dan hasil-hasil kebijakan lainnya di masa depan.

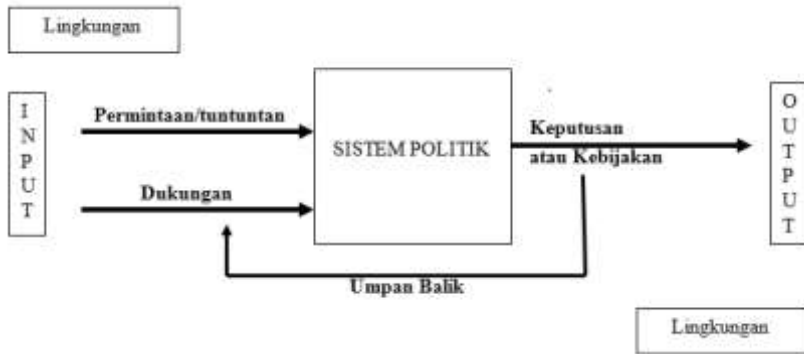
2. Model Normatif

Model normatif tidak hanya berusaha untuk menjelaskan atau memprediksi, tetapi juga untuk menentukan tindakan agar pencapaian mencapai tingkat optimal yang diinginkan. Model normatif mengambil bentuk dengan menemukan nilai variabel kebijakan yang akan menghasilkan utilitas terbesar. Kemudian nilai variabel tersebut diukur dengan nilai variabel hasil yang ingin kita ubah. Nilai-nilai dari variabel kebijakan dan variabel hasil sering kali dinyatakan dalam bentuk kuantitas moneter seperti dolar (\$), euro (€), atau kuantitas lainnya.

H. Model Sistem

Model sistem merupakan model kebijakan yang dilandasi oleh teori politik. lebih tepatnya dianalogikan dengan kehidupan sistem politik (Nugroho, 2003). Lebih lanjut Birkland, 2019 kehidupan sistem politik yang dimaksud adalah adanya pengaruh oleh/dan mempengaruhi lingkungan tempat sistem tersebut beroperasi. Asumsi Easton, 1957 terkait mekanisme kerja model ini dimulai dengan *input* (masukan/sumber yang akan diproses). Kemudian *input* diproses dan diubah menjadi *output* yang

merupakan hasil akhir dari semua proses. Masih dari Easton, 1957 *output* ini pada akhirnya mempunyai dampak—baik bagi sistem maupun bagi lingkungan tempat sistem itu berada.



Gambar 1 Model Sistem Politik

Namun yang perlu diperhatikan dalam menggunakan model sistem yaitu batas-batas antara sistem politik dan lingkungannya. Batas-batas antara sistem politik dan lingkungan disekitarnya dirasa tidak jelas/kabur, karena saling tumpang tindih (Birkland, 2019).

I. Model Strategis (Bryson, 1988)

Model strategis umumnya dapat diaplikasikan dalam organisasi profit/bisnis maupun nonprofit/publik. Tahapan model ini dimulai dari:

1. *Development of an initial agreement concerning the strategic planning effort* (Pengembangan kesepakatan awal mengenai perencanaan strategis). Kesepakatan awal harus mencakup tujuan; langkah-langkah yang diinginkan (dalam proses); bentuk dan waktu laporan; peran, fungsi, dan sebagainya

2. *Identification and clarification of mandates* (Identifikasi dan klarifikasi mandat). Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi mandat—baik formal dan informal yang dibebankan kepada organisasi, dan menjadi keharusan bagi setiap organisasi publik. Sebagian besar organisasi publik, mandate-mandat akan tertuang dalam peraturan resmi pemerintah (misal undang-undang), anggaran dan sebagainya—yang berkaitan dengan produk pemerintah.
3. *Development and clarification of mission and values* (Pengembangan dan klarifikasi misi dan nilai-nilai). Langkah ketiga, adalah pengembangan dan klarifikasi misi dan nilai-nilai organisasi. Sebelum mengembangkan sebuah pernyataan misi, sebuah organisasi harus menyelesaikan analisis pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan menurut Freeman et al., 2010; Wicaksono, 2023 didefinisikan sebagai setiap orang, kelompok atau organisasi yang dapat mengajukan klaim atas perhatian, sumber daya atau keluaran organisasi, atau dipengaruhi oleh keluaran tersebut (Bryson, 1988). Dalam bentuk analisis pemangku kepentingan yang paling sederhana, organisasi mengidentifikasi para pemangku kepentingan dan kepentingannya, kemudian membuat kriteria pemangku kepentingan untuk menilai kinerja organisasi. Setelah analisis pemangku kepentingan selesai, organisasi dapat mengembangkan pernyataan misi dengan mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan utama.
4. *External environmental assessment* (Penilaian lingkungan eksternal). Langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi. Tren saat ini, peristiwa politik, ekonomi, sosial dan perkembangan teknologi dapat dinilai bersama dengan sifat dan status berbagai kelompok pemangku kepentingan. Seperti pelanggan, klien/pengguna organisasi, dan pesaing atau kolaborator yang potensial.

5. *Internal environmental assessment* (Penilaian lingkungan internal). Langkah selanjutnya adalah penilaian terhadap organisasi. Tujuannya adalah untuk mengukur kekuatan dan kelemahan organisasi tersebut. Adapun penilaian terhadap organisasi dilakukan melalui 3 tahap meliputi: sumber daya organisasi (*input*), strategi yang digunakan saat ini (proses) dan kinerja organisasi (*output*). Sayangnya, sebagian besar organisasi tidak terbuka terkait *input* yang digunakan—sumber daya yang mereka miliki. Bahkan, strategi yang digunakan hingga kinerja organisasi juga jarang dibuka untuk kalayak umum. Namun, sifat akuntabilitas telah berubah, organisasi publik dituntut untuk semakin bertanggung jawab atas *output* dan juga *input*-nya. Analisis pemangku kepentingan melalui SWOT dapat membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan sifat akuntabilitas ini. Alasannya karena analisis SWOT memaksa organisasi untuk fokus pada kriteria yang digunakan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja organisasi. Selain itu, analisis SWOT sangat penting dalam perumusan strategi yang efektif dalam memanfaatkan peluang, serta mengatasi atau meminimalkan kelemahan dan ancaman.
6. *Strategic issue identification* (Identifikasi isu strategis). Isu-isu strategis adalah pertanyaan kebijakan mendasar yang mempengaruhi mandat organisasi publik; misi dan nilai-nilai organisasi publik; tingkat dan layanan, pengguna layanan atau sebagainya. Biasanya, isu-isu strategis harus ditangani dengan cepat dan efektif jika organisasi ingin bertahan dan berkembang. Sebuah organisasi yang tidak menangani masalah strategis mungkin tidak dapat bertahan dari ancaman dan memanfaatkan peluang yang ada. Isu strategis, hamper pasti mengandung konflik. Konflik tersebut dapat berupa tujuan (apa); cara (bagaimana); filosofi (mengapa); lokasi (di mana); waktu (kapan); dan siapa yang akan terbantu atau dirugikan oleh cara-cara yang berbeda dalam menyelesaikan masalah (siapa). Agar isu-isu tersebut dapat diangkat dan

diselesaikan secara efektif, organisasi publik harus siap untuk menghadapi konflik tersebut. Sebuah pernyataan isu strategis harus mengandung tiga elemen. Pertama, isu tersebut harus dijelaskan secara ringkas, sebaiknya dalam satu paragraf. Kedua, faktor-faktor yang membuat isu tersebut harus menjadi pertanyaan kebijakan yang mendasar dan dicantumkan. Terakhir, tim pembuat rencana harus membeberkan konsekuensi dari kegagalan dalam menangani konflik-konflik yang terjadi.

7. *Strategy development* (Pengembangan strategi). Langkah ini ditujukan untuk mengembangkan strategi yang dapat menangani isu-isu yang telah diidentifikasi pada tahapan sebelumnya. Strategi dalam konteks ini berkaitan dengan pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan dan/atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan apa itu organisasi, apa yang dilakukan dan mengapa organisasi melakukannya.
8. *Description of the organization in the future* (Menggambarkan organisasi di masa yang akan datang). Langkah ini—dan tidak selalu digunakan—organisasi publik dapat gambaran dimasa depan terkait keberhasilannya. Namun, tidak semua organisasi memiliki deskripsi atau visi seperti ini. Biasanya, yang termasuk dalam tahapan ini terkait dengan deskripsi misi organisasi, strategi dasarnya, kriteria kinerjanya, beberapa aturan keputusan yang penting, dan standar etika yang diharapkan dari semua karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Birkland, T. A. (2019). *An Introduction to the Policy Process Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making Fifth Edition* (5th ed.). Routledge.
- Bryson, J. M. (1988). A strategic planning process for public and non-profit organizations. *Long Range Planning*, 21(1), 73–81. [https://doi.org/10.1016/0024-6301\(88\)90061-1](https://doi.org/10.1016/0024-6301(88)90061-1)
- Dempster, m. A. H., & wildavsky, A. (1979). on Change: or, There Is No Magic Size for an Increment. *Political Studies*, 27(3), 371–389. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1979.tb01210.x>
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis An Integrated Approach Sixth Edition* (6th ed.). Routledge.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy 14th Edition*.
- Easton, D. (1957). An Approach to the Analysis of Political Systems. *World Politics*, 9(3), 383–400. <https://doi.org/10.2307/2008920>
- Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B., & de Colle, S. (2010). Stakeholder theory: The state of the art. In *Stakeholder Theory: The State of the Art* (Vol. 6, Issue August). <https://doi.org/10.1017/CBO9780511815768>
- Jan-Erik Lane. (2000). *The Public Sector Concept, Models and Approaches*. 368.
- Kalinowski, W. C., & Simon, H. A. (1957). Models of Man: Social and Rational. *The American Catholic Sociological Review*, 18(3), 236. <https://doi.org/10.2307/3708691>

Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik , Formulasi dan Implementasi*.

Thompson, J. d. (1967). *Organizations in action: Social science bases of administrative theory*. McGRAW- HILL.

Wicaksono, A. S. (2023). Teori Pemangku Kepentingan. In H. F. Ningrum (Ed.), *Teori Keorganisasian* (pp. 129–146). Media Sains Indonesia.

BIODATA PENULIS

Aries Samudra Wicaksono



Penulis merupakan alumni Strata 1 (S-1) Fakultas Ilmu Administrasi Publik Minat Ilmu Administrasi Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang, lulus tahun 2016 dan Strata 2 (S-2) pada fakultas dan universitas yang sama dengan konsentrasi Manajemen Publik, lulus tahun 2019. Penulis mulai aktif menulis pada awal tahun 2022 dengan karya pertama Inovasi Kebijakan Perizinan Investasi Pariwisata Di Indonesia Pada Era Post-Covid pada prosiding Isu-isu Administrasi Publik di Era Post-Covid yang terbit pada bulan Mei 2022. Kemudian 7 *book chapter* pada tahun 2022-sekarang. Penulis memiliki kepakaran dibidang dasar-dasar ilmu administrasi publik, manajemen publik, dan pelayanan publik. Saat ini penulis merupakan pekerja lepas dalam bidang transkrip wawancara dengan bahasa Indonesia sebagai sumber rekaman dan tata letak jurnal ilmiah dari tahun 2019 hingga sekarang. Selain itu, penulis juga berprofesi sebagai editor lepas buku nonfiksi bersertifikat BNSP dari tahun 2021-sekarang. Adapun buku yang sudah berhasil disunting sebanyak 2 buku nonfiksi.

Nomor Telepon: 081217370659

Email Penulis: aries.samudra.w@gmail.com

BAB 6

PROSES ATAU TAHAPAN KEBIJAKAN PUBLIK

Dr. Drs. Firdaus, M, Si

Universitas Sjakhyakirti Palembang

email:drs_firdaus@unisti.ac.id

Istilah kebijakan publik seringkali diartikan secara luas dipergunakan dalam keterkaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku penyelenggara negara pada umumnya. Thomas R. Dye (Irfan Islamy, 2000:18 dalam Zaidan, 2013:23) memberi arti kebijakan publik sebagai “is what ever government choose to do or not to do” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Definisi ini meskipun terkesan sederhana namun memiliki arti serta cakupan atau dimensi yang sangat luas. Artinya pengertian ini memberikan makna yang sangat dalam yang terkandung dalam merumuskan konsep kebijakan publik.

George. C. Edward III dan Ira Sharkansky (Zaidan 2013:24) merumuskan kebijakan publik “..is what government say to do or not to do , its goals or purposes of gaverment program ...” (...adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan

pemerintah, kebijakan publik itu berupa sasaran atau tujuan program-program pemerintah”)

Selanjutnya Crinson juga membenarkan bahwa kebijakan akan jauh lebih bermanfaat apabila dilihat sebagai petunjuk untuk bertindak atau serangkaian keputusan atau keputusan yang saling berhubungan satu sama lain. Menurut Fredrich dalam Agustino (2017: 166) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud

Dari berbagai pengertian kebijakan publik, maka perlu untuk memahami bagaimana proses atau tahapan kebijakan publik itu sendiri. Pada bagian ini dikemukakan proses atau tahapan kebijakan public dimaksud, yaitu:

A. Kebijakan Publik Sebagai Proses

Kebijakan publik sebagai suatu proses, maka kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan sesuai dengan issue-issue yang berkembang dalam masyarakat yaitu dengan cara mengidentifikasi dan mengagendakan merupakan bagian yang sangat penting dari proses

Sebagai suatu proses, maka langkah awal dilakukan dalam pembuatan kebijakan publik yaitu perumusan masalah dan menempatkan dalam agenda kebijakan. Selanjutnya masalah-masalah yang telah teridentifikasi untuk dilakukan pemecahan masalahnya akan disusun dalam bentuk formulasi kebijakan.

Michael Howlet dan M. Ramesh yang dikutip oleh Subarsono dalam Zaidan, 2013 : 51) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi Kebijakan (*policy formulation*) yakni proses perumusan pilihan-pilihan.
3. Pembuatan Keputusan (*decision making*) yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan
4. Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*), yakni proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
5. Evaluasi Kebijakan (*policy evaluation*) yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Patton dan Savicky (dalam Zaidan 2013:52) membuat siklus proses kebijakan sebagai berikut:

1. Mendefinisikan masalah (*define the problem*)
2. Menentukan kriteria evaluasi (*determine evaluation criteria*)

3. Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan (*alternatify alternative policies*)
4. Mengevaluasi kebijakan-kebijakan alternative (*evaluate alternative policies*)
5. Menyeleksi kebijakan-kebijakan pilihan (*select preferred policy*)
6. Menerapkan kebijakan-kebijakan pilihan (*implement the preferred policy*)

B. Perumusan Kebijakan

Penetapan Perumusan Kebijakan Publik Tahapan perumusan kebijakan merupakan tahap kritis dari sebuah proses kebijakan. Hal ini terkait dengan proses pemilihan alternatif kebijakan oleh pembuat kebijakan yang biasanya mempertimbangkan pengaruh langsung yang dapat dihasilkan dari pilihan alternatif utama tersebut. Proses ini biasanya akan mengekspresikan dan mengalokasikan kekuatan dan tarik-menarik di antara berbagai kepentingan sosial, politik, dan ekonomi. Tahap perumusan kebijakan melibatkan aktifitas identifikasi dan atau merajut seperangkat alternatif kebijakan untuk mengatasi sebuah permasalahan serta mempersempit seperangkat solusi tersebut sebagai persiapan dalam penentuan kebijakan akhir (Sidney, 2007: 79).

Menurut Sidney perumusan kebijakan mencoba menjawab sejumlah pertanyaan, yaitu: apa rencana untuk menyelesaikan

masalah? Apa yang menjadi tujuan dan prioritas? Pilihan apa yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut? Apa saja keuntungan dan kerugian dari setiap pilihan? Eksternalitas apa, baik positif maupun negatif yang terkait dengan setiap alternatif? (Sidney, 2007: 79) Perumusan seperangkat alternatif akan melibatkan proses identifikasi terhadap berbagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah; serta kemudian mengidentifikasi dan mendesain seperangkat perangkat kebijakan spesifik yang dapat mewakili setiap pendekatan (Sidney, 2007: 79).

Perumusan kebijakan akan lebih mudah dimengerti apabila menggunakan suatu model atau pendekatan tertentu. Oleh karena itu, beberapa ahli mengembangkan model-model perumusan kebijakan untuk mengkaji proses perumusan kebijakan agar lebih mudah dipahami. Dengan demikian, pembuatan model-model perumusan kebijakan digunakan untuk lebih menyederhanakan proses perumusan kebijakan yang berlangsung secara rumit tersebut.

1. Model *Rational Komprehensif*

Model ini merupakan model yang paling dikenal dan juga paling luas diterima parakalangan pengkaji kebijakan. Model teori ini mengedepankan gagasan bahwa kebijakan sebagai maximum social gain yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi

masyarakat. Model ini mengatakan bahwa proses penyusunan kebijakan harus didasarkan pada kebutuhan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya. Rasionalitas yang diambil adalah perbandingan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai. Dengan kata lain, model ini lebih menekankan pada aspek efisiensi dan aspek ekonomis. Cara-cara memformulasikan atau merumuskan kebijakannya sesuai urutan adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui preferensi publik dan kecenderungannya
- b. Menemukan pilihan-pilihan
- c. Menilai konsekuensi masing-masing pilihan
- d. Menilai rasio nilai sosial yang dikorbankan
- e. Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien

Apabila dirunut, model ini merupakan model ideal dalam merumuskan kebijakan, dalam arti mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas kebijakan. Studi-studi kebijakan biasanya memfokuskan pada tingkat efisiensi dan keefektifan kebijakan (Nugroho, 2006: 82). Unsur-unsur utama dari teori ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain.
- 2) Tujuan-tujuan, nilai-nilai, atau saran yang memedomani pembuat

keputusan amat jelas dan dapat ditetapkan rangkingnya sesuai dengan urutan kepentingannya.

- 3) Berbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut diteliti secara seksama.
- 4) Teliti juga akibat-akibat (biaya dan manfaat) yang ditimbulkan oleh setiap alternatif yang dipilih
- 5) Setiap alternatif dan masing-masing akibat yang menyertainya dapat diperbandingkan dengan alternatif lain yang ada.

2. Model *Inkrementalis*

Model ini merupakan model penambahan (*inkrementalis*). Model ini lahir berdasarkan kritik dan perbaikan terhadap model rasional-komprehensif dengan mengubah (memodifikasi) sedikit-sedikit kebijakan yang sudah dibuat oleh model rasional komprehensif (Islamy, 2004: 59). Dijelaskan bahwa para pembuat kebijakan dalam model rasional komprehensif tidak pernah melakukan proses seperti yang disyaratkan oleh pendekatan rasional dikarenakan para pembuat kebijakan tidak memiliki cukup waktu, intelektual dan biaya. Ada muncul kekhawatiran dari dampak yang tidak diinginkan akibat kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya, ada hasil-hasil dari kebijakan sebelumnya yang harus dipertahankan dan menghindari konflik (Nugroho, 2006: 89).

Model ini melihat bahwa kebijakan merupakan variasi atau kelanjutan

dari kebijakan di masa lalu. Model ini dapat dikatakan sebagai model pragmatis/praktis. Pendekatan model ini diambil ketika pembuat kebijakan berhadapan dengan keterbatasan waktu, ketersediaan informasi, dan kecukupan dana untuk melakukan evaluasi kebijakan secara komprehensif. Sementara itu pembuat kebijakan dihadapkan pada ketidakpastian yang muncul di sekelilingnya.

Menurut pandangan kaum inkrementalis, para pembuat keputusan dalam menunaikan tugasnya berada di bawah keadaan yang tidak pasti yang berhubungan dengan konsekuensi-konsekuensi dari tindakan mereka di masa depan, maka keputusan-keputusan inkremental dapat mengurangi resiko atau biaya ketidakpastian itu. Inkrementalisme juga mempunyai sifat realistis karena didasari kenyataan bahwa para pembuat keputusan kurang waktu, kecakapan dan sumber-sumber lain yang dibutuhkan untuk melakukan analisis yang menyeluruh terhadap semua penyelesaian masalah-masalah yang ada.

3. Model *Mixed Scanning* (pengamatan terpadu)

Model *Mixed Scanning* sebagai suatu pendekatan untuk mengambil keputusan yang bersifat fundamental maupun yang 114riminal114114114. Model ini belajar dari kelebihan dan kekurangan model-model sebelumnya. Model mixed scanning ini memanfaatkan dua macam model sebelumnya secara fleksibel dan

sangat tergantung dengan masalah dan situasinya. Model mixed scanning memperhitungkan tingkat kemampuan para pembuat keputusan untuk memobilisasikan kekuasaannya serta semakin efektif guna mengimplementasikan keputusan–keputusan mereka. Lebih mudah dipahami bahwa model ini adalah model yang amat menyederhanakan masalah. Model ini disukai karena pada hakikatnya model ini merupakan pendekatan

Dari beberapa model atau pendekatan dalam pembuatan kebijakan yang sudah dipaparkan sebelumnya, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam hal ini, tidak ada pernyataan yang mana yang paling baik dan sesuai di antara beberapa model tersebut. Yang pastinya, untuk menentukan model mana yang akan dipakai untuk merumuskan kebijakan, haruslah yang paling baik dan berlandaskan pada kriteriakriteria tertentu yang sesuai dengan kebutuhan

C. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu bagian dari proses kebijakan publik. Dalam hal ini implementasi kebijakan merupakan bagian yang sangat menentukan tercapainya tujuan kebijakan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi, ataupun demi suksesnya pelaksanaan suatu kegiatan tertentu. Suksesnya implementasi kebijakan tidak akan mudah

tercapai dengan tanpa adanya suatu upaya dalam mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan berdasarkan atas kebijakan yang telah ditetapkan, dalam hal ini implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam kebijakan, hal tersebut dilakukan agar tujuan yang diinginkan dalam kebijakan akan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Disamping itu, dari adanya implementasi kebijakan akan memberikan suatu kontribusi bagi kebijakan yang akan datang. Sehingga dalam implementasi kebijakan diperlukan adanya kesatuan tindakan dari para implementator.

Sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah yang merupakan implementator. Maka implementasi kebijakan menjadi suatu upaya dalam mencapai tujuan daripada kebijakan itu sendiri. Untuk itulah setiap implementasi kebijakan akan sangat tergantung dari tindakan-tindakan yang dilakukan implementator dilapangan, sebab tanpa implementator yang cekatan maka kebijakan yang ada tidak memiliki kekuatan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Suwaryo (2006:258) bahwa,

Berhasil atau tidaknya suatu implementasi kebijakan ditentukan oleh banyak faktor. Namun faktor para

pelaksana memainkan peranan penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Hal ini didasarkan kepada argumentasi, bahwa para pelaksana ini yang menghantarkan kebijakan tersebut pada masyarakat. Kalau orang yang menjadi *implementing agency*nya sama sekali tidak memahami kebijakan maka dengan sendirinya akan terjadi *missing link* antara kebijakan itu sendiri dengan implementasinya.

Bila ditelaah secara kritis dari pendapat di atas, tampaknya dalam implementasi kebijakan lebih mengutamakan adanya jalan tengah sebagai upaya penyelesaian masalah yang terdapat di masyarakat, implementasi kebijakan tetap diterapkan dan dilakukan pula langkah-langkah kompromi sebagai tindakan untuk memuluskan tercapainya tujuan kebijakan. Dalam hal ini, implementasi kebijakan diterapkan dengan tetap berpegang pada tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Namun juga dengan tetap memperhatikan berbagai kondisi yang sedang terjadi di lapangan yang kemudian dilakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kebijakan yang diimplementasikan.

Pada bagian yang lain, Wahab (2004:64) mendefinisikan implementasi kebijakan dengan mengungkapkan bahwa, “Implementasi kebijaksanaan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden)”. Dalam hal ini, Wahab

mempertegas bahwa implementasi kebijakan yang merupakan bagian dari suatu kebijakan publik, telah ditentukan suatu langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan dan telah tertuang secara jelas dalam suatu kebijakan yang tertulis

Selanjutnya Dwijowijoto (2008:432) menyatakan bahwa,

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Implementasi kebijakan memerlukan langkah-langkah sebagai penuntun, agar implementasi kebijakan tidak mengalami penyimpangan dan tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. Langkah-langkah tersebut dimulai dari tahap identifikasi masalah sebagai tahap yang sangat penting sebab tanpa suatu identifikasi masalah yang baik maka sulit menentukan tindakan yang tepat pada proses implementasi kebijakan. Logikanya adalah sesudah identifikasi masalah diketahui maka dapat menentukan tujuan yang hendak dicapai, yang selanjutnya

D. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap

rencana dan standar. Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson, 1975).

Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Sedangkan Stufflebeam dalam Arikunto (2006 : mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan keputusan. Menurut William N. Dunn (2003:608-610) istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program.

Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Menurut Dunn (2003:608- 609, dalam Zaidan, 2013)

evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya.

1. Fokus nilai, evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai suatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan 120rimin kebijakan atau program dan bukan sekedar usaha mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri;
2. Interdependensi Fakta Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik fakta maupun nilai. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau seluruh masyarakat. Untuk menyatakan demikian harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara 120rimin merupakan konsekwensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi;
3. Orientasi masa kini dan masa lampau. Tuntutan 120rimal120120,. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah

aksi-aksi dilakukan (ex-post). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi (ex-ante);

4. Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada dapat dianggap sebagai intristik (diperlukan bagi dirinya) atau ekstrinsik (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan instrumental dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Selanjutnya Winarno (2008:225) menyatakan Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan. Namun demikian, ada beberapa ahli yang mengatakan sebaliknya bahwa evaluasi bukan merupakan tahap akhir dari proses kebijakan instrumental. Pada dasarnya, kebijakan instrumental dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan tertentu yang berangkat dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan instrumental meraih hasil yang diinginkan.

Lebih lanjut Abidin (2006:211) menyatakan, evaluasi secara

lengkap mengandung tiga pengertian yaitu :

1. Evaluasi awal, sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan (ex-ante evaluation);
2. Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring;
3. Evaluasi akhir, yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan (ex-post evaluation).

Abidin (2006:213) kemudian mengemukakan bahwa informasi yang dihasilkan dari evaluasi merupakan nilai (values) yang antara lain berkenaan dengan :

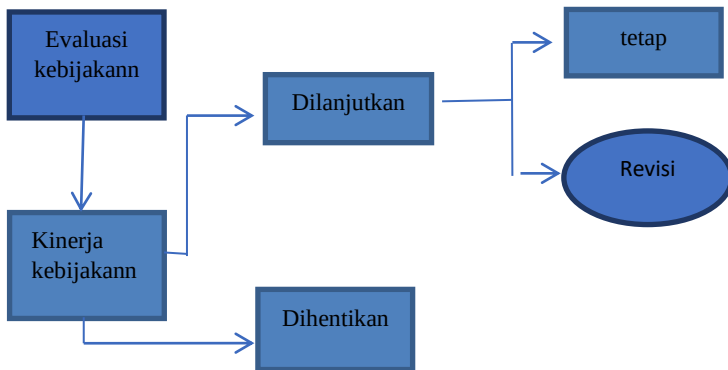
- 1). Efisiensi (Efficiency), yakni perbandingan antara hasil dengan biaya, atau (hasil/biaya);
- 2). Keuntungan (profitability), yaitu selisih antara hasil dengan biaya atau (hasil/biaya);
- 3). Efektif (effectiveness), yakni penilaian pada hasil, tanpa memperhitungkan biaya;
- 4). Keadilan (equity), yakni keseimbangan (proporsional) dalam pembagian hasil (manfaat) dan/atau biaya (pengorbanan);
- 5). Detriments, yakni 122riminal122 122riminal dalam bidang 122rimin seperti 122riminal;
- 6). Manfaat tambahan (marginal rate of return), yaitu tambahan hasil banding biaya atau pengorbanan (change-in benefits/change –in-cost).

E. Revisi Kebijakan

Setiap evaluasi kebijakan akan menghasilkan kesimpulan, apakah suatu kebijakan dapat dilanjutkan atau dihentikan. Apabila suatu kebijakan itu tetap akan dilanjutkan, maka apakah kebijakan itu tetap seperti bentuk semula ataukah direvisi, hal ini tentunya sangat tergantung capaian tujuan kebijakan itu sendiri yang lebih dikenal dengan kelompok sasaran (*target group*)

Revisi Kebijakan dapat dipahami sebagai bagian sebangun dengan proses perumusan kebijakan, namun terdapat perbedaan, dimana revisi kebijakan harus dimulai dari evaluasi kebijakan

Gambar.
Proses revisi kebijakan



DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, 2008, *Mewujudkan Good Government melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta University Press
- Agustino, Leo, 2017, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Penerbit Alfabeta Bandung
- Abidin, Said Zainal, 2006, *Kebijakan Publik*, Penerbit Pancur Siwah Jakarta
- Riyan Nugroho, 2008, *Public Policy*, penerbit PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia Jakarta
- Sidney, Nora S, Miller Gerald, Fischer Frank, 2007, *Hand Book Public Policy Analysis*, Crc/Taylor Fance
- Sujarto, Edi, 2005, *Analisis Kebijakan Publik> Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung Alfabeta Penerbit
- Syarif Makhya, 2012, *Formulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lampung th 2011*
- Untung Suwarno, 2006, Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah (studi kasus tentang kewenangan dalam aplikasi otonomi daerah berdasarkan UU no 22 Tahun 1999 di kabupaten Bandung.
- Wahab, Solihin Abdul, 2001, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara Jakarta.
- Winarno, Budi, 2008, *Kebijakan Publik Teori dan proses*, cetakan kedua, Intermedia, Jakarta.
- William Dunn N, 2003, *Pengantar Analisis kebijakan Publik*, Yogyakarta Gadjah Mada University Press
- Zaidan Nawawi, 2013, *Kebijakan Publik (Proses Model Dan Analisis)*, Penerbit: Trio Rimba Persada

<https://repesitori.uma.ac>
<https://perpus.menpan.go.id>
<https://pasca.ut.ac.id>
<https://www.academia.edu>

BIODATA PENULIS



FIRDAUS

Penulis adalah Lektor Kepala pada Program Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana dan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sjakhyakirti Palembang.

Bidang keahlian penulis adalah dibidang kajian Administrasi Publik/Negara yang telah ditekuni sejak Strata 1, Strata 2 dan Strata 3. Strata 1 diselesaikan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Sjakhyakirti (1987), Strata 2 diselesaikan pada fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2000), sedangkan program Doktorat diselesaikan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung (2015). Penulis aktif dalam menulis publikasi ilmiah, baik nasional maupun internasional, serta aktif menulis buku-buku, baik buku ajar maupun buku referensi,serta buku chapter

Email Penulis: drs_firdaus@unisti.ac.id

BAB 7

IDENTIFIKASI DAN PENYUSUNAN MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK

Lamidi

Lamidi.didi1962@gmail.com

A. Pengertian Identifikasi

Identifikasi adalah proses untuk mengenali atau memahami karakteristik suatu objek atau masalah dengan pengamatan, pengukuran, dan analisis (Klein, 2002). Tujuannya adalah untuk menentukan sifat, jenis, dan ukuran karakteristik dari objek yang diteliti atau masalah yang dihadapi. Identifikasi dapat dilakukan dalam berbagai bidang, antara lain dalam penyelesaian masalah, penelitian, dan penyusunan kebijakan. Identifikasi sering kali merupakan tahap awal yang penting dalam proses pengambilan keputusan atau tindakan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan. Jadi, identifikasi merupakan suatu proses yang kritis dalam penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan dalam berbagai bidang (Hsiao, 1983).

Secara umum, identifikasi merujuk pada proses untuk mengenali, menentukan, dan mengumpulkan informasi mengenai suatu objek atau masalah yang akan diteliti atau diselesaikan. Proses ini penting dalam menyusun kebijakan publik atau dalam penyelesaian masalah di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sebagainya. Berikut ini adalah contoh studi kasus identifikasi di Indonesia yaitu Suatu organisasi non-profit mengidentifikasi masalah marjinalisasi dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas di wilayah perkotaan di Indonesia,

terutama di wilayah Jakarta dan Surabaya. Organisasi ini berfokus pada upaya memerangi masalah ini dengan cara mengajarkan hak-hak dasar kelompok minoritas melalui kampanye kesadaran publik dan pelatihan untuk kelompok minoritas.

Selama proses penyusunan masalah, organisasi ini melakukan analisis situasi dengan mengumpulkan data tentang kasus diskriminasi dan marjinalisasi yang terjadi pada kelompok minoritas. Hasil studi menunjukkan bahwa kelompok minoritas tidak memiliki akses yang adil ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik lainnya. Organisasi kemudian memutuskan untuk memfokuskan upaya mereka pada tiga kelompok minoritas, yaitu komunitas LGBT, orang asing, dan orang yang menderita gangguan jiwa. Setelah masalah ini diidentifikasi, organisasi ini melakukan upaya lebih lanjut dalam mengidentifikasi sub-masalah yang muncul pada kelompok-kelompok ini. Dalam hal ini, mereka menentukan bahwa kelompok LGBT mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses kesehatan, perlindungan hukum, serta tingkat diskriminasi yang tinggi saat mencari pekerjaan. Sementara itu, orang asing dan orang yang menderita gangguan jiwa menghadapi kesulitan yang berbeda seperti proses penguburan jenazah, pemenuhan hak-hak atas properti, dan akses ke layanan kesehatan.

Setelah sub-masalah diidentifikasi, organisasi ini mulai merancang program pengintervensian dengan sasaran spesifik yang dapat mengatasi masalah-masalah ini. Program ini mencakup pelatihan keterampilan, layanan kesehatan, konseling, dan bantuan hukum sesuai dengan kebutuhan kelompok minoritas yang berbeda. Organisasi ini berhasil menciptakan kesadaran publik dan memberikan dukungan kepada kelompok minoritas, sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif di masyarakat. Dengan cara ini, organisasi telah berhasil mengidentifikasi masalah-masalah yang spesifik, mengembangkan program-program yang sesuai, dan memberikan solusi konkret bagi kelompok minoritas yang terpinggirkan.

Dalam konteks yang berbeda-beda, identifikasi dapat diartikan sebagai proses pengenalan, pencarian informasi, pemahaman masalah atau situasi, dan pengambilan keputusan. Dalam sains, identifikasi adalah suatu proses untuk mengenali atau menetapkan benda tertentu, molekul, atau organisme, dan mengkategorikannya dengan cara yang konsisten dan setepat mungkin. Kemudian dalam bisnis, identifikasi dapat mencakup pencarian produk, pelanggan, atau pasar potensial yang membutuhkan produk tertentu. Selanjutnya dunia pendidikan, identifikasi digunakan untuk mengenal dan menganalisis karakteristik siswa secara individual, di mana informasi tersebut dapat membantu guru dalam membuat kurikulum dan strategi pengajaran yang tepat.

Ada psikologi, identifikasi merujuk pada kemampuan siswa untuk mengenali dan memahami emosi mereka sendiri dan emosi orang lain, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan keterampilan sosial. Lain pula lingkungan hidup, identifikasi bertujuan untuk mengenali spesies flora dan fauna serta lingkungan alam dengan tujuan untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman hayati dan dalam politik dan sosial, identifikasi dapat memuat segala hal mulai dari identifikasi suku atau agama, hingga identifikasi kelompok minoritas atau mayoritas serta hak-hak minoritas dan penetapan wilayah.

Secara umum, identifikasi adalah suatu proses pengenalan atau pencarian informasi tentang sesuatu yang membutuhkan perhatian, dengan tujuan untuk memahami secara lebih baik, mengenali karakteristik, dan mengembangkan solusi atau strategi untuk memecahkan masalah.

B. Pengertian Penyusunan Masalah

Identifikasi adalah proses untuk mengenali atau memahami karakteristik suatu objek atau masalah dengan pengamatan, pengukuran, dan analisis. Tujuannya adalah untuk menentukan sifat, jenis, dan ukuran karakteristik dari objek yang diteliti atau

masalah yang dihadapi. Identifikasi dapat dilakukan dalam berbagai bidang, antara lain dalam penyelesaian masalah, penelitian, dan penyusunan kebijakan. Identifikasi sering kali merupakan tahap awal yang penting dalam proses pengambilan keputusan atau tindakan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan. Jadi, identifikasi merupakan suatu proses yang kritis dalam penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan dalam berbagai bidang. Berikut ini adalah beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian penyusunan masalah:

- a. Menurut Von Neumann dan Morgenstern, penyusunan masalah adalah suatu proses logika berpikir yang membantu seseorang dalam menghadapi permasalahan matematis atau ekonomi yang kompleks (Neumann & Morgenstern, 1992).
- b. Menurut Herbert Simon, penyusunan masalah adalah proses penguraian suatu masalah ke dalam bagian-bagian atau elemen-elemen yang lebih kecil dan mudah dipecahkan, sehingga memudahkan pengambilan keputusan (Simon, 2016).
- c. Menurut Koren dan Harel, penyusunan masalah adalah proses pencarian dan identifikasi masalah yang rumit, dengan tujuan mengurai dan memecah masalah menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana sehingga mempermudah dalam pengambilan keputusan atau pemecahan masalah (Koren & Harel, 2002).
- d. Menurut Luger dan Bauer, penyusunan masalah adalah suatu kemampuan dalam menentukan bagian-bagian esensial dari masalah dan menyusun bagian-bagian ini dalam dunia nyata untuk menghasilkan solusi yang optimal (Luger & Bauer, 1978).

Secara umum, penyusunan masalah diartikan sebagai proses penguraian, identifikasi, dan pemecahan suatu masalah menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana dan spesifik, dengan tujuan untuk memudahkan pengambilan keputusan atau pemecahan masalah secara konkret. Berikut ini adalah contoh studi kasus penyusunan masalah di Indonesia:

Sebuah organisasi non-profit di Indonesia ingin mengatasi

masalah polusi udara yang semakin meningkat di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya dan Bandung. Polusi udara ini telah mengakibatkan berbagai masalah kesehatan seperti asma, iritasi mata dan hidung, dan gangguan pernapasan lainnya. Untuk mengidentifikasi masalah ini, organisasi ini memulai dengan mengumpulkan data dan informasi tentang penyebab polusi udara dalam kota-kota besar tersebut. Data menunjukkan bahwa kendaraan bermotor, industri dan pembakaran sampah adalah penyebab utama polusi udara tersebut. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang tidak ramah lingkungan seperti merokok di tempat umum, dan penggunaan bahan bakar tidak bersih juga berpengaruh pada tingginya tingkat polusi udara.

Setelah penyebab masalah diidentifikasi, organisasi tersebut melakukan penentuan sub-masalah seperti:

- a. Kendaraan bermotor: Polusi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor menyebabkan masalah kesehatan yang serius bagi penduduk kota. Organisasi ini memfokuskan upayanya pada promosi penggunaan transportasi ramah lingkungan seperti sepeda, electric scooter, dan motor listrik. Selain itu, mereka juga mendorong pemerintah untuk memperkenalkan kebijakan yang menyediakan jaringan transportasi publik yang terjangkau dan efisien.
- b. Industri: Sektor industri sangat berkaitan dengan polusi udara, khususnya di kota-kota besar. Organisasi ini bekerja sama dengan industri untuk mempromosikan penggunaan teknologi dan metode produksi terbaru, dan memastikan bahwa industri mematuhi peraturan lingkungan yang ditetapkan pemerintah dalam pengawasan polusi udara.
- c. Pembakaran sampah: Pembakaran sampah merupakan penyebab utama polusi udara di daerah perkotaan. Organisasi ini mendorong pemerintah untuk mengembangkan kebijakan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan melakukan edukasi masyarakat tentang pentingnya pengurangan sampah dan pengelolaan sampah yang tepat.

Setelah sub-masalah diidentifikasi, organisasi ini merancang program pengintervensian untuk mengurangi dampak buruk polusi udara. Program ini meliputi sosialisasi dan edukasi tentang penggunaan transportasi ramah lingkungan, promosi teknologi dan metode produksi ramah lingkungan, dan kampanye pengurangan sampah. Dalam kasus ini, organisasi berhasil mengidentifikasi masalah polusi udara yang kompleks dan rumit, kemudian merancang program yang efektif dan dapat memberikan solusi konkret bagi masyarakat. Bersama-sama, organisasi dan pemerintah berkolaborasi untuk memerangi masalah polusi udara dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan penduduk kota secara keseluruhan.

C. Hubungan Identifikasi Penyusunan Masalah dengan Kebijakan Publik

Identifikasi penyusunan masalah dan kebijakan publik saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Hal ini karena identifikasi masalah merupakan langkah awal dalam proses kebijakan publik yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam proses identifikasi masalah, pemerintah atau lembaga terkait akan menganalisis situasi dan kondisi yang ada untuk menentukan masalah apa yang harus diatasi. Setelah itu, mereka akan merumuskan solusi dan kebijakan publik yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Proses identifikasi masalah ini sangat penting, karena jika masalah yang diidentifikasi tidak tepat, maka kebijakan publik yang diambil juga tidak akan efektif dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Sebaliknya, kebijakan publik juga dapat mempengaruhi identifikasi masalah. Ketika kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah atau lembaga terkait tidak efektif dalam menyelesaikan masalah yang ada, maka akan terjadi perubahan dalam identifikasi masalah tersebut. Pemerintah atau lembaga terkait akan melakukan evaluasi dan mengidentifikasi kembali masalah yang ada yang tidak

teratasi oleh kebijakan publik sebelumnya. Oleh karena itu, baik identifikasi masalah maupun kebijakan publik harus dijalankan dengan baik dan berkesinambungan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat.

Salah satu contoh studi kasus hubungan identifikasi penyusunan masalah dengan kebijakan publik di Indonesia adalah masalah stunting pada anak. Identifikasi masalah pada awalnya adalah tingginya angka stunting pada anak di Indonesia. Pemerintah dan lembaga terkait melakukan analisis untuk menentukan penyebab dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Hasil identifikasi masalah menunjukkan bahwa salah satu penyebab stunting adalah kurangnya asupan gizi dari ibu hamil dan anak-anak. Berdasarkan identifikasi masalah ini, pemerintah dan lembaga terkait menetapkan kebijakan publik seperti program pemberian makanan tambahan pada ibu hamil dan anak-anak, kampanye pengenalan makanan bergizi, dan pengembangan pusat gizi di wilayah-wilayah yang membutuhkan.

Namun, kebijakan publik tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan masalah stunting pada anak. Hal ini mengakibatkan perubahan dalam identifikasi masalah, di mana pemerintah dan lembaga terkait melakukan evaluasi dan mengevaluasi kembali masalah stunting. Setelah melakukan analisis ulang, pemerintah menemukan bahwa masih ada faktor lain yang menyebabkan stunting, seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas pada air bersih. Berdasarkan identifikasi masalah yang baru, pemerintah dan lembaga terkait mengembangkan kebijakan publik baru, seperti program sanitasi dan pengembangan akses air bersih. Contoh studi kasus ini menunjukkan bahwa identifikasi masalah dan kebijakan publik secara langsung terkait dan saling mempengaruhi. Identifikasi masalah yang tepat dapat memperkuat kebijakan publik dan kebijakan publik yang efektif dapat membantu memperbaiki identifikasi masalah.

D. Fenomena dalam Penyusunan Masalah

Fenomena dalam Penyusunan Masalah yang ditemui di Indonesia sudah sering dialami oleh beberapa pemangku kepentingan yang ada, berikut fenomena yang sering ditemui diantaranya

- a. Ketidakjelasan masalah yang ingin diselesaikan; Penyusunan kebijakan publik yang efektif dan efisien harus dimulai dengan mengidentifikasi masalah atau isu yang ingin dihadapi. Namun, seringkali penyusun kebijakan kesulitan mengidentifikasi masalah dengan jelas, sehingga perumusan kebijakan pun tidak akurat. Ketidakjelasan masalah yang ingin diselesaikan dalam kebijakan publik merujuk pada kebingungan atau ketidakpastian dalam mengidentifikasi masalah yang perlu diatasi oleh kebijakan publik. Hal ini dapat terjadi ketika masalahnya kompleks atau multifaset, atau saat data yang tersedia masih terbatas sehingga membuat sulit untuk memahami masalah dengan jelas. Hal ini dapat menyulitkan penyusunan kebijakan publik yang tepat karena tanpa pemahaman yang jelas tentang masalah yang akan diatasi, kebijakan publik yang dihasilkan mungkin tidak efektif atau bahkan membawa dampak yang tidak diinginkan.
- b. Tidak adanya data atau informasi yang memadai; Penyusunan kebijakan publik yang baik harus didasarkan pada data atau informasi yang valid dan akurat. Sayangnya, terkadang data atau informasi yang ada tidak memadai atau tidak komprehensif, sehingga sulit untuk memahami masalah dengan benar dan menyusun kebijakan yang tepat. Tidak adanya data atau informasi yang memadai dalam penyusunan kebijakan publik merujuk pada kurangnya akses atau ketersediaan data atau informasi yang diperlukan untuk mengembangkan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, seperti biaya yang tinggi untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan, metode pengumpulan data yang kurang

efektif, atau kurangnya sumber daya manusia yang competent di bidang pengumpulan dan analisis data. Kurangnya data atau informasi yang memadai dapat menyulitkan proses pembuatan kebijakan publik karena kebijakan yang dihasilkan harus didasarkan pada fakta dan bukti yang relevan untuk memperbaiki masalah yang ada. Tanpa data atau informasi yang memadai, kebijakan bisa jadi tidak efektif atau kurang tepat sasaran, atau bahkan mungkin menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, pengumpulan data dan informasi yang tepat menjadi sangat penting dalam proses perumusan kebijakan publik yang berkualitas.

- c. Perbedaan pandangan atau perspektif; Niat untuk menyusun kebijakan yang efektif harus dihadapi dengan menghadapi perbedaan pandangan atau perspektif. Berbagai faktor seperti kepentingan politik, sumber daya, atau kepentingan masyarakat dapat membuat para pemangku kepentingan memiliki pandangan atau perspektif yang berbeda, sehingga menimbulkan konflik. Perbedaan pandangan atau perspektif dapat terjadi dalam penyusunan kebijakan publik ketika orang-orang dengan latar belakang, nilai, atau tujuan yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda terhadap masalah yang sama. Perbedaan pandangan ini bisa terjadi karena faktor budaya, sosial, politik, atau ekonomi, serta pengalaman dan pendidikan. Perbedaan pandangan dapat menyulitkan penyusunan kebijakan publik yang menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan menyeluruh, karena pandangan yang berbeda dapat menghasilkan alternatif kebijakan yang berbeda pula. Namun, jika dikelola dengan baik, perbedaan pandangan dapat membantu memperkaya diskusi dan analisis kebijakan, mempertimbangkan perspektif yang berbeda-beda, dan menghasilkan kebijakan yang lebih holistik dan inklusif. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan pandangan yang ada dalam penyusunan kebijakan publik dan memastikan

- bahwa semua suara didengar dan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan.
- d. Tidak adanya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan; Perumusan kebijakan publik yang efektif dan responsif harus melibatkan partisipasi masyarakat. Namun, seringkali kebijakan dibuat oleh pihak pemerintah dan dilaksanakan secara top-down, sehingga masyarakat tidak merasa terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan kebijakan yang dihasilkan tidak mempertimbangkan kepentingan mereka. Tidak adanya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan berarti bahwa masyarakat tidak terlibat secara aktif dalam diskusi, pengambilan keputusan, atau implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah. Hal ini karena pemerintah kurang mengundang, menyediakan aksesibilitas, atau membuat mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif dan konstruktif dari masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Ketika masyarakat tidak memiliki akses atau kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan, maka kebijakan yang dihasilkan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan, harapan, atau tuntutan masyarakat. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan aspirasi masyarakat dapat merusak kepercayaan dan transparansi dalam pemerintahan, serta memperburuk masalah yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan menjadi penting, karena masyarakat adalah subyek langsung dari kebijakan yang dirumuskan. Partisipasi masyarakat memastikan representasi yang lebih luas dan akurat dari beragam perspektif dan kepentingan sosial, ekonomi, dan politik, yang dapat membantu menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, lebih efektif, dan lebih efisien.
 - e. Keterbatasan sumber daya; Keterbatasan sumber daya merujuk pada keterbatasan jumlah atau kualitas sumber daya yang tersedia untuk digunakan dalam mencapai tujuan tertentu. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya fisik

seperti tanah, air, dan pangan, atau sumber daya manusia seperti tenaga kerja, pendidikan, dan keterampilan. Keterbatasan sumber daya dapat menjadi kendala atau hambatan dalam mencapai tujuan dan pemenuhan kebutuhan manusia atau organisasi. Terbatasnya sumber daya dapat menghasilkan pengelolaan sumber daya yang tidak tepat atau tidak memadai, mengurangi efektivitas dan produktivitas, dan bahkan menimbulkan konflik dalam masyarakat yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang tersedia. Keterbatasan sumber daya juga sering menjadi alasan untuk membatasi kebijakan dan program pemerintah yang lebih ambisius dan komprehensif. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya dapat menjadi sumber inspirasi bagi inovasi dan perubahan dalam mencari cara-cara baru untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih efisien dan efektif. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan menjadi sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan di masa depan, serta untuk melindungi lingkungan dan mendukung kemakmuran social dan ekonomi. Pengelolaan sumber daya yang cerdas dan berkelanjutan dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas untuk melahirkan hasil yang maksimal, baik bagi masyarakat maupun lingkungan.

E. Identifikasi dan Penyusunan Masalah

Menurut para ahli, identifikasi dan penyusunan masalah kebijakan publik adalah suatu proses yang kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah dan konteks yang terkait. Berikut ini adalah pandangan beberapa ahli:

- a. William Dunn mengemukakan bahwa proses identifikasi masalah dimulai dengan mencari permasalahan yang memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat. Kemudian dipilih

masalah yang dapat diselesaikan oleh lembaga pemerintah (Dunn, 2018).

- b. Eugene Bardach dan Eric Patashnik menunjukkan bahwa identifikasi masalah melibatkan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber. Hal ini diperlukan agar dapat memahami semua faktor yang mempengaruhi masalah serta menentukan fokus atau prioritas penyusunan kebijakan (Bardach & Patashnik, 2019).
- c. Ljung (1998) mengemukakan bahwa identifikasi masalah harus melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat yang terlibat dalam pola pikir dan persepsi akhirnya dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai masalah dan menemukan solusi yang lebih realistis (Ljung, 1998).
- d. Sedangkan, David Easton merekomendasikan agar identifikasi masalah dilakukan dengan mempertimbangkan nilai sosial dan politik. Hal ini memungkinkan pemilihan masalah yang dapat menjawab mesolitik politik dari masyarakat (Easton, 1957).
- e. Terakhir, Charles Lindblom (1980) menekankan bahwa penyusunan kebijakan tidak hanya membutuhkan proses identifikasi masalah yang optimal tetapi juga memerlukan studi dan eksperimen yang menyeluruh. Hanya dengan menjalankan studi dan eksperimen yang bermutu, maka sebuah kebijakan dapat merealisasikan kepentingan publik (Lindblom, 1980).

Identifikasi dan penyusunan masalah kebijakan publik memiliki manfaat yang sangat penting (Muadi et al., 2016). Berikut ini beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari Identifikasi dan Penyusunan Masalah Kebijakan Publik:

- a. Memperbaiki kualitas kebijakan. Identifikasi dan penyusunan masalah kebijakan publik menjadi landasan penting untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas tinggi. Hal ini disebabkan karena proses identifikasi masalah memungkinkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah yang dihadapi dan konteks yang terkait, sehingga keputusan kebijakan yang

dihasilkan dapat menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan yang diinginkan.

- b. Meningkatkan partisipasi publik. Identifikasi masalah yang melibatkan partisipasi publik dapat membuat masyarakat lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Hal ini dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih baik dan mempengaruhi keputusan lebih efektif.
- c. Mengurangi konflik. Proses identifikasi masalah dan penyusunan kebijakan publik dapat mengurangi konflik antar kelompok masyarakat. Hal ini karena adanya pemahaman yang lebih baik tentang masalah dan kebutuhan masing-masing kelompok sehingga keputusan yang diambil dapat mempertimbangkan semua pihak yang terlibat.
- d. Mengoptimalkan sumber daya. Identifikasi masalah yang tepat dan proses penyusunan kebijakan yang baik dapat membantu merencanakan dan mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan dengan lebih optimal. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan publik yang dihasilkan.
- e. Meningkatkan akuntabilitas. Identifikasi dan penyusunan masalah kebijakan publik yang dilakukan dengan baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan publik. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan membantu memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Kemudian selanjutnya untuk tujuan dari identifikasi dan penyusunan masalah kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a. Memahami masalah secara mendalam. Identifikasi masalah membantu memahami masalah secara mendalam, termasuk akar permasalahan dan faktor-faktor yang terkait. Dengan pemahaman yang lebih baik, lembaga pemerintah dapat memformulasikan solusi yang lebih efektif.
- b. Memprioritaskan masalah. Proses identifikasi masalah dapat membantu memprioritaskan masalah yang harus diselesaikan

oleh lembaga pemerintah. Hal ini karena adanya pemahaman yang jelas mengenai dampak dan kepentingan sosial dari masalah tersebut.

- c. Membuat keputusan yang tepat. Penyusunan masalah kebijakan publik yang baik menjadi landasan penting untuk membuat keputusan yang tepat. Melalui identifikasi masalah, lembaga pemerintah dapat mengumpulkan fakta dan informasi yang diperlukan untuk menentukan opsi kebijakan yang paling efektif dalam menyelesaikan masalah.
- d. Memastikan efektivitas dan efisiensi kebijakan publik. Identifikasi dan penyusunan masalah kebijakan publik yang baik dapat membantu lembaga pemerintah merencanakan sumber daya yang tepat dan mengalokasikan anggaran secara efisien. Hal ini juga membantu memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan benar-benar efektif dalam menyelesaikan masalah serta memenuhi kebutuhan masyarakat.
- e. Meningkatkan partisipasi publik. Identifikasi masalah kebijakan publik yang melibatkan partisipasi publik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Hal ini dapat membantu meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Untuk memastikan penyusunan masalah kebijakan publik yang ideal, beberapa hal berikut perlu diperhatikan:

- a. Partisipasi publik: Proses identifikasi masalah kebijakan publik harus memperhatikan partisipasi publik. Dengan melibatkan masyarakat, akan lebih mudah dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi masyarakat secara luas.
- b. Data yang lengkap: Identifikasi masalah kebijakan publik harus didasarkan pada data yang lengkap dan terbaru. Data ini dapat diperoleh melalui survei, penelitian, dan pengumpulan data dari sumber-sumber yang dapat dipercaya.
- c. Keterbukaan dan Transparansi: Proses penyusunan masalah kebijakan publik harus dilakukan secara terbuka dan transparan, termasuk semua tahapannya. Masyarakat harus diberikan

- kesempatan untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap identifikasi masalah kebijakan publik.
- d. Pemetaan Masalah: Identifikasi masalah kebijakan publik harus memperhatikan pemetaan masalah secara menyeluruh. Hal ini mencakup analisis masalah yang mendasar, faktor penyebab masalah, dampak masalah, dan potensi solusi yang dapat diterapkan.
 - e. Evaluasi Kebijakan Publik Lama: Proses identifikasi masalah kebijakan publik ideal juga harus memperhatikan evaluasi kebijakan publik yang telah diterapkan sebelumnya. Evaluasi ini dapat membantu dalam mengidentifikasi kesalahan dan kekurangan kebijakan sebelumnya sehingga dapat dihindari dalam kebijakan yang baru.
 - f. Konsistensi dan Tujuan yang Jelas: Identifikasi masalah kebijakan publik harus konsisten dengan tujuan dan visi yang ingin dicapai dalam jangka pendek maupun Jangka Panjang. Dengan memiliki tujuan yang jelas, proses identifikasi masalah kebijakan publik dapat lebih terarah dan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif.

Salah satu contoh studi kasus Identifikasi Penyusunan Masalah Kebijakan Publik di Negara Berkembang adalah terkait dengan masalah kesehatan masyarakat di Pakistan. Masalah kesehatan masyarakat di Pakistan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pola hidup yang tidak sehat, seperti pola makan yang buruk serta kurangnya akses ke fasilitas kesehatan. Menurut data dari World Health Organization (WHO), tingkat morbiditas dan mortalitas di Pakistan juga cukup tinggi, termasuk untuk penyakit menular seperti tuberkulosis, malaria, dan diare.

Proses Identifikasi Masalah dimulai dengan survey yang melibatkan masyarakat di berbagai wilayah di Pakistan. Hasil survey menunjukkan bahwa banyak masyarakat di Pakistan yang tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan yang memadai dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup terkait dengan kesehatan masyarakat. Berdasarkan hasil survey tersebut, pemerintah Pakistan

kemudian menyusun kebijakan publik dalam bentuk "Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat". Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di seluruh wilayah di Pakistan dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan, dan memberikan bantuan keuangan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan layanan kesehatan.

Melalui program ini, pemerintah Pakistan berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memberikan kesempatan bagi semua orang untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai dan terjangkau. Kebijakan ini juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian masalah kesehatan masyarakat, sehingga masyarakat dapat turut serta memelihara kesehatan diri sendiri dan keluarga mereka. Kemudian Salah satu contoh studi kasus Identifikasi Penyusunan Masalah Kebijakan Publik di Negara Maju adalah terkait dengan masalah perubahan iklim di Jerman. Masalah perubahan iklim di Jerman semakin memburuk dengan adanya peningkatan suhu global, peningkatan frekuensi cuaca ekstrem, dan penurunan kualitas lingkungan. Menurut data dari European Environment Agency, Jerman adalah salah satu negara di Eropa yang paling terpengaruh oleh perubahan iklim.

Proses Identifikasi Masalah dimulai dengan survey dan analisis data yang melibatkan berbagai ahli lingkungan dan kebijakan publik. Hasil survey dan analisis data menunjukkan bahwa salah satu masalah terbesar di Jerman adalah terkait dengan emisi gas rumah kaca, khususnya gas karbon dioksida (CO₂), yang berasal dari aktivitas manusia. Berdasarkan hasil survey dan analisis data tersebut, pemerintah Jerman kemudian menyusun kebijakan publik dalam bentuk "Rencana Aksi Iklim Nasional". Rencana ini bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di Jerman dengan menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Melalui rencana ini, pemerintah Jerman berharap dapat

memperbaiki kualitas lingkungan serta memberikan kontribusi positif bagi upaya global untuk mengurangi perubahan iklim. Kebijakan publik ini melibatkan partisipasi aktif dari sektor swasta dan masyarakat untuk menciptakan pilihan alternatif energy yang bersih. Selain itu, kebijakan ini juga diperkuat dengan adopsi teknologi baru di sektor industri untuk mempercepat peralihan ke arah penggunaan energi terbarukan dan menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor energi hijau."

Tantangan dan hambatan identifikasi penyusunan masalah kebijakan publik di masa depan antara lain:

- a. Kompleksitas isu: Isu publik yang dihadapi di masa depan akan semakin kompleks dan sulit diidentifikasi. Berbagai faktor seperti globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial memberikan dampak yang berbeda terhadap masyarakat.
- b. Dinamika perubahan: Perubahan isu publik dapat terjadi dengan cepat dalam waktu yang singkat, sehingga kebijakan publik harus dapat diubah dengan cepat pula.
- c. Keterbatasan data: Identifikasi masalah kebijakan publik membutuhkan data yang lengkap dan akurat. Namun, belum semua data terkait isu publik tersebut tersedia.
- d. Perspektif yang berbeda: Isu publik dapat dilihat dari berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda. Seringkali, perspektif ini masih disesuaikan dengan sudut pandang tertentu, sehingga menghasilkan kebijakan yang kurang memuaskan untuk semua pihak.
- e. Keberagaman masyarakat: Masyarakat yang semakin heterogen dapat menjadi hambatan dalam identifikasi masalah kebijakan publik. Perbedaan budaya, agama, dan pandangan politik masyarakat dapat mempengaruhi prioritas dalam mengidentifikasi masalah kebijakan publik.
- f. Pengaruh kepentingan pihak-pihak tertentu: Kepentingan pihak tertentu yang kuat seperti perusahaan besar, kelompok kepentingan, dan elit politik dapat menjadi pengaruh yang mengganggu identifikasi masalah kebijakan publik. Terkadang

kebijakan diarahkan untuk memihak pada kelompok tertentu dan mengesampingkan kepentingan masyarakat secara umum.

F. Dinamika Penyusunan Masalah oleh Pemangku Kepentingan

Dinamika penyusunan masalah oleh pemangku kepentingan terjadi ketika para pemangku kepentingan memiliki pandangan, persepsi, dan kepentingan yang berbeda-beda tentang suatu masalah. Proses ini biasanya terjadi ketika pihak-pihak yang terkait dengan suatu masalah mulai menyampaikan pandangan, kepentingan, dan prioritas mereka dalam proses diskusi atau konsultasi. Dalam proses penyusunan masalah, para pemangku kepentingan mencoba untuk mempengaruhi persepsi dan pandangan orang lain dan memprioritaskan isu-isu tertentu yang dirasa penting dalam suatu konteks masalah. Oleh karena itu, dinamika ini sering mencakup adu argumentasi, negosiasi, dan pengaruh yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait.

Proses ini dibutuhkan untuk memastikan bahwa semua masalah yang relevan dapat diidentifikasi, dipahami dan diselesaikan dengan tepat dan adil. Namun, dinamika ini juga dapat menjadi sumber konflik dan kesulitan dalam melakukan koordinasi dan kerjasama di antara para pemangku kepentingan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, dinamika ini sangat penting untuk memastikan bahwa masalah sosial, lingkungan, dan ekonomi dapat diidentifikasi dengan benar dan diprioritaskan dengan tepat. Proses yang transparan dan inklusif dalam penyusunan masalah akan membantu memastikan bahwa suara dan pandangan semua pemangku kepentingan terakomodasi dan bahwa keputusan yang diambil akan membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan masalah untuk berkomunikasi dengan terbuka, menghargai perbedaan pandangan, dan bekerja sama untuk mencapai solusi yang setuju.

Salah satu contoh studi kasus dinamika penyusunan masalah oleh pemangku kepentingan adalah tentang pemulihan hutan untuk konservasi lingkungan. Masalah ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki pandangan, kepentingan, dan prioritas yang berbeda-beda. Pihak-pihak yang terkait dalam masalah ini antara lain adalah pemerintah, lembaga konservasi, komunitas lokal, dan perusahaan. Pemerintah memiliki kepentingan dalam menjaga stabilitas lingkungan dan melaksanakan regulasi yang berkaitan dengan konservasi hutan. Lembaga konservasi memiliki kepentingan dalam melestarikan hutan dan mempromosikan kesadaran lingkungan. Komunitas lokal memiliki kepentingan dalam mempertahankan sumber daya alam yang ada dan mengakses kayu bakar dan bahan bakar alam. Perusahaan memiliki kepentingan dalam memperoleh kayu dan bahan baku lainnya dari hutan untuk kepentingan bisnis.

Dalam proses penyusunan masalah, para pemangku kepentingan terlibat dalam diskusi dan konsultasi untuk mencapai kesepakatan dan mengidentifikasi masalah yang relevan. Namun, karena kepentingan yang berbeda-beda, dinamika dalam penyusunan masalah menjadi rumit dan sulit dicapai kesepakatan. Pemerintah dan lembaga konservasi lebih memprioritaskan pemulihan hutan dengan melarang aktivitas penebangan hutan oleh perusahaan, sementara komunitas lokal dan perusahaan mengharapkan akses kehutan untuk memperoleh bahan bakar dan kayu yang diperlukan. Kedua kelompok ini juga khawatir akan terganggu kehidupannya jika aksesnya dibatasi.

Dalam situasi seperti ini, para pemangku kepentingan harus menjalankan proses konsultatif yang terbuka dan transparan, mengakomodasi kepentingan semua pihak, dan mencari solusi yang menguntungkan bagi semua orang. Salah satu solusi yang dihasilkan adalah memberdayakan masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya hutan dan memperoleh manfaat ekonomi yang layak dari hasil hutan, sehingga dapat menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

G. Kesimpulan

Secara keseluruhan, proses identifikasi dan penyusunan masalah kebijakan publik merupakan tahap awal yang sangat penting dalam proses kebijakan publik. Penyusunan masalah ini melibatkan serangkaian langkah, yang dimulai dari mengidentifikasi dan memahami masalah hingga merumuskan opsi kebijakan yang memadai. Proses ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pihak pemerintah, karena melibatkan banyak pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dan pandangan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, proses identifikasi dan penyusunan masalah harus transparan, inklusif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam prosesnya.

Setelah proses identifikasi dan penyusunan masalah selesai, maka dilanjutkan dengan pemilihan solusi kebijakan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, hasil identifikasi dan penyusunan masalah harus disajikan dalam bentuk yang memadai dan persuasif agar pemangku kepentingan dapat memahami dengan mudah dan dapat diterapkan pada kebijakan yang diambil nantinya. Sebagai kesimpulan, proses identifikasi dan penyusunan masalah kebijakan publik harus dilakukan secara transparan, inklusif, dan partisipatif dengan memasukkan pandangan semua pemangku kepentingan. Dalam proses ini, pemangku kepentingan harus mempertimbangkan kepentingan dan masalah yang dihadapi secara menyeluruh dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat menguntungkan seluruh pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2019). *A practical guide for policy analysis: the eightfold path to more effective problem solving*. https://books.google.com/books/about/A_Practical_Guide_for_Policy_Analysis.html?hl=id&id=Bip_DwAAQBAJ
- Dunn, W. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (Sixth edit). Routledge ; Taylor & Francis Group.
- Easton, D. (1957). An Approach to the Analysis of Political Systems*. *World Politics*, 9(3), 383–400. <https://doi.org/10.2307/2008920>
- Hsiao, C. (1983). Chapter 4 Identification. *Handbook of Econometrics*, 1, 223–283. [https://doi.org/10.1016/S1573-4412\(83\)01008-9](https://doi.org/10.1016/S1573-4412(83)01008-9)
- Klein, M. (2002). On Identification. In *New Directions in Psycho-Analysis* (pp. 309–345). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315014098-15>
- Koren, Y., & Harel, D. (2002). A multi-scale algorithm for the linear arrangement problem. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 2573 LNCS, 296–309. https://doi.org/10.1007/3-540-36379-3_26/COVER
- Lindblom, C. E. (1980). *The policy-making process*. Prentice-Hall.
- Ljung, L. (1998). System Identification. In *Signal Analysis and Prediction* (pp. 163–173). Birkhäuser, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4612-1768-8_11
- Luger, G. F., & Bauer, M. A. (1978). Transfer effects in isomorphic problem situations. *Acta Psychologica*, 42(2), 121–131. [https://doi.org/10.1016/0001-6918\(78\)90011-2](https://doi.org/10.1016/0001-6918(78)90011-2)
- Muadi, S., Muhammad, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195–224.

- Neumann, V., & Morgenstern, M. (1992). *Toward a history of game theory*. Duke University Press.
- Simon, H. A. (2016). Decision Making: Rational, Nonrational, and Irrational: *Educational Administration Quarterly*, 29(3), 392–411. <https://doi.org/10.1177/0013161X93029003009>

BAB 8

FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK

Dr. Ani Heryani, S.Sos, M.Si

aniheryani248@gmail.com

A. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan rangkaian yang kompleks, merupakan proses yang satu sama lain saling berhubungan, saling bergantung dan berurutan. Artinya kebijakan publik itu merupakan “proses”. Pendapat lain menyebutkan sebagai “hasil”. Stone dalam (Donahue, 2008) menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah hasil dari rangkaian yang kompleks. Pendapatnya : *“Public policy is generated through a complex series of negotiated activities collectively known as the policy-making process”*. Proses yang menghasilkan kebijakan publik tersebut terdiri dari rangkaian yang kompleks, kegiatan yang dinegosiasikan secara kolektif. Lebih lanjut Stone mengemukakan : *“This is particularly salient because government policy is generally believed to be about collective interests, but needs are almost always experienced individually”*. (Donahue, 2008).

Charles Lindblom (1968) dalam (Heryani, 2010) dikemukakan : *“an extremely complex, analytical and political process to which there is no beginning or end, and the boundaries of which are most uncertain. Somehow a ... complex set of forces that we call policy-making all taken together, produces effect called policies.”* Kebijakan publik merupakan proses yang sangat kompleks, analitis dan politis yang tidak memiliki awal atau akhir dan batas-batasnya tidak pasti. Lindblom menegaskan kekuatan kompleks yang digabungkan menghasilkan efek yang disebut kebijakan. Kekuatan yang kompleks dapat berasal dari lingkungan interna maupun eksternal yang mempengaruhi terhadap kebijakan. Kebijakan publik diyakini sebagai kepentingan kolektif, tetapi dibutuhkan juga oleh hampir semua orang secara individu. Kebijakan publik dirumuskan karena ada kepentingan publik. Kepentingan publik berasal dari kebutuhan untuk solusi dari masalah-masalah publik.

Pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang menggabungkan antara perumusan, implementasi dan efek dari kebijakan. Sebagaimana dikemukakan Donahue yaitu : *“Generally, the policy-making process incorporates policy formulation, implementation, and the subsequent effects of policy”*. (Donahue, 2008). Berbicara mengenai kebijakan publik tidak hanya

berbicara mengenai formulasi saja, tetapi implementasi dan dampak dari kebijakan yang di maksud. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dan efek secara social, ekonomi, politik dan juga efek terhadap lingkungan tidak dapat dipisahkan.

Terdapat 2 (dua) dimensi yang penting dalam proses kebijakan publik. Donahue mengungkapkan : *“There are two important dimensions and effects of the environment to consider. First, the political and ideological context must be acknowledged. These are fundamentally important because they define what forms of policy are acceptable and whether they can garner enough support to be implemented. Second, a whole array of socioeconomic factors affects whether a policy can achieve its desired outcomes”*. (Donahue, 2008). 2 (dua) dimensi penting dan pengaruh lingkungan yang harus diperhatikan adalah :

1. Konteks politik dan ideologis
2. Keseluruhan faktor sosial ekonomi

Faktor-faktor ini mempengaruhi pada semua tahapan dalam kebijakan publik. Masalah publik masuk menjadi agenda kebijakan apabila faktor politik dan ideologi mendukung, demikian pula faktor social ekonomi harus menjadi pertimbangan. Demikian juga efek

kebijakan , apakah memiliki efek secara politik, efek terhadap ideologi, memiliki efek terhadap ekonomi maupun sosial.

Ada dua dimensi penting dan pengaruh lingkungan untuk dipertimbangkan. Pertama, konteks politik dan ideologis harus diakui. Ini pada dasarnya penting karena mereka menentukan bentuk kebijakan apa yang dapat diterima dan apakah mereka dapat memperoleh dukungan yang cukup untuk diimplementasikan. Kedua, keseluruhan faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi terhadap suatu kebijakan agar dapat mencapai hasil yang diinginkan.

Mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi dalam proses kebijakan publik, pandangan *New Public Management* menawarkan konsep terkait kebijakan dalam pencapaian *good governance* untuk merekayasa ulang hubungan antara politik, birokrasi dan publik. Osborne dan Plastrik sebagaimana diikuti Fritzen mengemukakan bahwa : *“Key strategic elements in this broad family of reforms include:*

- 1) delinking policy formulation (or “steering”) from implementation functions to concretize the specific accountability borne by all actors;*

- 2) *introduction of competitive pressures to the bureaucracy using market mechanisms such as privatization where possible and systems of performance measurement where not; and*
- 3) *deregulation of internal operations to promote flexible, creative implementation.*

(Fritzen, 2008)

Unsur-unsur strategis dalam reformasi yang menekankan pada kebijakan publik meliputi :

- 1) memisahkan perumusan kebijakan dari fungsi implementasi
- 2) pengenalan persaingan terhadap birokrasi dengan menggunakan mekanisme pasar antara lain privatisasi dan system pengukuran kinerja
- 3) deregulasi operasi internal untuk mempromosikan implementasi yang fleksibel dan kreatif.

Penerapan prinsip-prinsip *New Public Management* dalam reformasi tata kelola mempengaruhi terhadap kebijakan publik. Pembuatan kebijakan publik saat ini telah mengalami perubahan yang cukup besar dengan adanya reformasi kebijakan publik.

B. Formulasi Dalam Tahapan Kebijakan Publik

Formulasi kebijakan merupakan tahap kedua dalam proses kebijakan publik. Sebagaimana dikemukakan Michael Howlett dan Ramesh yang mengemukakan 5 tahapan dalam siklus kebijakan (*stages in policy cycle*), yaitu (Howlett, Michael, Ramesh, 2003) :

1. *Agenda Setting*
2. *Policy Formulation*
3. *Decision-Making*
4. *Policy Implementation*
5. *Policy Evaluation*

Hal senada dikemukakan Shafritz dan Russel bahwa :
“This process can be illustrated by the public policy making cycle. a conceptual model that views the public policy process as moving through a succession of stages :

1. *Agenda setting (or identification of a policy issue)*
2. *Policy decision or non decision*
3. *Implementation*
4. *Program evaluation or impact analysis and finally*
5. *Feedback - which lead to revision or termination. (Russel, 2005)*

Siklus pembuatan kebijakan menurut Russel di atas berbeda dengan pendapat Howlett dan Ramesh. Howlett dan Ramesh menyebut istilah “*policy formulation*” sedangkan Russel menggunakan istilah “*policy decision or not decision*”.

Tahapan formulasi kebijakan merupakan tahapan yang paling kritis karena dihadapkan pada pemilihan alternative terbaik dari berbagai alternative. Sidney dalam (Heryani, 2010) mengemukakan “*Policy formulation clearly is a critical phase of the policy process*”. Berbagai pertimbangan diperlukan dalam proses pemilihan alternative ini, tidak hanya memikirkan kondisi saat itu tetapi harus dipertimbangkan sumber daya yang ada, skala prioritas, organisasi pelaksanaanya, sasaran kebijakan, serta dampak yang diperoleh pada saat kebijakan yang sedang dirumuskan memasuki tahapan implementasi. Risiko yang harus dihadapi ke depan dengan pandangan berbagai aspek yang dilibatkan.

C. Model-model Formulasi Kebijakan

Thomas R. Dye dalam bukunya *Understanding Public Policy* (Dye, 1992) mengemukakan beberapa model untuk memahami kebijakan publik. Nicholas Henry mengelompokan model Dye menjadi 2 (dua) klasifikasi besar yaitu :

1. Dianalisis dari sudut proses
2. Dianalisis dari sudut hasil (akibat)

(Islamy, 2003)

1. Dianalisis dari sudut proses

Pengelompokan berdasarkan analisa dari sudut proses meliputi model :

a. Model Institusional

Kebijakan publik adalah output dari proses yang dilakukan pemerintah. ”Secara tradisional ilmu politik telah didefinisikan sebagai studi tentang lembaga-lembaga pemerintahan” (Heryani, 2010). Proses yang dilakukan merupakan aktivitas politik yang pada umumnya terjadi di institusi pemerintahan tertentu. Dye dalam (Islamy, 2003) mengemukakan bahwa lembaga – lembaga pemerintahan memberikan kebijakan publik tiga karakteristik khusus.

Pertama, pemerintahan memberikan legitimasi (*legitimacy*) kepada kebijakan-kebijakan. Kebijakan pemerintahan umumnya dianggap sebagai obligasi legal yang memerintahkan ketaatan dari rakyatnya.

Kedua, kebijakan pemerintah bersifat universal (*universality*), yaitu berkaitan dengan seluruh rakyat pada komunitas tertentu.

Ketiga, pemerintah memonopoli secara paksa (*coercion*), dikatakan bahwa hanya pemerintah yang dapat menetapkan suatu hukuman bagi para pelanggar terhadap kebijakannya. Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh kelompok lain atau organisasi lain di dalam masyarakat hanya dapat dilakukan secara terbatas. Hal ini menggambarkan efektifitas yang menunjukkan kemampuan pemerintah agar dapat dipatuhi oleh masyarakatnya.

b. Model Elite Massa

Model ini menunjukkan bahwa kebijakan sebagai preferensi kaum elite. Kebijakan politik dapat juga dipandang sebagai preferensi dan nilai-nilai dari elite pemerintah (Heryani, 2010). Kelompok elite seperti elite politik, elite bisnis, elite militer, elite akademisi, bahkan media dapat membentuk opini publik. Kelompok elite yang membentuk opini publik, sedangkan massa yang jumlahnya lebih besar kurang memiliki kekuatan untuk membuat opini publik

bahkan elit dapat memperkuat problem publik agar masuk menjadi agenda kebijakan. Nilai-nilai yang dimiliki kelompok elite akan mempengaruhi kebijakan yang dibuat.

c. Model Kelompok

Model kelompok adalah suatu model kebijakan yang digambarkan sebagai keseimbangan kelompok sebagai proporsi interaksi di antara kelompok sentral dari politik (Heryani, 2010). Kelompok kepentingan akan menjadi kelompok penekan dalam proses perumusan kebijakan. David Truman dalam (Islamy, 2003) mengemukakan : *“interest group is “a shared attituded group that makes a claim upon other groups in the society)”*. Kelompok ini memiliki sikap yang sama terhadap tuntutan yang sedang di proses. Kelompok kepentingan memperhatikan dampak positif bagi kelompoknya. Sehingga kebijakan akan terbentuk sebagai keseimbangan kelompok. Namun pada realitanya seringkali ada kelompok yang terabaikan sehingga akan memberikan respon terhadap kebijakan baik pada saat uji publik suatu kebijakan maupun pada tahapan implementasi.

d. Model Sistem Politik

Model Sistem-Politik ini merupakan model proses yang menggambarkan aktivitas politik dari pelaku-pelaku yang terlibat dalam formulasi kebijakan. Perbedaannya dengan model kepentingan adalah penekanannya pada aktivitas yang dilakukan. Easton dalam (Islamy, 2003) mengemukakan bahwa “model ini didasarkan pada konsep teori informasi (*inputs, withinputs, outputs* dan *feedback*) dan memandang kebijakan sebagai respons suatu sistem politik terhadap kekuatan lingkungan (sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis dan sebagainya)”.

2. Dianalisis dari sudut hasil (akibat)

1. Model Rasional-Comprehensive

Model rasional-comprehensive merupakan model yang menitikberatkan pada hasil yang akan diperoleh apabila kebijakan ini dilaksanakan. Umumnya model ini memperhatikan hasil dalam hitungan secara sosial maupun ekonomi. Prediksi hasil yang diperoleh secara sosial seringkali kurang tepat karena banyaknya faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu diperlukan proses penyeleksian alternatif

kebijakan antara lain pembuat kebijakan harus mengetahui preferensi nilai-nilai masyarakat dan kecenderungannya serta konsekuensi dari setiap pilihan kebijakan (Heryani, 2010).

Mengacu pada pendapat Lindblom yang mengemukakan : “... *the rational comprehensive model could be applied only under ideal conditions ...*” (Morçöl, 2006). Model rasional-comprehensive dapat diterapkan hanya pada kondisi ideal. Untuk mencapai suatu kondisi ideal banyak hal yang menjadi syarat maupun konsekuensinya. Hal ini sulit ditempuh apalagi pada saat kondisi suatu kebijakan dibuat banyak problem public yang perlu segera memperoleh penyelesaiannya.

Hayes mengemukakan :”*The rational-comprehensive method of decision making evokes a vision of policy makers clearly defining objectives and making value-maximizing choices after a thorough examination of relevant alternatives*”. (Hayes, 2006). Model rasional-comprehensive membangkitkan visi pembuat kebijakan, definisi tujuan dan memaksimalkan nilai dalam membuat pilihan serta pemeriksaan menyeluruh terhadap alternative yang

relevan. Nilai-nilai yang harus diperhatikan antara lain ideology, nilai politik, nilai ekonomi, social budaya serta nilai-nilai lainnya yang berkembang di masyarakat agar setelah kebijakan ditetapkan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan. Artinya kebijakan public tidak hanya bagus di atas meja namun perlu diperhatikan pada saat diimplementasikan termasuk dampak yang akan terjadi dari implementasi kebijakan tersebut.

Hambatan dari model ini telah di pikirkan oleh para ahli, dalam tulisan Hayes dikemukakan : *“Unfortunately, this ideal is usually unattainable. Inherent obstacles to rational decision making prompted Charles E. Lindblom to advance his model of disjointed incrementalism as an alternative method of policy making (Dahl and Lindblom, 1953; Lindblom, 1959; 1965; 1979; Braybrooke and Lindblom, 1963)”* (Hayes, 2006). Hambatan dari model rasional-comprehensive ini telah mendorong munculnya model incremental sebagai model alternative kebijakan.

2. Model Inkremental

Inkrementalisme memandang kebijakan publik sebagai suatu kelanjutan dari aktivitas pemerintahan masa

lalu dengan hanya memodifikasi secara inkremental (berubah sedikit).(Heryani, 2010).

Lindblom menawarkan suatu model alternative kebijakan yaitu inkremental : *“the rational comprehensive model could be applied only under ideal conditions and offered incrementalism as both a better description of the actual decision making situations and a prescription for better decision making”*. (Morçöl, 2006)

Mengingat model rasional komprehensif merupakan model yang dapat diterapkan dalam kondisi ideal, Linbolm menawarkan inkrementalisme sebagai deskripsi yang lebih baik dari situasi pengambilan keputusan aktual dan resep untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Selanjutnya Hayes membahas mengenai inkremental bahwa : *“that incrementalism may not describe accurately all policymaking conditions, but it does many conditions. He critiques the “ideologues,” such as neoclassical economists, who attempt to apply the rational model to all conditions, and argues that incrementalism is superior to the rational model because the former is “quintessentially pragmatic” and “anti-utopian,” not ideological*. (Morçöl, 2006). Inkremental mungkin tidak menjelaskan secara akurat semua kondisi pembuatan kebijakan, tetapi melakukan banyak kondisi. Dia mengkritik "ideolog", seperti ekonom

neoklasik, yang mencoba menerapkan model rasional untuk semua kondisi, dan berpendapat demikian inkrementalisme lebih unggul daripada model rasional karena yang pertama "pada dasarnya pragmatis" dan "anti-utopia", bukan ideologis.

Model incremental hanya mengubah kebijakan sebelum sedikit sebagai upaya penyesuaian terhadap situasi dan kondisi yang berkembang, sehingga perubahan yang terjadi di masyarakat pada saat kebijakan tersebut di laksanakan tidak terlalu banyak mengubah tatanan yang ada dan respon publik pun tidak terlalu besar.

Lindblom dalam (Islamy, 2003) menegaskan bahwa model pembuatan keputusan inkremental adalah yang paling cocok untuk masyarakat yang majemuk.

3. Model Mixed-Scanning

Model mixed-scanning ini merupakan perpaduan antara rasional comprehensive dan inkremental. Etzioni dalam (Islamy, 2003) mencetuskan pembuatan keputusan hibrida dari rasional-comprehensif dan inkremental.

Boss dalam (Islamy, 2003) mengemukakan kebaikan model mixed-scanning yaitu :

- Mixed-scanning memperkenankan mengambil manfaat/kegunaan baik pada pendekatan inkremental atau rasional di pelbagai situasi yang berbeda.
- Mixed-scanning memperkenankan adanya pengaturan lingkungan yang berubah dengan cepat yaitu dengan situasi dan kondisi yang khusus.
- Mixed-scanning mengakui kapasitas pembuat keputusan.

Model mixed-scanning memberikan suatu alternative dalam pembuatan kebijakan. Dalam prosesnya pembuat kebijakan akan dihadapkan pada pertanyaan sebagaimana dibahas Hayes : *"This life cycle of policies sheds new light on two critically important questions :*

- 1) *When will the policy process depart from normal incrementalism to yield nonincremental policy departures? Furthermore,*
- 2) *when will the policy process depart from normal incrementalism to permit rational decision making? "*

(Hayes, 2006)

Pembuat kebijakan harus memahami kapan proses kebijakan berangkat dari inkremental dan kapan berangkat dari non incremental. Selain itu proses kebijakan

menyimpang dari inkrementalisme normal yang memungkinkan untuk dilakukan secara rasional-comprehensive.

Pembuat kebijakan meskipun ada pilihan mixed scanning tetapi perlu memiliki kemampuan untuk memilah kapan harus merumuskan kebijakan secara incremental kapan harus rasional comprehensive. Artinya perpaduan kedua model ini harus jelas.

Dengan mengacu pada pendapat Lindblom, Hayes mengemukakan lebih lanjut : *“The realm of normal incrementalism, as described by Lindblom, is confined to the second stage of the life cycle, the stage of incremental rationalizing policies. Because so much policy making involves reform of existing programs, and because so much policy making is characterized by a combination of conflictual objectives and conflictual knowledge”*. (Hayes, 2006).

Pembuatan kebijakan akan dihadapkan pada kombinasi tujuan konfliktual dan pengetahuan konfliktual, sehingga tinjauan perumus dalam pembuatan kebijakan harus luas, bersifat multisektor an multidisipliner karena akan dihadapkan pada permasalahan public yang kompleks yang segera mendapatkan solusinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Donahue, A. K. (2008). Ethics and Public Policy. In Evan M. Berman (Ed.), *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy* (2 ed., hal. 696–700). Taylor & Francis Group.
- Dye, T. R. (1992). *Understanding Public Policy*. Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- Fritzen, S. (2008). Bureaucrats and Politicians in Southeast Asia. In Evan M. Berman (Ed.), *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy* (2 ed., hal. 242–246). Taylor & Francis Group.
- Hayes, M. (2006). Policy Making through Disjointed Incrementalism. In G. Morçöl (Ed.), *Handbook of Decision Making* (hal. 40–59). Taylor & Francis Group.
- Heryani, A. (2010). *Paradigma Kebijakan Publik* (Wilson Nadeak (ed.); Pertama). UNPAD Press.
- Howlett, Michael, Ramesh, M. (2003). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford University.
- Islamy, I. (2003). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Morçöl, G. (2006). Decision Making: An Overview of Theories, Contexts, and Methods. In G. Morçöl (Ed.), *Handbook of Decision Making* (hal. 1–18). Taylor & Francis Group.
- Russel, J. M. S. and E. W. (2005). *Introducing Public Administration*. Pearson Longman.

BIODATA PENULIS



Ani Heryani

Lahir di Tasikmalaya, 21 September 1970. Penulis merupakan Sarjana lulusan Ilmu Administrasi Negara STIA Tasikmalaya Tahun 1994, Magister Ilmu Sosial BKU Ilmu Administrasi Universitas Padjadjaran Bandung Tahun 2003, dan pada Tahun 2009 berhasil menyelesaikan Program Doktor Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Bandung.

Pengalaman pekerjaan sebagai Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Tasikmalaya sejak tahun 1994, pernah menjadi Dosen Tidak Tetap di STISIP Tasikmalaya, di STISIP Bina Putera Banjar, Universitas Subang dan Program Pascasarjana Universitas Swadaya Gunungjati Cirebon. Tahun 2014-2022 memperoleh tugas tambahan selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Tasikmalaya.

Aktif di berbagai organisasi kemasyarakatan antara lain Dewan Pakar KPPI, Presidium KAHMI Kabupaten Tasikmalaya, Dewan Penasihat TULIP (Teras Untuk Literasi Perempuan). Aktif pula sebagai narasumber di berbagai Seminar, bimbingan teknis maupun diklat.

Penghargaan yang pernah di raih antara lain Gender Champion Kota Tasikmalaya Tahun 2018.

Penulis memiliki kompetensi bidang penelitian kualitatif dan telah memperoleh gelar non akademik CIQaR (*Certified International*

Qualitative Research) dan CPHCM (*Certified Profesional Human Capital Management*). Selain itu penulis memiliki kepakaran sesuai disiplin ilmunya di bidang sosial politik, kebijakan dan manajemen publik. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif menulis buku, book chapter dan artikel di beberapa Jurnal Ilmiah terindeks dan telah menerbitkan tulisannya di Jurnal Internasional bereputasi.

Google Scholar :

<https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=IzLHFTEAAAAJ>

BAB 9

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Dr. Ade Iskandar, SIP, M.Si

ade.isk.tasik@gmail.com

A. Implementasi Sebagai Tahapan Kebijakan Publik

Beberapa ahli mengemukakan tahapan kebijakan publik yang berbeda-beda, namun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama bermaksud menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan proses yang tidak berdiri sendiri tetapi memiliki tahapan yang cukup panjang dan kompleks.

W. Jenkin dalam (Heryani 2010) mengemukakan tahapan kebijakan sebagai berikut :

- *Initiation*
- *Information*
- *Consideration*
- *Decision*
- *Implementation*

- *Evaluation*
- *Termination*

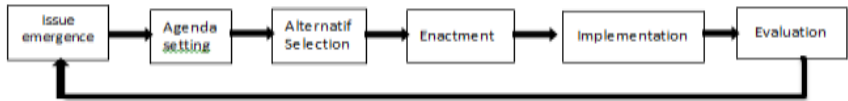
B.W. Hogwood and L. A Gunn, dalam (Heryani 2010) mengemukakan tahapan kebijakan publik terdiri dari :

- *Deciding to decide (Issue search or agenda-setting)*
- *Deciding how to decide (issue filtration)*
- *Issue definition*
- *Forecasting*
- *Setting objectives and priorities*
- *Options analysis*
- *Policy implementation, monitoring and control*
- *Evaluation and review*
- *Policy maintenance, succession and termination*

Birkland menggambarkan tahapan kebijakan publik sebagai sebuah proses yang tidak berujung. Tahapan ini terdiri dari :

- *Issue emergence*
- *Agenda setting*
- *Alternatif Selection*
- *Enactment*

- *Implementation*
- *Evaluation*



Gambar 9.1

The stages or textbook model of the policy process

(Thomas A. Birkland 2005)

Issue publik yang harus segera memperoleh solusi masuk tahapan agenda setting, penyeleksian alternative, penetapan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi .

Dunn dalam (Heryani 2010) : Proses pembuatan kebijakan (*policy making process*) adalah serangkaian tahapan (*fase*) yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, yaitu:

1. Penyusunan (*agenda setting*),
2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*)
3. Adopsi kebijakan (*policy adoption*)
4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), dan

5. Penilaian kebijakan (*policy assessment*)

(Heryani 2010)

Dari beberapa pendapat di atas diketahui bahwa implementasi merupakan tahapan dalam kebijakan publik. Bowman mengemukakan : *“Implementation occurs in the middle of the policy process. It results from the stages that precede it, policy formulation and adoption, and it affects the subsequent stages: evaluation and redesign”*. (Bowman 2008). Implementasi terjadi di tengah-tengah proses kebijakan merupakan tahapan yang mendahuluinya yaitu tahapan perumusan kebijakan dan adopsi dan implementasi mempengaruhi tahapan selanjutnya yaitu evaluasi dan desain ulang.

Implementasi merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan pada tahapan formulasi. Bowman menegaskan lebih lanjut : *“When applied to public policy, implementation is the process of putting into effect or carrying out an authoritative decision of government”*. (Bowman 2008). Pada tahapan ini dilaksanakan kebijakan dan tindakan dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan pada tahapan sebelumnya. *“Implementation puts the objectives of policy adopters into action in an effort to accomplish desired results”* (Bowman 2008)

Mazmanian dan Sabatier dalam (Heryani 2010) mengemukakan bahwa : *“Implementation is the carrying out of a basic policy decision, usually incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or court decisions.* Implementasi adalah Implementasi adalah pelaksanaan kebijakan dasar, biasanya berbentuk undang-undang tetapi juga dapat berupa perintah eksekutif penting atau keputusan pengadilan.

Pendapat lain Howlet dan Ramesh, *“Its is defined as the process whereby programs or policies are carried out; it do notes the translation of plans into practice.”* (Howlett, Michael and Ramesh 2003). Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan program-program dan kebijakan-kebijakan, merupakan penerjemahan dari rencana ke dalam praktik.

Hogwood dan Peters mengemukakan : *“Implementation is therefore the practical process of policy. It is a way of translating policy into action and ensures that the money and other resources of government are put into actual programs of service. For example, when government decides to build a new motorway, this happens because of a decision to accept a particular policy direction, based upon analysis of all the factors involved in the idea to build one”.* (Hogwood, B. W. 2004). Menurut implementasi adalah proses mempraktikkan

keputusan untuk bertindak atas opsi kebijakan tertentu yang disukai, dan ini dianggap sebagai ujung tajam dari kebijakan karena melibatkan koordinasi sumber daya (anggaran dan manusia) yang terkait dengan proses praktis tersebut ke dalam rencana aksi. Implementasi selalu menjadi bagian dari proses pengembangan kebijakan dan merupakan fase yang mengubah kebijakan yang dipilih menjadi tindakan. Artinya tindakan atas alternative yang telah dipilih dalam formulasi kebijakan.

B. Pendekatan Implementasi Kebijakan

Pendekatan yang umum digunakan dalam memahami implementasi kebijakan publik adalah pendekatan top-down dan bottom-up. Pendapat Goggin dalam (Heryani 2010) menyebutkan : *‘Typically, studies are either bottom-up or top-down investigations. The bottom-up and top-down strategies typify implementation research.’* Strategi bottom-up dan top-down melambangkan penelitian implementasi. Lebih lanjut Goggin menjelaskan pendekatan ini :

1. *Top-down research focuses on implementation effect of national or central government controlled variables to the exclusion or heavy deemphasis of other factors*
2. *The bottom-up response to this strategy has been not to investigate formal policies established by a central regime or even, sometimes,*

behavior of the officially prescribed implementation actors. Bottom-up studies start with action at the street level, so to speak and determine through network like analysis just what happens what actions emerges around a policy problem.

(Heryani 2010)

Pendekatan *top-down* berfokus pada efek implementasi dari variable-variabel yang dikendalikan oleh pemerintah nasional atau pusat terhadap pengecualian atau penekanan yang berat terhadap faktor-faktor lain. Sedangkan pendekatan *bottom-up* bukan menyelidiki kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat tetapi dari tingkat bawah dan menentukan jaringan yang terjadi, tindakan apa yang muncul di sekitar masalah kebijakan.

Aaron B. Wildavsky yang menggulirkan alternative pendekatan model *top-down* bahwa :

(1) programs are not totally perfect,

(2) a program may pursue several goals at the same time,

*(3) public administrations are not always transparent and rational,
and*

(4) society is often hostile and contradictory.

(Pressman, J. L. 2004)

Pendekatan top-down menyatakan bahwa program tidak sepenuhnya sempurna, sebuah program dapat mengejar beberapa tujuan pada waktu yang sama, administrasi publik tidak selalu transparan dan rasional, dan masyarakat seringkali bermusuhan dan kontradiktif. Pendapat ini menjelaskan bahwa banyak factor yang berpengaruh pada implementasi kebijakan baik yang berasal dari tahapan perumusan maupun yang muncul pada saat implementasi. Program tidak ada yang sempurna, program dapat dilaksanakan dalam waktu bersamaan tidak perlu berurutan satu sama lain. Publik sebagai sasaran dari kebijakan dapat berbeda-beda respons terhadap kebijakan, akan ada kelompok yang kontradiksi satu sama lain. Hal ini terjadi karena pemahaman yang berbeda, sikap yang berbeda dan kepentingan yang berbeda.

Pressman menjelaskan lebih lanjut : “...*the implementation process involves several institutional, political, and social groups of actors (such as public administration levels, administrative organizations, or affected citizens) and, therefore, it leads to the building of a policy network or policy community that deals with the action programs the policy involves*” (Pressman, J. L.

2004). Dalam proses implemantasi banyak kelompok actor kelembagaan, politik, social yang mengarah pada pembangunan jaringan kebijakan maupun komunitas kebijakan.

Terkait dengan pendekatan bottom-up, Bowman dengan mengacu pada pendapat Wildavsky menjelaskan :
“Bottom-up approaches see implementation through a different set of theoretical and analytical lenses. Starting from the opposite end, bottom-up models focus on the existence of a public problem and the actors connected to it. To understand implementation, bottom-uppers look to the target population and the implementing environment.
(Bowman 2008)

Pendekatan ini melihat implementasi melalui serangkaian lensa teoretis dan analitik yang berbeda. Model bottom-up focus pada keberadaan masalah publik dan aktor yang terhubung dengannya. Untuk memahami implementasi, bottom-upper melihat populasi target dan lingkungan implementasi. Model ini menjelaskan bahwa kebijakan yang sama akan menghasilkan implementasi yang berbeda. Pada tahapan implementasi, kebijakan akan diterjemahkan sesuai dengan keberadaan masalah publik dengan melihat target implementasi kebijakan tersebut.

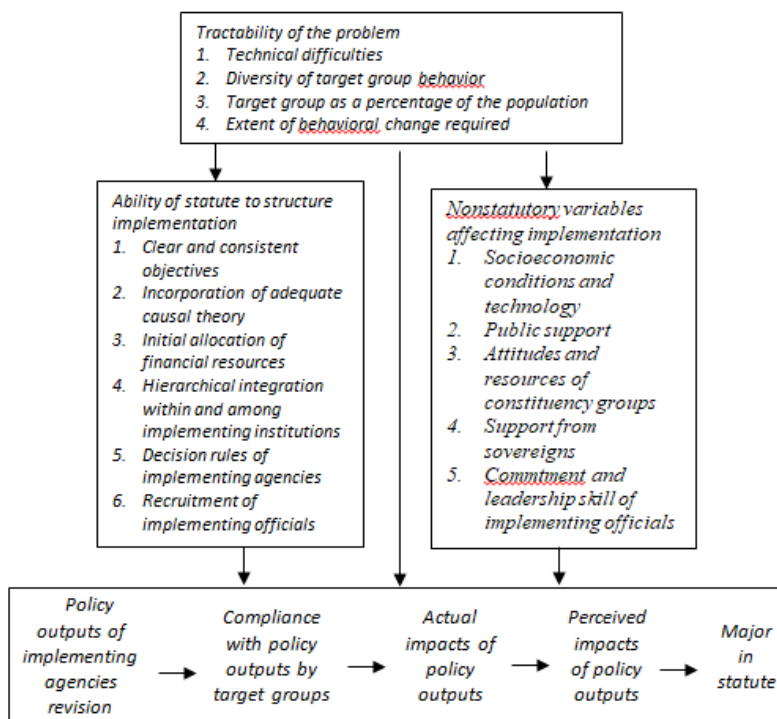
C. Model-Model Implementasi Kebijakan

a. Model dari Mazmanian dan Sabatier

Untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan banyak variable krusial yang mempengaruhinya. Model yang dikembangkan oleh Mazmanian dan Sabatier mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi (Heryani 2010). Variabel yang mempengaruhi tujuan kebijakan adalah :

1. *Tractability of the problem*
2. *Ability of statute to structure implementation*
3. *Non-statutory variables affecting implementation*

Ketiga variabel ini digambarkan sebagai berikut :



Gambar 9.2

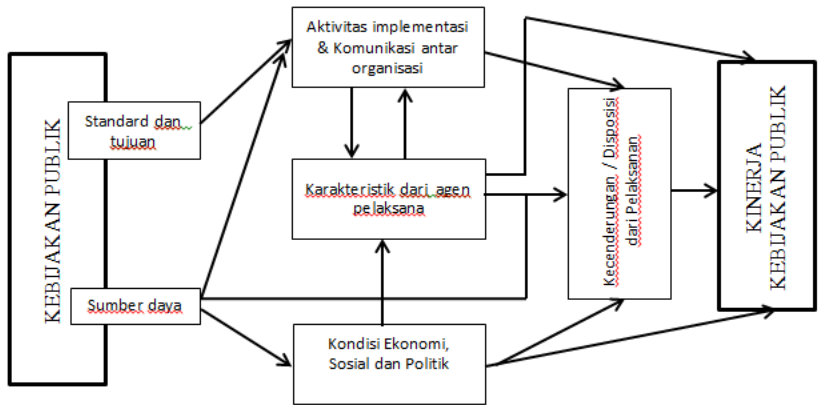
Variabel-variabel proses implementasi
 Sumber : Mazmanian dan Sabatier dalam (Heryani 2010)

Variabel pertama, berupa penelusuran masalah mulai dari kesulitan secara teknis, keanekaragaman perilaku kelompok sasaran sampai dengan tingkat perubahan perilaku. Variabel kedua, berupa kemampuan kebijakan untuk menyusun implementasinya seperti

tujuan yang jelas dan konsisten, alokasi sumber daya, integrasi hierarki, aturan turunannya maupun proses rekrutimen pelaksana kebijakannya. Variabel ketiga, merupakan kondisi dari lingkungan berupa kondisi sosial ekonomi, dukungan politik sikap sumber daya penerima kebijakan, dukungan politik penguasa maupun komitmen dan keterampilan pelaksana kebijakan. Variabel-variabel tersebut mempengaruhi terhadap kebijakan yang dilaksanakan, terhadap uotput dan outcome dari implementasi kebijakan tersebut .

b. Model dari Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn mengembangkan model dengan memperhatikan proses implementasi kebijakan, dan digambarkan sebagai berikut :



Gambar 9.3
Model Proses Implementasi Kebijakan
(Augustino 2014)

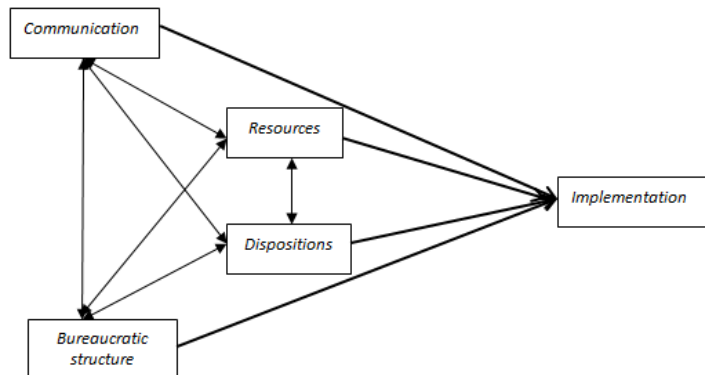
Model implementasi kebijakan ini mengemukakan enam variabel yaitu

- Standar dan tujuan
- Sumber daya
- Aktivitas impementasi dan komunikasi antar organisasi
- Karakteristik dari agen pelaksana
- Kondisi ekonomi, sosial dan politik
- Kecenderungan / disposisi dari pelaksana

Keenam variabel itu membentuk ikatan antara kebijakan dengan kinerja kebijakan.

c. Model dari George C. Edwards III

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edwards III berbicara mengenai faktor-faktor kritis yang mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan, menurutnya: "... *four critical factors or variables in implementing public policy : communication, resources, dispositions or attitudes, and bureaucratic structure.*"(Edwards III 1980). Terdapat empat faktor kritis yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Interaksi antar factor baik interaksi langsung maupun tidak langsung dapat digambarkan sebagai berikut :



(Edwards III 1980)

Gambar 9.4

d. Model dari Charles O. Jones

Model yang dikembangkan Charles O. Jones mengemukakan aktivitas implementasi kebijakan terdiri dari :

1. Organisasi : Pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan
2. Interpretasi : Menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan
3. Penerapan : Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program

(Jones 1996)

Model ini menekankan kebijakan sebagai program dan lebih menekankan pada pelaksana dibandingkan dengan sasaran kebijakan. Pilar-pilar yang harus diperhatikan adalah organisasi pelaksana, mulai dari pembentukan atau penataan organisasi termasuk penataan unit kerja, sumber daya, tugas dan fungsi, serta metode yang dijalankan. Penafsiran terhadap kebijakan terhadap

program, pengarahan yang tepat agar diterima serta penerapannya. Program-program yang dijalankan memerlukan adanya partisipasi masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Selain itu penafsiran kebijakan bukan hanya bagi pelaksana termasuk juga masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

e. Model dari Merilee S. Grindle

Grindle mengembangkan model implementasi yang digunakan di negara-negara berkembang. Menurutnya implementasi kebijakan berdasarkan kerangka pemikirannya ada dua pertanyaan pokok faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu :

Implementing activities influenced by :

a. *Content of Policy*

1. *Interests affected*
2. *Type of benefits*
3. *Extent of change envisioned*
4. *Site of decision making*
5. *Program implementors*
6. *Resources committed*

b. *Context of Implementation*

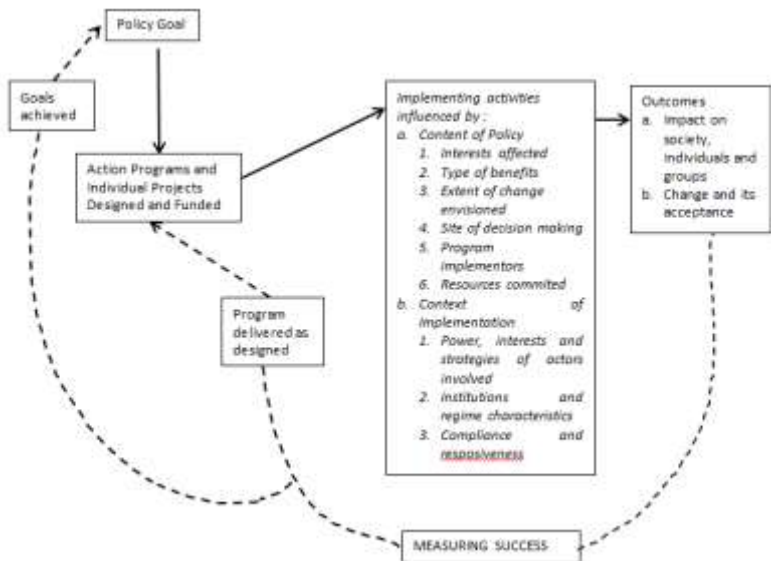
1. *Power, interests and strategies of actors involved*

2. *Institutions and regime characteristics*

3. *Compliance and responsiveness*

(Grindle 1980)

Model implementasi menurut Grindle sebagai proses politik dan administrasi sebagai berikut :



Gambar 9.5

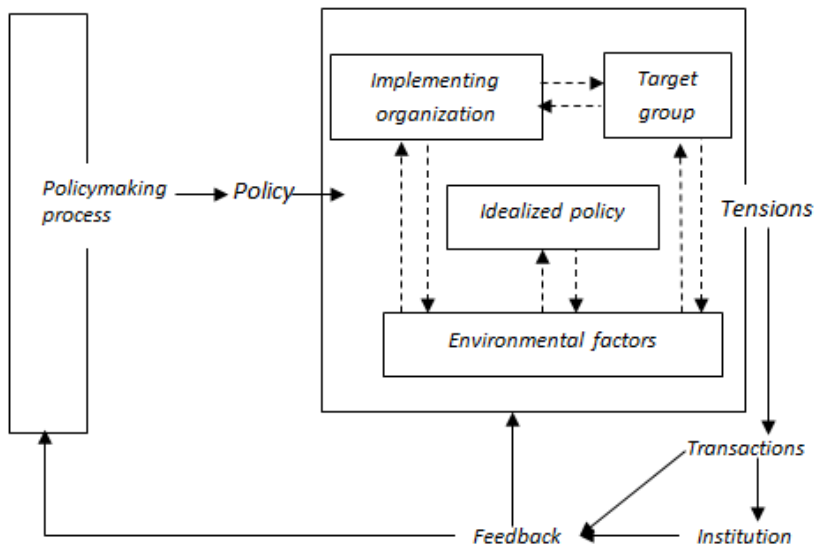
Implementation as a Political

(Grindle 1980)

Aktivitas implementasi dimulai setelah ujian dan sasaran ditetapkan, program-program telah didesain, sumber daya telah tersusun dan didistribusikan.

f. Model dari Smith

Model yang dikembangkan Smith (Quade 1977) merupakan model proses atau alur implementasi kebijakan. Model ini digambarkan sebagai berikut :



Gambar 9.5

Implementation as a Political

(Quade 1977)

Model yang dikembangkan Smith, menjelaskan bahwa implementasi merupakan proses yang terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu :

1. *The idealized policy, that is, the idealized patterns of interaction that those who have defined the policy are attempting to induce.*
2. *The target group, defined as those who are required to adopt new patterns of interaction by the policy. They are the people most directly affected by the policy and who must change to meet its demands.*
3. *The implementing organization. Usually a unit of the government bureaucracy, responsible for implementation of the policy.*
4. *The environmental factors, those elements in the environment that influence or are influenced by the policy implementation.*

(Quade 1977)

Proses pembuatan kebijakan publik menghasilkan kebijakan publik. Kebijakan publik yang telah dibuat diimplementasikan dengan melibatkan komponen yang memiliki korelasi satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Augustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bowman, Ann O'M. 2008. "Policy Implementation." Diedit oleh Evan M. Berman. *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy*. Taylor & Francis Group.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, Merilee S. 1980. "Policy Content and Context in Implementation." In *Politics and Policy Implementation in the Third World*, diedit oleh Merilee S Grindle, 1 ed., 3–34. New Jersey: Princeton University Press.
- Heryani, Ani. 2010. *Paradigma Kebijakan Publik*. Diedit oleh Wilson Nadeak. Pertama. Bandung: UNPAD Press.
- Hogwood, B. W., and B. Guy Peters. 2004. "The Pathology of Public Policy." *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy*. Facts On File, Inc.
- Howlett, Michael and Ramesh, M. 2003. *Studying Public Policy : Policy Cycles and Policy Subsystems*. Canada: Oxford University.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy) - terjemahan*. Diedit oleh Penerjemah Ricky Istamto Nashir Budiman. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pressman, J. L., and A. Wildavsky. 2004. "Implementation." *Encyclopedia of Public Administration & Public Policy*. Facts On

File, Inc.

Quade, Edward S. 1977. *Analysis for Public Decisions*. 3 ed. New York: Elsevier. Inc.

Thomas A. Birkland. 2005. "Models of the Policy Proses." In *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy*, diedit oleh Jack Rabin, 1 ed., 188–91. Boca Raton, USA: Taylor & Francis Group.

BIODATA PENULIS

Ade Iskandar



Lahir di Tasikmalaya, 13 Maret 1969. Penulis merupakan Sarjana lulusan Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tasikmalaya (STISIP Tasikmalaya), Magister Ilmu Administrasi lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Tasikmalaya (STIA YPPT Tasikmalaya)

dan pada Tahun 2014 berhasil menyelesaikan Program Doktor Bidang Ilmu Administrasi Universitas Padjadjaran Bandung.

Pengalaman pekerjaan sebagai Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tasikmalaya (STISIP Tasikmalaya) sampai dengan tahun 2017 dan saat ini menjadi Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Tasikmalaya (STIA YPPT Tasikmalaya).

Penulis memiliki kompetensi bidang penelitian kuantitatif dan telah memperoleh gelar non akademik CIQnR (*Certified International Quantitative Research*). Selain itu penulis memiliki kepakaran sesuai disiplin ilmunya di bidang pemerintahan, kebijakan dan manajemen publik. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif menulis buku dan artikel di beberapa Jurnal Ilmiah terindeks bahkan salah satu tulisannya telah diterbitkan di Jurnal Internasional bereputasi.

Google Scholar :

https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=zLYU2CEAAA_AJ

Email Penulis: ade.isk.tasik@gmail.com

BAB 10

EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

Ari Ramdani

dosenmuda1983@gmail.com

A. Konsep Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan bagian penting dalam siklus kebijakan publik sebagaimana yang dikemukakan oleh (Dye, 2013) yang meliputi: (1) *problem identification*; (2) *formulation*; (3) *legislation*; (4) *implementation*; dan (5) *evaluastion*.

Evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam siklus kebijakan, ketika sebuah kebijakan telah di implementasikan oleh para aktor kebijakan. Namun terkadang tidak selamanya kebijakan publik dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pemerintah itu sendiri. Atas dasar itulah evaluasi kebijakan perlu dilakukan (Wibawa, Samodra; Purbokusumo, Yuyun; Pramusinto, 1994). Dengan evaluasi kebijakan, maka dapat diketahui keberhasilan dan kegagalan dari suatu implementasi kebijakan, sehingga hasil dari evaluasi kebijakan tersebut dapat menjadi bahan perbaikan dan masukan bagi para aktor kebijakan.

Evaluasi kebijakan pada hakekatnya, mempelajari konsekuensi- konsekuensi yang ditimbulkan dari kebijakan publik serta menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan (Lester, James P; Stewart Jr, 2000). Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa domain dari evaluasi kebijakan berfokus pada dampak yang muncul dari kebijakan yang telah di implementasikan baik dampak positif maupun negatif. Disamping itu pula bahwa evaluasi kebijakan merupakan aktivitas penilaian atas keberhasilan maupun kegagalan dari suatu kebijakan. Penilaian atas keberhasilan maupun kegagalan tentunya sangat penting dalam rekomendasi bagi para aktor kebijakan dalam mengambil keputusan kedepannya.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh (Anderson, 2003), bahwa evaluasi kebijakan merupakan penilaian, taksiraan serta estimasi atas implementasi dan dampak dari kebijakan. Sedangkan (O. Jones, 1996) mendefinisikan bahwa evaluasi kebijakan adalah kegiatan atau aktivitas menilai mamfaat dari proses serta program pemerintah. Proses disini merupakan fenomena yang diamati dan diteliti oleh seseorang berdasarkan beberapa ukuran yang eksplisit dan implisit. Jika mengacu pada pendapat O. Jones , bahwa apa yang dikatakan sebagai proses evaluasi merupakan aktivitas menilai program pemerintah mulai dari tahap awal sampai tahap akhir.

Pendapat terkait definisi evaluasi yang dikemukakan (O. Jones, 1996), agak berbeda dengan apa yang disampaikan (Anderson, 2003; Lester, James P; Stewart Jr, 2000) bahwa menurut kedua pakar tersebut, evaluasi lebih cenderung berfokus pada penilaian atas implementasi dan dampak dari kebijakannya.

Begitu pula menurut (Dunn, 2018) yang senada dengan pendapat diatas bahwa evaluasi kebijakan merupakan aktivitas penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya.

Namun menurut (Dye, 2013) bahwa definisi evaluasi kebijakan adalah penilaian efektifitas keseluruhan program nasional dalam memenuhi tujuannya atau penilaian efektifitas dua atau lebih program dalam memenuhi tujuan bersama. Pendapat ini lebih menekankan bahwa evaluasi kebijakan dilihat dari sisi penilaian atas efektifitas dan efisiensi dari suatu program atau kebijakan nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Makna efektifitas disini menurut (Dunn, 2018), adalah berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. Salah satu contohnya adalah misalnya kebijakan kesehatan yang efektif adalah kebijakan penyediaan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu, dengan asumsi bahwa kualitas atau pelaksanaan pelayanan kesehatan adalah hasil yang bernilai (tujuan).

Pendapat diatas diperkuat pula oleh pendapat (Nugroho, 2004) bahwa, evaluasi kebijakan biasanya ditujukan untuk menilai sejauhmana

kefektifan kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan kepada konstituennya.

B. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan Publik

Dari beberapa pendapat diatas dapat diklasifikasikan beberapa type evaluasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh (CDC, 2014), yaitu sebagai berikut:

1. *Evaluating Policy Content*, merupakan tipe evaluasi kebijakan yang mengartikulasikan tujuan kebijakan, implementasi dan logika yang mendasari mengapa kebijakan tersebut akan menghasilkan perubahan yang diinginkan. Tipe evaluasi kebijakan ini berupaya untuk mengevaluasi perkembangan kebijakan yang dapat membantu memahami konteks, konten dan implementasi.
2. *Evaluating Policy Implementation*, merupakan tipe evaluasi kebijakan yang berupaya mengevaluasi apakah sebuah kebijakan yang dilaksanakan sebagaimana mestinya, jika tidak maka mengapa?. Evaluasi implementasi ini dapat memberikan informasi penting tentang hambatan dan fasilitator implementasi atau aktor pelaksana, serta perbandingan antara komponen atau intensitas implementasi yang berbeda.
3. *Evaluating Policy Impact*, merupakan tipe evaluasi kebijakan yang mengevaluasi apakah suatu kebijakan memberikan hasil dan dampak yang sesuai dengan apa yang diinginkan.

Tipe evaluasi implementasi kebijakan merupakan salah satu aspek dari beberapa empat aspek yang ingin diketahui dari konseptual evaluasi kebijakan, yaitu untuk mengetahui: 1). Proses pembuatan kebijakan, 2). Proses implementasi,

3) konsekuensi kebijakan, dan 4). Efektifitas dampak kebijakan (Wibawa, Samodra;

Purbokusumo, Yuyun; Pramusinto, 1994).

C. Tujuan & Fungsi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan dalam pelaksanaannya sudah tentu bukan untuk menyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi kebijakan bertujuan untuk mencari kekurangan dan sekaligus menutup kekurangan. Dengan bahasa lain, evaluasi kebijakan itu tidak berhenti pada pengungkapan sebuah persoalan yang harus diperbaiki, jika ditemukan tetap harus berlanjut berupa pemberian saran atau rekomendasi untuk sebuah perbaikan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan apapun yang dilaksanakan tentunya memerlukan evaluasi, karena evaluasi kebijakan publik memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan.
2. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai dasarnya yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
3. Memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya (Agustino, 2006).

Hasil dari fungsi evaluasi kebijakan tersebut biasanya banyak digunakan oleh pihak pemerintah, organisasi privat, individu atau kelompok-kelompok tertentu yang menggunakannya untuk kepentingan tertentu pula (Kusumanegara, 2010).

D. Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh para evaluator yang terdiri dari dua kelompok yaitu evaluator internal dan

evaluator eksternal (Lester, James P; Stewart Jr, 2000). Evaluator internal biasanya berasal dari lembaga legislatif dan eksekutif beserta cabang-cabangnya/ birokrasi. Sedangkan evaluator eksternal biasanya berasal dari lembaga-lembaga privat, akademisi, media komunikasi massa, kelompok-kelompok penekan, dan organisasi- organisasi kepentingan publik.

Dalam pelaksanaannya, para evaluator menurut (Dunn, 2018) harus memperhatikan karakteristik evaluasi kebijakan dibawah ini, yaitu:

1. *Fokus Nilai*. Evaluasi ditujukan kepada pemberian nilai dari suatu kebijakan, program maupun kegiatan. Evaluasi terutama ditujukan untuk menentukan manfaat atau kegunaan dari suatu kebijakan, program maupun kegiatan, bukan sekedar usaha untuk mengumpulkan informasi mengenai sesuatu hal. Ketetapan suatu tujuan maupun sasaran pada umumnya merupakan hal yang perlu dijawab. Oleh karena itu suatu evaluasi mencakup pula prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran itu sendiri.
2. *Interdependensi Fakta-Nilai*. Suatu hasil evaluasi tidak hanya tergantung kepada “fakta” semata namun juga terhadap nilai. Untuk memberikan pernyataan bahwa suatu kebijakan, program atau kegiatan telah mencapai hasil yang maksimal atau minimal bagi seseorang, kelompok orang ataupun masyarakat haruslah didukung dengan fakta bahwa hasil kebijakan, program dan kegiatan merupakan konsekuensi dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam mengatasi/ memecahkan suatu masalah tertentu. Dalam hal ini kegiatan monitoring merupakan suatu persyaratan yang penting bagi suatu evaluasi.
3. *Orientasi masa kini dan masa lampau*. Evaluasi diarahkan pada hasil yang sekarang ada dan hasil yang diperoleh masa lalu. Evaluasi tidaklah berkaitan dengan hasil yang diperoleh di masa mendatang. Evaluasi bersifat retrospektif, dan berkaitan dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukan (ex-post).

Rekomendasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi tindakan dilakukan (*ex-ante*).

4. *Dualitas Nilai*. Nilai yang ada dari suatu evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena evaluasi dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara. Evaluasi dipandang sebagai suatu rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai-nilai yang ada (misalnya kesehatan) dapat dianggap sebagai intrinsik (diperlukan bagi dirinya) ataupun ekstrinsik (diperlukan karena kesehatan mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan yang lain).

E. Pendekatan-Pendekatan Dalam Evaluasi Kebijakan Publik

Untuk memudahkan evaluator dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan, (Anderson, 2003) memperkenalkan beberapa pendekatan-pendekatan yang dapat dilakukan sebagaimana dibawah ini.

1. *Policy evaluation as a functional activity, is as old as policy itself.*

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Artinya evaluasi kebijakan itu dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan para pembuat kebijakan itu sendiri yang tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan dan ideologi-ideologi tertentu.

Menurut (Winarno, 2012) evaluasi seperti ini akan mendorong terjadinya konflik karena evaluator-evaluator yang berbeda akan menggunakan kriteria- kriteria yang berbeda, sehingga kesimpulannya pun berbeda mengenai kebijakan yang sudah diimplementasikan.

2. *Policy evaluation center on process.*

Tipe evaluasi kebijakan ini memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan-

kebijakan atau efisiensi dalam melaksanakan kebijakan atau program tersebut.

3. *Systematic evaluation*

Evaluasi sistematis berbeda dengan kedua tipe evaluasi sebelumnya. Evaluasi sistematis ini berupaya secara objektif melihat kebijakan-kebijakan yang dijalankan, baik faktor penghambat atau pendukungnya serta melihat sejauhmana tujuan-tujuan dari kebijakan tersebut tercapai. Evaluasi sistematis ini berpijak pada sejauhmana kebijakan tersebut menjawab kebutuhan atau permasalahan masyarakat.

Ada beberapa pertanyaan yang berusaha dijawab melalui evaluasi sistematis ini sebagaimana disampaikan (Winarno, 2012), yaitu Apakah kebijakan yang dijalankan mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya?; Jika tidak, mengapa tujuan tersebut tidak tercapai dengan baik?; Bagaimana dampak dari kebijakan yang tidak terimplementasikan dengan baik? .

Namun tentunya dalam melakukan evaluasi apapun tipe evaluasinya, perlu sebuah alat ukur yang dijadikan sebagai indikator pengukuran evaluasi kebijakan publik.

Ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli berkaitan dengan kriteria pengukuran evaluasi kebijakan publik diantaranya adalah sebagai berikut.

F. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Menurut (Dunn, 2018) bahwa kriteria pengukuran evaluasi kebijakan meliputi efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Kriteria Evaluasi Kebijakan Menurut Dunn

Tipe Kriteria	Pertanyaan	Ilustrasi
Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya, manfaat bersih, rasio <i>cost benefit</i>
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah	Biaya tetap Efektifitas tetap
Perataan	Apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?	Kriteria Pareto, kriteria Kaldor-Hicks, kriteria Rawls.
Responsivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survey warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.	Program

Sumber: (Dunn, 2018)

Sedangkan (Patton, 2016), menyampaikan bahwa kriteria pengukuran evaluasi kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa dimensi dibawah ini,

- a. Kelayakan teknis (*technical feasibility*), kelayakan teknis ini berkaitan dengan informasi yang diperlukan untuk menilai keberhasilan kebijakan atau program, sehingga capain tujuan dari kebijakan dapat diramalkan.
- b. Peluang ekonomi dan finansial (*economic and financial possibility*), hal ini mencakup kriteria peluang ekonomi yang mencakup biaya dan keuntungan dari kebijakan atau program yang dibuat.
- c. Daya dukung politis (*political viability*), daya dukung ini menjelasn bahwa evaluasi kebijakan atau program diukur berdasarkan seberapa besar dukungan para pembuat keputusan, pejabat publik, masyarakat tehadap kebijakan tersebut.
- d. Daya dukung administratif (*administrative operability*), merupakan dukungan sarana maupun prasarana untuk melaksanakan kebijakan dalam mewujudkan ketercapaian tujuan kebijakan itu sendiri.

Lain halnya lagi dengan apa yang disampaikan (Althaus, Catherine; Bridgman, Peter; Davis, 2020), bahwa evaluasi kebijakan publik dapat dilihat dari sisi efektifitasnya dengan tolak ukur beberapa hal dibawah ini, yaitu:

Input – the raw material and resources used to deliver a policy; Proses – the way resources are transformed into service provision; Output – the product discharged from the system;

Outcomes – result of policy implementation for the clients and the others.

Sedangkan dalam teori intervensi, pengukuran evaluasi kebijakan (Mickwitz, 2003), memperhatikan indikator-indikatornya yaitu, *Actors*, *Inputs*, *Outputs*, *Outcomes*. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- *Actors*, yaitu entitas pembuat keputusan misalnya pemerintah ataupun organisasi non pemerintah, dan individu. Aktornya termasuk lembaga yang melaksanakan instrumen kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan.
- *Inputs*, yaitu hal-hal yang digunakan oleh pelaksana kebijakan untuk menghasilkan keluaran, seperti sumber daya manusia atau personil, keuangan atau biaya.
- *Outputs*, yaitu hal-hal yang dihadapi kelompok sasaran.
- *Outcomes*, yaitu tindakan yang diambil oleh kelompok sasaran dan konsekuensi dari tindakan tersebut.

Terlepas dari apapun kriteria evaluasi kebijakan public yang dipergunakan, tentunya tidak terlepas dari situasi dan kondisi lingkungan sosial yang terjadi. Sehingga penggunaan kriteria-kriteria tersebut bersifat fleksibel dan dinamis serta tidak mutlak. Dari uraian dari awal sampai akhir, dipertegas kembali bahwa evaluasi kebijakan public merupakan satu siklus tahapan yang sangat penting dalam siklus kebijakan public.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2006). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (1st ed.). Alfabeta.
- Althaus, Catherine; Bridgman, Peter; Davis, G. (2020). *Australian Policy Handbook* (6th ed.). Routledge. www.trove.nla.gov.au
- Anderson, J. E. (2003). *Public Policymaking* (Fifth). Houghton Mifflin Company.
- CDC. (2014). Step By Step Evaluating Violence and Injury Prevention Policies. In *Visual Culture and Public Policy*. National Center for Injury Prevention and Control.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: an integrated approach* (sixth).
Routledge. www.routledge.com/9781138743847
- Dye, R. T. (2013). *Understanding Public Policy* (S. Chaisson (ed.); 14th ed.).
Pearson. www.pearsonhighered.com
- Kusumanegara, S. (2010). *Model Dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik* (1sted.). Gava Media.
- Lester, James P; Stewart Jr, J. (2000). *Public Policy: An Evolutionary Approach* (second).
Wadsworth Thomson Learning.
- Mickwitz, P. (2003). A Framework for Evaluating Environmental Policy Instruments. *Evaluation*, 9(4), 415–436.
<https://doi.org/10.1177/1356389003094004>
- Nugroho, R. (2004). *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi)* (2nd ed.).
Elex Media Komputindo.

O. Jones, C. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik* (N. Budiman (ed.); 1st ed.). RajaGrafindo Persada.

Patton, C. (2016). *Basic Methods of Policy Analysis and Planning* (Third). Routledge.

Wibawa, Samodra; Purbokusumo, Yuyun; Pramusinto, A. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik* (1st ed.). RajaGrafindo Persada.

Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)* (2nd ed.). CAPS.

BIODATA PENULIS



Ari Ramdani. Seorang penulis sekaligus sekaligus sebagai dosen pada perguruan tinggi STIA YPPT Priatim Tasikmalaya. Di Lembaga Pendidikan tinggi ini , penulis menjabat sebagai Ketua Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara. Selain itu penulis memiliki ketertarikan dibidang Ilmu Administrasi Publik khususnya pada topik-topik *Public Policy, Public Service, Governance, Politics*. Dalam rangka memperdalam keilmuannya, kini penulis sedang melanjutkan studi S3 di bidang ilmu yang sama. Beberapa pemikiran penulis telah banyak dipublikasikan dalam bentuk *Book Chapter* diantaranya yaitu

1. Reformasi Administrasi Publik.
2. Pengantar Administrasi Publik.
3. Good Governance Dalam Pelayanan Publik.
4. Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik
5. Manajemen Pelayanan Publik di Indonesia
6. Pengantar Ilmu Politik

Book Chapter Kebijakan Publik ini, merupakan buku ke-7 yang telah ditulisnya. Karya-karya penulis telah tercatat di Kemenkumham dengan diterbitkannya beberapa HAKI. Disamping itu, kompetensi sebagai penulis telah teruji dengan diraihnya gelar non akademik yaitu CBPA (Certified Book & Paper Authorship

BAB 11

PENDEKATAN ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

Dr. Fitri Kurniangsih, S.Sos., M.Si.

fitrikurnianingsih@umrah.ac.id

A. Pengertian Pendekatan

Pendekatan adalah suatu cara atau metode yang digunakan dalam menghadapi suatu masalah atau situasi tertentu dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Pendekatan dapat *berupa pendekatan teoritis, konseptual, metodologis, atau praktis*. Pendekatan juga bisa merujuk pada cara seseorang atau sebuah kelompok dalam memandang atau menghadapi suatu masalah atau situasi. Berikut adalah pengertian pendekatan menurut beberapa ahli:

1. Robert R. Blake dan Jane S. Mouton; Menurut Blake dan Mouton, pendekatan adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang individu atau kelompok dalam menghadapi situasi tertentu dengan mempertimbangkan kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai (Blake & Mouton, 1981).
2. George W. Goethals dan Georgia Jones Sorenson; Menurut Goethals dan Sorenson, pendekatan adalah pengaturan atau perencanaan yang sistematis dalam mencapai tujuan yang diinginkan (Goethals & Sorenson, 2006).
3. Bugental; Menurut Bugental, pendekatan adalah serangkaian kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai

tujuan yang spesifik dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan (Bugental, 2000).

4. Ozernoy; pendekatan adalah suatu cara yang digunakan untuk menghadapi masalah dan memilih solusi terbaik berdasarkan pemahaman yang tepat tentang situasi yang dihadapi (Ozernoy, 2016).

11.1. Dinamika Perkembangan Pendekatan Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik telah mengalami perkembangan yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Berikut adalah beberapa perkembangan penting dalam analisis kebijakan publik diantaranya:

A.1. Pergeseran dari pendekatan top-down ke pendekatan bottom-up

Sebelumnya, kebijakan publik cenderung dihasilkan oleh pemerintah pusat dan diterapkan oleh pemerintah daerah. Namun, sekarang ini, pendekatan kebijakan publik sudah bergeser ke bawah dengan partisipasi masyarakat dan lembaga non-pemerintah. Hal ini memberikan peluang pada semua pihak untuk terlibat dalam mengambil keputusan dan merealisasi kebijakan publik. Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan dinamika sosial dan politik yang berkembang, pendekatan top-down dalam pengambilan kebijakan publik telah mengalami pergeseran ke pendekatan bottom-up. Pergeseran ini terjadi karena masyarakat lebih terlibat dalam mengambil keputusan publik yang secara langsung berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.

Pendekatan top-down dalam pengambilan kebijakan publik lebih menitikberatkan kepada kepentingan pemerintah dan elite politik, yang seringkali mengabaikan kepentingan masyarakat. Kebijakan publik yang dihasilkan cenderung bersifat sentralistik dan memungkinkan adanya kesenjangan sosial antara pemerintah dan rakyat. Terkadang, kebijakan publik yang dihasilkan juga terlalu

umum atau tidak mempertimbangkan kondisi lokal atau regional yang dapat mempengaruhi implementasinya. Oleh karena itu, pergeseran dari pendekatan top-down ke pendekatan bottom-up penting dilakukan untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi kebijakan publik.

Dalam pendekatan bottom-up dalam pengambilan kebijakan publik, masyarakat dianggap sebagai pihak yang memiliki informasi terpenting mengenai kondisi dan masalah yang mereka hadapi sehari-hari. Dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, kebijakan publik yang dihasilkan akan lebih representatif dan mampu menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara efektif. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga dapat membantu meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi. Pergeseran ke pendekatan bottom-up juga memberi kesempatan kepada organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta untuk turut serta dalam pengambilan keputusan publik. Secara keseluruhan, pergeseran dari pendekatan top-down ke pendekatan bottom-up merupakan penting dilakukan untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara lebih efektif dan efisien.

A.2. Pendekatan berbasis Bukti

Pentingnya penggunaan data berbasis bukti dalam proses pengambilan keputusan telah mengalami peningkatan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan publik didasarkan dengan argumen yang kuat dan data terukur sehingga lebih efektif dalam mendorong perubahan. Pendekatan berbasis bukti (evidence-based approach) adalah suatu pendekatan dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada bukti empiris dan data kuantitatif dan kualitatif yang tersedia (Khalil et al., 2016).

Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan kebijakan yang didukung oleh informasi dan bukti yang akurat, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dan kegagalan dalam pengambilan keputusan publik. Pendekatan ini memiliki beberapa aspek penting, di antaranya adalah:

1. Membangun sistem pencarian informasi dan evaluasi data berkualitas bertujuan untuk mengembangkan kebijakan publik yang efektif dan efisien.
2. Menjalani kerja sama dengan para ahli dari berbagai disiplin ilmu untuk mengembangkan metodologi dan teknik evaluasi kebijakan yang lebih baik.
3. Mengintegrasikan berbagai jenis data kuantitatif dan kualitatif, termasuk informasi yang disajikan dalam bentuk grafik, gambar dan statistik untuk memudahkan visualisasi dan pengambilan keputusan.
4. Menetapkan sistem evaluasi untuk memantau implementasi kebijakan dan hasilnya, dan memberikan celah untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kebijakan publik yang telah dihasilkan.

Pendekatan berbasis bukti digunakan oleh organisasi pemerintah, lembaga akademik, LSM, maupun organisasi masyarakat sipil dalam pengembangan dan evaluasi kebijakan publik. Kebijakan yang dihasilkan dari pendekatan ini dianggap lebih kokoh karena didukung oleh analisis yang lebih mendalam dan rinci. Dalam era globalisasi ini, pendekatan berbasis bukti sangat penting di mana informasi sangat mudah diakses oleh siapa saja. Hal itu memudahkan para pengambil keputusan untuk terhubung dengan sumber data yang diperlukan guna mengembangkan kebijakan dengan landasan yang kuat.

A.3. Inovasi Kebijakan

Inovasi kebijakan: inovasi kebijakan menjadikan kebijakan publik lebih efektif mengatasi masalah kompleks di masyarakat. Inovasi kebijakan diterapkan dengan mengintegrasikan teknologi

dan ide-ide dalam pengambilan keputusan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih efektif. Inovasi kebijakan (policy innovation) adalah suatu proses dimana sebuah program atau kebijakan yang baru dikembangkan untuk mengatasi masalah sosial atau ekonomi yang baru atau yang sudah ada dan belum terselesaikan (Janssen & Helbig, 2018). Inovasi kebijakan biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan, seperti identifikasi masalah yang dihadapi, pengumpulan data dan informasi, analisis data, pengembangan solusi alternatif, pengujian program atau kebijakan, dan penyebaran informasi tentang program atau kebijakan tersebut. Inovasi kebijakan sangat penting karena dapat membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan dampak kebijakan publik. Dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, inovasi kebijakan diperlukan untuk menghadapi tantangan dan peluang yang baru. Beberapa contoh inovasi kebijakan yang dapat memberi dampak positif untuk pembangunan sosial dan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik Berbasis Teknologi dan Data: Penggunaan teknologi dan pengumpulan data yang akurat dapat membantu pemerintah dalam memahami permasalahan sosial dan menentukan solusi yang paling efektif dan efisien. Kebijakan publik seperti Smart City, dan e-government adalah contoh inovasi kebijakan yang mengintegrasikan teknologi dan data untuk memperbaiki pelayanan publik.
2. Inovasi Pendidikan: Kebijakan inovatif bidang pendidikan meliputi program-program pendidikan yang baru, pembaruan kurikulum, peningkatan kualitas guru, dan program pre-kelas. Inovasi kebijakan di bidang pendidikan dapat membantu meningkatkan kualitas dan kualifikasi sumber daya manusia, yang merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
3. Kebijakan Publik Inklusif: Inklusi sosial dan ekonomi yang merata penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan publik inklusif bertujuan untuk

menciptakan akses dan peluang yang sama bagi semua orang dalam masyarakat, termasuk golongan marginalisasi dan minoritas.

4. Kebijakan Pola Hidup Sehat: Inovasi kebijakan dalam bidang kesehatan dapat membantu meningkatkan kesehatan masyarakat dengan cara mendorong pola hidup sehat dan aktif, mempromosikan adopsi gaya hidup sehat, termasuk diet seimbang, olah raga rutin dan tidur yang cukup.

Dalam menyusun kebijakan yang inovatif, pemerintah, lembaga swasta dan masyarakat harus saling bekerja sama dalam membangun solusi dan menentukan tindakan yang efektif dalam menjawab tantangan yang dihadapi.

A.4 Peran aktif dari masyarakat

Kebijakan publik tidak lagi hanya melibatkan pemerintah sebagai pengambil keputusan, melainkan masyarakat dan lembaga publik dapat berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi ini memberikan kepastian bagi pemerintah dan masyarakat dalam merancang kebijakan publik yang melibatkan kepentingan semua pihak (Hogue, 1993). Peran aktif masyarakat dalam pendekatan analisis kebijakan publik sangat penting untuk mencapai kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa peran aktif masyarakat dalam pendekatan analisis kebijakan publik:

1. Membantu dalam proses pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk analisis kebijakan publik.
2. Memberikan umpan balik tentang kebijakan yang telah diterapkan untuk membantu memperbaiki kebijakan tersebut di masa mendatang.
3. Memberikan masukan dan saran tentang kebijakan yang perlu ditetapkan untuk menangani masalah tertentu.
5. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan publik yang telah diterapkan untuk melihat apakah kebijakan tersebut telah mencapai tujuannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

6. Memberikan dukungan dan partisipasi aktif dalam implementasi kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pendekatan analisis kebijakan publik, maka kebijakan publik yang dihasilkan akan lebih akurat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan lebih mudah diterapkan. Hal ini akan membantu menciptakan kebijakan publik yang efektif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

A.5. Fokus pada konsultasi dan stakeholder

Langkah awal kebijakan publik adalah mengidentifikasi masalah yang harus diselesaikan. Kemudian, para pemangku kepentingan harus dilibatkan oleh kebijakan publik demi meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan tersebut (Brugha & Varvasovszky, 2000). Dalam keseluruhan, perkembangan dalam analisis kebijakan publik semakin melibatkan masyarakat dan mendukung pembangunan suatu tatanan yang lebih baik bagi semua pihak. Terus beradaptasi pada perubahan dan menciptakan inovasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini, merupakan kunci dari keberhasilan dalam analisis kebijakan publik. Dalam pendekatan kebijakan publik, konsultasi dan melibatkan stakeholder sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang responsif, partisipatif, dan efektif. Konsultasi merupakan proses mendapatkan pendapat dan masukan dari berbagai kelompok stakeholder yang terkait dengan kebijakan yang akan dibentuk atau diubah.

Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fokus pada konsultasi dan stakeholder:

- a. Identifikasi stakeholder yang relevan: Stakeholder adalah pihak yang terkena dampak dan memiliki kepentingan terhadap kebijakan publik yang dibuat. Sebelum melakukan konsultasi, penting untuk mengidentifikasi stakeholder yang relevan dan terlibat dalam kebijakan tersebut.
- b. Melibatkan stakeholder sejak awal: Sejak awal proses pembuatan kebijakan, stakeholder harus dilibatkan untuk

memberikan masukan dan saran agar kebijakan lebih responsif terhadap kepentingan dan kebutuhan stakeholder.

- c. Penuhi kebutuhan stakeholder: Dalam melakukan konsultasi, perlu memperhatikan kebutuhan stakeholder dan memberikan informasi yang cukup untuk memungkinkan mereka memberikan masukan secara terinformasi.
- d. Berikan kepastian: Setelah konsultasi selesai, penting untuk memberikan kepastian kepada stakeholder mengenai tindak lanjut yang akan diambil atas masukan dan saran yang diberikan.

Melibatkan stakeholder dalam pendekatan kebijakan publik akan membantu mendapatkan banyak sudut pandang yang beragam dan menghasilkan kebijakan yang lebih memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini juga dapat mengurangi resistensi terhadap implementasi kebijakan dan meningkatkan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan tersebut.

B. Pentingnya Pendekatan Analisis Kebijakan Publik

Pendekatan dalam analisis kebijakan publik sangat penting karena dapat membantu dalam beberapa hal sebagai berikut:

B.1. Memahami masalah dengan lebih baik

Pendekatan memungkinkan para pengambil kebijakan untuk memahami masalah dengan lebih baik, termasuk penyebab dan karakteristik masalah yang dihadapi. Hal ini membantu mereka dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan akurat. Pendekatan dalam analisis kebijakan publik dapat membantu para pengambil kebijakan memahami masalah yang dihadapi dengan lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan, Pendekatan dalam analisis kebijakan publik dapat membantu para pengambil kebijakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk memahami masalah yang dihadapi. Data

dan informasi dapat diperoleh melalui metode survei, observasi, interview, atau studi literatur.

2. Analisis menyeluruh terhadap data dan informasi yang diperoleh, Setelah berhasil mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, maka pengambil kebijakan harus juga melakukan analisis menyeluruh terhadap data tersebut. Analisis dapat meliputi identifikasi penyebab masalah, karakteristik masalah, dan dampak dari masalah tersebut.
3. Melibatkan stakeholders terkait, Pendekatan dalam analisis kebijakan publik juga harus mempertimbangkan pendapat dan pandangan dari berbagai pihak yang terkait dengan masalah tersebut. Dalam hal ini, para pengambil kebijakan dapat melakukan proses konsultasi dengan stakeholders terkait, seperti masyarakat umum, kelompok minoritas, dan perwakilan pemerintah atau swasta.

Dengan cara-cara tersebut, pengambil kebijakan dapat memahami masalah yang dihadapi dengan lebih baik dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

B.2. Memperhitungkan kepentingan berbagai pihak

Pendekatan yang diterapkan dalam analisis kebijakan publik juga harus memperhitungkan kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut. Ini meliputi kepentingan pemerintah, swasta, masyarakat umum, kelompok minoritas, dan lain sebagainya. Dalam melakukan analisis kebijakan publik, ketidakadilan dan ketimpangan dapat diperhatikan dan dihindari. Pendekatan dalam analisis kebijakan publik juga harus memperhitungkan kepentingan berbagai pihak yang terkait dengan kebijakan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan publik dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, serta meminimalkan potensi dampak negatif pada pihak-pihak yang terkena imbas. Beberapa cara yang dapat

dilakukan untuk memperhitungkan kepentingan berbagai pihak antara lain:

1. Memetakan stakeholders terkait; Pengambil kebijakan harus memetakan stakeholders terkait dengan masalah yang dihadapi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui siapa saja pihak-pihak yang terdampak dan apa saja kepentingan mereka terhadap masalah tersebut.
2. Menentukan kriteria prioritas kebijakan; Setelah mengetahui kepentingan masing-masing pihak, selanjutnya pengambil kebijakan harus menetapkan kriteria prioritas dalam menentukan kebijakan. Kriteria prioritas ini dapat berupa urgensi, dampak, hubungan timbal balik, dan lain sebagainya.
3. Membuat proses konsultasi dengan stakeholders terkait; Pengambil kebijakan harus memperhatikan pandangan para stakeholders terkait dengan kebijakan yang akan diambil. Pengambilan keputusan yang melibatkan beberapa pilihan, dapat dilakukan dengan cara konsultasi langsung dengan stakeholders terkait. Dalam proses konsultasi, para pengambil kebijakan dapat meminta masukan, saran, atau pandangan tentang kebijakan.

Dengan memperhitungkan kepentingan berbagai pihak, pengambil kebijakan dapat merumuskan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan. Hal ini dapat membantu memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B.3. Memastikan kebijakan yang efektif dan efisien

Dalam perumusan kebijakan, pendekatan yang tepat juga harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Kebijakan publik yang efektif dan efisien dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat tata kelola pemerintahan. Dalam memastikan kebijakan yang efektif dan efisien, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain:

1. Melakukan analisis kebutuhan: Sebelum membuat kebijakan, perlu dilakukan analisis untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dan mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan.
2. Membuat tujuan yang jelas: Setelah mengetahui masalah, perlu ditetapkan tujuan yang jelas dan terukur yang diharapkan dapat dicapai melalui kebijakan tersebut.
3. Melibatkan pemangku kepentingan: Pemangku kepentingan seperti masyarakat, pakar, maupun pihak-pihak terkait lainnya perlu dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat dapat lebih terarah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.
4. Menentukan indikator keberhasilan: Dalam mengevaluasi keefektifan dan efisiensi kebijakan, perlu ditentukan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan dinilai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
5. Mengukur keberhasilan: Dilakukan evaluasi secara terus-menerus untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi kebijakan yang telah dibuat. Dari hasil evaluasi, dapat dilakukan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

B.4. Memperhatikan keberlanjutan kebijakan

Pengambilan kebijakan harus juga memperhatikan aspek keberlanjutan kebijakan dalam jangka panjang. Hal ini akan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang. Memperhatikan keberlanjutan kebijakan adalah penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah dibuat dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memastikan keberlanjutan kebijakan antara lain:

1. Membuat kebijakan yang fleksibel: Kebijakan yang fleksibel dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

2. Melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkala: Evaluasi kebijakan secara berkala dapat membantu mengidentifikasi masalah yang muncul dan memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian kebijakan.
3. Melibatkan pemangku kepentingan: Melibatkan pemangku kepentingan dalam pembuatan kebijakan atau perbaikan kebijakan dapat memberikan masukan yang berharga dan meningkatkan penerimaan dan kepatuhan terhadap kebijakan.
4. Menyediakan sumber daya yang cukup: Kebijakan yang baik membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai seperti anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur agar dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang.
5. Mempertimbangkan dampak kebijakan: Kebijakan harus dipertimbangkan dampaknya dalam jangka panjang untuk memastikan bahwa kebijakan tidak mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

B.5. Mengurangi risiko konflik

Dalam melakukan analisis kebijakan publik, pendekatan yang tepat juga harus mempertimbangkan risiko timbulnya konflik. Hal ini dilakukan dengan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dengan kebijakan yang diambil. Dengan demikian, kebijakan publik dapat dijadikan sebagai alat untuk mereduksi perbedaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengurangi risiko konflik dalam kebijakan dapat dilakukan dengan beberapa tindakan seperti:

1. Membuat kebijakan yang inklusif: Kebijakan yang inklusif akan mengakomodasi kepentingan semua pemangku kepentingan dan menghindari kebijakan yang hanya menguntungkan sebagian kecil dari kelompok tertentu.
2. Melakukan konsultasi dan dialog terbuka: Konsultasi dan dialog terbuka dengan semua pihak yang terkait dapat memberikan masukan dan ide untuk meminimalkan risiko konflik.

3. Menggunakan data dan informasi yang akurat: Penggunaan data dan informasi yang akurat dapat membantu pembuatan kebijakan yang tepat dan efektif sehingga dapat mengurangi risiko konflik.
4. Menyediakan akses informasi secara terbuka: Memberikan akses informasi dan transparansi mengenai kebijakan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan dan menghindari persepsi bahwa kebijakan dibuat di balik pintu tertutup.
5. Menyelesaikan masalah secara damai: Jika konflik terjadi, upayakan untuk menyelesaikan masalah secara damai melalui mediasi dan dialog. Hal ini dapat menghindari eskalasi konflik yang lebih besar dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih damai dan stabil.

C. Pendekatan Ilmiah Analisis Kebijakan Publik

C.1. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris adalah salah satu pendekatan dalam penelitian yang mengedepankan data empiris sebagai dasar untuk mendapatkan pengetahuan dan bukti dalam pengambilan keputusan. Berikut adalah pengertian pendekatan empiris menurut para ahli:

1. Max Weber; Menurut Max Weber, pendekatan empiris adalah pendekatan yang mengutamakan data observasi dan eksperimen sebagai dasar untuk membuat generalisasi dan memberikan penjelasan atas peristiwa yang terjadi pada sebuah masyarakat (Weber, 1974).
2. John Stuart Mill; John Stuart Mill menyebutkan bahwa pendekatan empiris merupakan cara untuk memperoleh pengetahuan melalui pengalaman dan observasi. Dalam pendekatan ini, generalisasi dibentuk berdasarkan fakta dan bukti yang didapat dari pengalaman dan observasi (Mill, 2008).
3. Roberts Kaplan; Kaplan mengemukakan bahwa pendekatan empiris berfokus pada observasi dan pengalaman sebagai dasar

untuk mendapatkan pengetahuan yang akurat. Metode observasi dan eksperimen digunakan untuk mengumpulkan data empiris yang kemudian dapat dipakai untuk membuat penjelasan yang rasional (Kaplan, 1986).

4. Emile Durkheim; Emile Durkheim menyebutkan bahwa pendekatan empiris adalah pendekatan yang menggunakan data empiris untuk membuat generalisasi dan mengambil kesimpulan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini, generalisasi dibentuk berdasarkan data empiris yang dikumpulkan melalui metode observasi dan eksperimen (Darkheim, 2013).

Secara umum, para ahli sepakat bahwa pendekatan empiris mengacu pada penggunaan data empiris sebagai dasar dalam penelitian. Metode observasi dan eksperimen digunakan untuk mengumpulkan data, yang kemudian dianalisis untuk mencapai generalisasi dan kesimpulan. Pendekatan ini muncul sebagai alternatif untuk pendekatan teoritis yang bertumpu pada asumsi dan premis yang belum tentu diuji secara empiris. Pendekatan empiris dalam analisis kebijakan publik adalah pendekatan yang menggunakan data empiris untuk menganalisis dan mengevaluasi kebijakan publik. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil analisis untuk menentukan keefektifan dan efisiensi kebijakan publik yang sedang diimplementasikan atau diusulkan. Pendekatan empiris dalam analisis kebijakan publik biasanya melibatkan empat langkah penting:

1. Pengumpulan data empiris: Langkah pertama dalam pendekatan empiris adalah pengumpulan data empiris. Data ini dapat diperoleh melalui survei, wawancara, atau pengamatan.
2. Analisis data: Setelah data empiris terkumpul, langkah kedua adalah analisis data. Dalam menjalankan analisis data, dilakukan pengolahan data dengan teknik-teknik statistik yang tepat. Melalui analisis ini akan dapat dihasilkan informasi yang akurat dan detail terkait dengan kebijakan publik yang dipelajari.

3. Interpretasi hasil analisis: Selanjutnya, hasil dari analisis data akan diinterpretasikan. Interpretasi dilakukan agar data tersebut dapat disederhanakan dan diterjemahkan dalam bentuk yang dapat dipahami oleh para pengambil keputusan.
4. Penentuan kebijakan: Langkah terakhir dalam pendekatan empiris adalah penentuan kebijakan publik. Hasil dari analisis data dan interpretasi akan digunakan sebagai dasar dalam mengambil kebijakan yang paling sesuai untuk mengatasi permasalahan dan opsi kebijakan lainnya.

Pendekatan empiris dalam analisis kebijakan publik telah terbukti efektif dalam menghasilkan kebijakan publik yang efektif dan efisien. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan data empiris dalam analisis kebijakan publik telah meningkat secara signifikan, karena telah ditemukan bahwa pendekatan ini sangat membantu dalam menghasilkan kebijakan publik yang lebih baik dan lebih efektif.

Salah satu contoh pendekatan empiris dalam analisis kebijakan publik di Indonesia adalah studi kasus penelitian yang dilakukan oleh Alamsyah dan Raharjo (2019) mengenai dampak kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terhadap akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, focus group discussion, dan studi dokumentasi. Responden yang diwawancara dalam penelitian ini adalah pihak terkait dalam pelaksanaan program JKN di Indonesia seperti BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan publik dan swasta, serta masyarakat yang menjadi peserta JKN.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan JKN memberikan dampak positif terhadap akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Peningkatan akses terlihat dari peningkatan jumlah peserta JKN serta peningkatan penggunaan fasilitas kesehatan yang terdaftar dalam JKN. Sementara itu, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terlihat dari peningkatan ketersediaan

obat dan peralatan medis, serta peningkatan kualitas pelayanan dari tenaga kesehatan. Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai dampak kebijakan JKN terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah dalam perbaikan kebijakan JKN serta dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya mengenai kebijakan publik di Indonesia.

C.2. Pendekatan Valuatif

Pendekatan valuatif adalah salah satu pendekatan dalam penelitian yang memfokuskan pada nilai atau norma yang dianut oleh masyarakat atau kelompok tertentu. Berikut adalah pandangan para ahli mengenai pendekatan valuatif:

1. Robert Dahl; Menurut Robert Dahl, pendekatan valuatif bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan publik berdasarkan nilai dan prinsip yang dianggap penting oleh masyarakat. Dalam pendekatan ini, pengambilan keputusan didasarkan pada nilai dan kepentingan sosial yang mendasar (Dahl, 2017).
2. Amy Gutmann; Amy Gutmann berpendapat bahwa pendekatan valuatif berfokus pada diskusi dan negosiasi antara berbagai nilai yang berbeda dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini, pengambilan keputusan didasarkan pada konsensus dan kompromi atas berbagai nilai yang berbeda.
3. John Rawls; John Rawls menyebutkan bahwa pendekatan valuatif bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan dalam kebijakan publik. Dalam pendekatan ini, setiap individu harus diperlakukan secara adil dan setara dalam kebijakan yang diambil (Rawls, 1991).
4. Michael Walzer; Michael Walzer berpendapat bahwa pendekatan valuatif berfokus pada nilai-nilai kultural dan moral yang dianut oleh suatu kelompok dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini, kebijakan publik harus memperhatikan nilai dan norma yang berlaku dalam kelompok tertentu (Walzer, 1970).

Secara umum, para ahli sepakat bahwa pendekatan valuatif memfokuskan pada nilai dan norma yang dianggap penting oleh

masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam pendekatan ini, pengambilan keputusan harus mempertimbangkan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesetaraan sosial. Pendekatan valuatif dalam analisis kebijakan publik merupakan pendekatan yang digunakan untuk menilai kebijakan publik berdasarkan pada nilai-nilai dan kriteria-kriteria tertentu. Pendekatan ini menekankan pentingnya penggunaan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk menilai efektivitas, efisiensi, kesetaraan, dan keadilan dari kebijakan publik tersebut. Proses valuasi awal ditujukan untuk mengidentifikasi nilai atau kriteria yang paling penting dalam pengambilan keputusan. Kriteria yang diberikan meliputi aspek seperti biaya, manfaat, dampak lingkungan, dampak sosial, dan efeksi dari kebijakan publik. Kemudian, nilai atau bobot diberikan pada setiap kriteria tersebut agar dapat dibandingkan secara lebih objektif dalam pengambilan keputusan.

Dalam pendekatan valuatif, sering digunakan beberapa metode penilaian seperti cost-benefit analysis (CBA), cost-effectiveness analysis (CEA), dan multi-criteria analysis (MCA). CBA digunakan untuk menilai keuntungan dan biaya dari kebijakan publik dari sudut pandang ekonomi. CEA digunakan untuk membandingkan kebijakan yang berbeda dalam hal biaya dan tingkat keberhasilannya mencapai tujuan tertentu. Sedangkan MCA digunakan untuk membandingkan kebijakan dari sudut pandang multi-kriteria, dengan mempertimbangkan beberapa kriteria seperti efektivitas, efisiensi, dampak sosial, dan lingkungan. Pendekatan valuatif tidak sepenuhnya menyederhanakan kebijakan publik menjadi angka dan statistik, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai dan pandangan stakeholder yang berbeda.

Hal ini memungkinkan para pengambil keputusan untuk mempertimbangkan berbagai perspektif dan menilai kebijakan publik berdasarkan pada nilai-nilai masyarakat yang berbeda dan beragam. Secara keseluruhan, pendekatan valuatif merupakan pendekatan yang penting dalam menganalisis kebijakan publik.

Pendekatan ini digunakan oleh para pengambil keputusan untuk mengevaluasi kebijakan publik dan menentukan apakah kebijakan publik tersebut efektif, efisien, adil, dan sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Salah satu contoh pendekatan valuatif dalam analisis kebijakan publik di Indonesia adalah studi kasus penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti dan Wulandari (2019) mengenai evaluasi kebijakan program pemberian bantuan sosial untuk masyarakat miskin di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan valuatif yang fokus pada nilai-nilai yang diterapkan dalam kebijakan, seperti keadilan, efektivitas, dan efisiensi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberian bantuan sosial untuk masyarakat miskin di Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya efektif dan efisien. Meskipun program tersebut telah memperlihatkan hasil yang baik dalam hal pemberian bantuan sosial, program ini belum menyelesaikan akar permasalahan kemiskinan di Jawa Barat. Selain itu, program ini juga belum sepenuhnya adil karena beberapa masyarakat miskin tidak dapat menerima bantuan sosial terlepas dari kondisi kemiskinan mereka. Penelitian ini memberikan tambahan pandangan mengenai evaluasi kebijakan publik dengan pendekatan valuatif di Indonesia. Dengan mudahnya program kebijakan sosial, seperti bantuan sosial, dapat dimanipulasi dan diselewengkan, maka penggunaan pendekatan valuatif ini dapat membantu dalam membentuk kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan adil. Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi evaluasi kebijakan publik selanjutnya di Indonesia dengan pendekatan valuatif yang serupa.

C.3. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang menggunakan landasan teori dan norma yang dianggap benar dan ideal untuk menilai suatu fenomena. Berikut

adalah pandangan para ahli mengenai pendekatan normatif:

1. John Rawls; John Rawls menekankan pentingnya pendekatan normatif dalam membangun masyarakat yang adil dan demokratis. Dalam pendekatan ini, norma-norma keadilan dan kesetaraan dimasukkan sebagai dasar untuk mengembangkan teori politik (Rawls, 1991).
2. Immanuel Kant; Menurut Immanuel Kant, pendekatan normatif memiliki dasar dalam kewajiban moral dan etika. Dalam pendekatan ini, teori etika digunakan sebagai dasar untuk menilai tindakan manusia secara moral (Kant, 1953).
3. Ingrid Robeyns; Robeyns berpendapat bahwa pendekatan normatif harus mengacu pada tujuan akhir manusia, yaitu mencapai kebahagiaan atau kebaikan. Dalam pendekatan ini, norma-norma kebaikan digunakan untuk menilai suatu tindakan atau kebijakan (Robeyns, 2021).
4. Steve Buckler; Buckler menyebutkan bahwa pendekatan normatif adalah penting dalam konteks politik sebagai dasar untuk menentukan tujuan dan prinsip yang dianggap ideal dan benar dalam pengambilan keputusan (Buckler, 2007).

Secara umum, para ahli sepakat bahwa pendekatan normatif adalah pendekatan yang menggunakan norma-norma yang dianggap benar dan ideal sebagai dasar untuk menilai suatu fenomena. Dalam pendekatan ini, teori moral, teori politik, dan norma kebaikan dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan nilai-nilai yang dianggap diinginkan dan penting dalam pengambilan keputusan.

Pendekatan Normatif dalam Analisis Kebijakan Publik mengacu pada proses kajian kebijakan publik dengan mengacu pada pandangan normatif atau nilai-nilai ideal yang harus dicapai oleh kebijakan publik yang dihasilkan. Pendekatan ini lebih mengutamakan aspek keadilan, moralitas, etika dan prinsip dasar lainnya dalam membuat kebijakan publik. Berikut adalah beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pendekatan normatif dalam analisis kebijakan publik:

- a. Memahami nilai-nilai dasar: Kebijakan publik yang dihasilkan harus mencerminkan nilai-nilai dasar yang telah diterima oleh masyarakat dan negara. Hal ini melibatkan pengamatan nilai dasar dalam masyarakat dan melibatkan sejumlah ahli dalam bidang kebijakan publik untuk menghadirkan pandangan secara holistik.
- b. Menentukan standar etika dan moralitas: Pendekatan normatif memerlukan pengikut perspektif nilai-nilai moral dan etika tertentu yang akan membuat kebijakan publik yang mencerminkan visi ideal dan moralitas. Menyusun standar etika dan moralitas menjadi bagian penting dari pendekatan normatif dalam analisis kebijakan publik.
- c. Pengamatan situasi terkait: Sebelum dapat menghasilkan kebijakan publik yang baik, penting untuk mempelajari situasi terkait secara umum. Pengamatan situasi terkait dilakukan untuk memastikan kebijakan publik yang dihasilkan mencerminkan, menindaklanjuti, dan sejalan dengan situasi sosial, kultural dan ekonomi di masyarakat.
- d. Melibatkan masyarakat: Partisipasi masyarakat dirasa sangat penting dalam menghasilkan kebijakan publik yang ideal. Melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan akan membantu dalam menentukan nilai-nilai dasar dan mempertimbangkan situasi yang benar-benar mengacu pada perkembangan masyarakat sendiri.

Dalam membuat kebijakan publik harus meninjau hasil analisis secara holistik, melibatkan banyak pihak dan silaturahmi, dan memperkuat nilai-nilai genprak yang melekat pada masyarakat luas. Melalui pendekatan normatif dalam analisis kebijakan publik, dapat mencapai tujuan dasar kebijakan publik dengan tetap memperhatikan norma moral dan etika yang berlaku di masyarakat.

Salah satu contoh pendekatan normatif dalam analisis kebijakan publik di Indonesia adalah studi kasus penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Nurdin (2019) mengenai analisis kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang. Penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yang bertujuan untuk menilai kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang berdasarkan norma atau nilai yang dianggap ideal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang belum sepenuhnya sesuai dengan nilai atau norma yang dianggap ideal. Masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pengawasan dalam pengumpulan dan pengangkutan sampah, sedangkan fasilitas pengelolaan limbah masih kurang. Oleh karena itu, perlu ada upaya dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah dengan mencakup aspek normatif seperti keadilan, kebebasan, dan keseimbangan lingkungan.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan analisis kebijakan publik di Indonesia dengan pendekatan normatif. Dalam banyak kasus di Indonesia, kebijakan publik seringkali tidak memperhatikan aspek normatif yang penting, seperti keadilan, kebebasan, dan keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan normatif dalam analisis kebijakan publik dapat membantu dalam menilai kebijakan yang dianggap ideal dan dapat memberikan masukan untuk perbaikan atau pengembangan kebijakan publik di masa depan.

C.4. Pendekatan Institusional

Pendekatan institusional adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang menekankan pentingnya melihat institusi dan lembaga yang terlibat dalam kebijakan publik. Berikut adalah pandangan beberapa ahli tentang pendekatan institusional:

1. Charles Lindblom; Lindblom menjelaskan pendekatan institusional membantu untuk memahami bagaimana lembaga dan institusi yang masih berdiri dari sebelumnya mungkin mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik saat ini (Lindblom, 1980).

2. Robert Putnam; Robert Putnam merumuskan pendekatan institusional dalam perspektif sosial. Menurutnya, lembaga dan organisasi sosial berperan penting dalam membentuk dan memengaruhi budaya politik, nilai, kepemimpinan, dan ketegasan dalam melaksanakan kebijakan publik (Putnam, 2017).
3. Douglas North; Douglas North berfokus pada pentingnya lembaga sebagai sumber daya yang memengaruhi kebijakan publik dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, institusi dapat meningkatkan efisiensi, kreativitas, dan inovasi melalui pengorganisasian koordinasi dan komunikasi antara stakeholder (North, 2016).

Secara umum, para ahli sepakat bahwa pendekatan institusional mempertimbangkan peran dari lembaga dan institusi dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Pendekatan ini mengakui bahwa keputusan dan implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor institusional seperti struktur dan peranan lembaga, norma dan nilai, serta tingkat interaksi antara lembaga dan stakeholder.

Salah satu contoh studi kasus mengenai penerapan pendekatan institusional dalam analisis kebijakan publik di Indonesia adalah dalam konteks pengelolaan hutan dan lingkungan hidup. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan program untuk melindungi hutan dan lingkungan hidup, seperti moratorium penebangan hutan, program restorasi gambut, dan kampanye pro-hijau. Namun, terdapat berbagai tantangan dan kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Salah satu faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut adalah kompleksitas lembaga yang terlibat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan dan lingkungan hidup. Lembaga yang terkait dalam hal ini, antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Restorasi Gambut, Bappenas, dan lembaga-lembaga masyarakat.

Dalam hal ini, pendekatan institusional dapat membantu

untuk memahami peran dan interaksi dari institusi-institusi tersebut dalam pengambilan keputusan kebijakan publik dan pelaksanaannya. Pendekatan institusional dapat membantu untuk menganalisis bagaimana lembaga-lembaga tersebut berinteraksi, beradaptasi, dan melaksanakan fungsinya dalam sistem kebijakan hutan dan lingkungan hidup. Melalui pendekatan institusional, analisis kebijakan publik dapat mengamati, memetakan dan menilai struktur institusional, norma-nilai atau budaya lembaga, hirarki kekuasaan, serta strategi dan taktik lembaga dalam mengambil kebijakan publik. Hal ini membantu dalam memahami kompleksitas lembaga untuk meningkatkan koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan hutan dan lingkungan hidup di Indonesia.

D. Tantangan Pendekatan Analisis Kebijakan di Masa Depan

Dalam pengambilan kebijakan, prinsip keadilan, kesetaraan, dan penggunaan data dan informasi yang akurat sangat penting untuk dipegang teguh. Selain itu, analisis dampak dan risiko kebijakan publik juga harus diperhatikan untuk mengantisipasi adanya dampak negatif yang dapat terjadi. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, diharapkan kebijakan publik yang diambil dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi masyarakat. Meskipun pendekatan analisis kebijakan publik memiliki banyak manfaat dalam pengambilan keputusan kebijakan, namun ada beberapa tantangan yang harus dihadapi:

1. Terbatasnya akses pada data dan informasi yang akurat, faktual, dan terkini menjadi kendala dalam melakukan analisis kebijakan publik.
2. Keterlibatan pemangku kepentingan yang tidak merata sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan.

3. Terdapat perbedaan pandangan dan preferensi dari pemangku kepentingan yang menyulitkan proses pengambilan keputusan yang konsisten.
4. Pemahaman yang terbatas di kalangan masyarakat tentang pentingnya keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan di level kebijakan publik.
5. Dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, seringkali terjadi adanya tekanan politik dari kelompok atau individu tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompoknya.
6. Adanya konflik kepentingan dan interaksi antara sektor dan level kebijakan yang berbeda, seperti antara pemerintah pusat dan daerah.
7. Terjadi kesulitan dalam pengambilan keputusan ketika kebijakan publik melibatkan masalah yang kompleks dan multi-level. Hal ini membutuhkan keterampilan dan kemampuan analisis yang kompleks dan terintegrasi.

Dari pendekatan analisis kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa pengambilan kebijakan publik yang baik dan efektif harus didasarkan pada penyelidikan yang komprehensif dan terperinci tentang situasi dan masalah yang dihadapi, serta melibatkan keterlibatan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan harus terus berupaya mengatasi tantangan-tantangan tersebut agar proses pengambilan kebijakan publik lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Blake, R. R., & Mouton, J. S. (1981). Management by Grid Principles or Situationalism: Which? *Group & Organization Management*, 6(4), 439–455. <https://doi.org/10.1177/105960118100600404>
- Brugha, R., & Varvasovszky, Z. (2000). Stakeholder analysis: A review. *Health Policy and Planning*, 15(3), 239–246. <https://doi.org/10.1093/HEAPOL/15.3.239>
- Buckler, S. (2007). Political Theory and Political Ethics in the Work of Hannah Arendt. *Contemporary Political Theory* 2007 6:4, 6(4), 461–483. <https://doi.org/10.1057/PALGRAVE.CPT.9300299>
- Bugental, D. B. (2000). Acquisition of the Algorithms of Social Life: A Domain-Based Approach. *Psychological Bulletin*, 126(2), 187–219. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.126.2.187>
- Dahl, R. A. (2017). *Politics, economics, and welfare*. Routledge.
- Darkheim, E. (2013). *Emile Durkheim on Institutional Analysis Heritage of Sociology Series*. University of Chicago Press.
- Goethals, G. R., & Sorenson, G. Jones. (2006). *The quest for a general theory of leadership*. Edward Elgar. https://books.google.com/books/about/The_Quest_for_a_General_Theory_of_Leader.html?hl=id&id=yoSpyA152NQC
- Hogue, T. (1993). Community-Based Collaboration: Community Wellness Multiplied. *Oregon Center for Community Leadership, Oregon State University*.
- Janssen, M., & Helbig, N. (2018). Innovating and changing the policy-cycle: Policy-makers be prepared! *Government Information Quarterly*, 35(4), S99–S105. <https://doi.org/10.1016/J.GIQ.2015.11.009>
- Kant, I. (1953). *Immanuel Kant's Critique of Pure Reason*. Рипол Классик. https://books.google.co.id/books?id=HtgMAwAAQBAJ&dq=Immanuel+Kant&lr=&hl=id&source=gbs_navlinks_s
- Kaplan, R. S. (1986). The role for empirical research in management accounting. *Accounting, Organizations and Society*, 11(4–5), 429–452. [https://doi.org/10.1016/0361-3682\(86\)90012-7](https://doi.org/10.1016/0361-3682(86)90012-7)

- Khalil, H., Peters, M., Godfrey, C. M., Mcinerney, P., Soares, C. B., & Parker, D. (2016). An Evidence-Based Approach to Scoping Reviews. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*, 13(2), 118–123. <https://doi.org/10.1111/WVN.12144>
- Lindblom, C. E. (1980). *The policy-making process*. Prentice-Hall.
- North, D. C. (2016). Institutions and Economic Theory. *The American Economist*, 61(1), 72–76. <https://doi.org/10.1177/0569434516630194>
- Ozernoy, V. M. (2016). Choosing The “Best” Multiple Criterlv Decision-Making Method. *INFOR: Information Systems and Operational Research*, 30(2), 159–171. <https://doi.org/10.1080/03155986.1992.11732192>
- Putnam, R. D. (2017). Diplomacy and domestic politics: The logic of two-level games. In *International Organization* (pp. 437–470). Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781315251981-16/DIPLOMACY-DOMESTIC-POLITICS-LOGIC-TWO-LEVEL-GAMES-ROBERT-PUTNAM>
- Rawls, J. (1991). Justice as Fairness: Political Not Metaphysical. *Equality and Liberty*, 145–173. https://doi.org/10.1007/978-1-349-21763-2_10
- Robeyns, I. (2021). The capability approach. *The Routledge Handbook of Feminist Economics*, 72–80. <https://doi.org/10.4324/9780429020612-9>
- Mill, J. S. (2008). Utilitarianism. In *Seven Masterpieces of Philosophy* (pp. 329–375). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315508818-7>
- Walzer, Michael. (1970). *Obligations; essays on disobedience, war, and citizenship*. Harvard Univ. Press. <https://books.google.com/books/about/Obligations.html?hl=id&id=zPOWIEIDqDAC>
- Weber, M. (1974). *Webers ideal of bureaucracy Weber identified the essential components*. Course Hero. <https://www.coursehero.com/file/p3muo83t/Webers-ideal-of-bureaucracy-Weber-identified-the-essential-components-of/>



BIODATA PENULIS

Fitri Kurnianingsih, Lahir di Tanjugngpinang pada 16 Maret 1987. Memulai perjalanan pendidikan tingginya mulai tingkat sarjana starata satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos) di Univeritas Pasundan Bandung tahun 2004 dan

Menyelesaikan pada tahun 2008. Kemudian lanjut studi S2 tahun 2008 dan menyelesaikan di tahun 2010 di Universitas yang sama dengan gelar Magister Sains (M.Si). Di kampus ini juga beliau melanjutkan studi Program Doktoralnya (Dr) yang di mulai tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016. Keseluruhan bidang kajian studinya adalah linear di bidang Ilmu Administrasi Publik dan merupakan Doktor Termuda (usia 29) tahun di lingkungan tugasnya Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di tahun 2022, mendapatkan penghargaan Dosen Terbaik Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saat ini fokus dalam beberapa kajian strategis pada Manajemen Sektor Publik baik di tingkat regional, nasional dan internasional. Ikut mendirikan Pusat Kajian di Universitas Maritim Raja Ali Haji yang diberi nama Center For Maritime Policy And Governance Studies (CMPGS).

KEBIJAKAN PUBLIK

Teori, Proses, dan penerapannya

Kebijakan Publik termasuk salah satu kunci keberhasilan bagi suatu negara untuk berkembang dan maju. Perkembangan dan dinamika kebijakan publik dewasa ini sangatlah pesat terutama disaat suatu negara memasuki era globalisasi dan digitalisasi. Banyak masalah-masalah atau persoalan-persoalan publik yang perlu ditangani dan diatasi karena begitu kompleksnya. Buku ini merupakan penulisan bersama dari para akademisi dan praktisi sesuai dengan kepakarannya dan ditulis secara teoritis dan praktis disertai contoh penerapannya. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya Kebijakan Publik.

Buku ini terdiri dari 11 bab yang membahas materi tentang Konsep dan Ruang Lingkup Kebijakan Publik, Ciri-Ciri dan Tujuan Kebijakan Publik, Pentingnya Studi Kebijakan Publik, Pendekatan Kebijakan Publik, Model-Model Kebijakan Publik, Proses atau Tahapan Kebijakan Publik, Identifikasi dan Penyusunan Masalah Kebijakan Publik, Formulasi Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, dan Evaluasi Kebijakan Publik, serta Pendekatan dalam Analisis Kebijakan Publik.

PT. ADIKARYA PRATAMA GLOBALINDO



Jalan Letnan Tukiyat No. 210 Mungkid
Kota Magelang, Jawa Tengah
WA +62 898999951, Email: apgppers@gmail.com
Website: www.adpraglobalindo.my.id

